



LAPORAN KINERJA Tahun 2023



**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta dukungan kerjasama dari semua pihak terkait di lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BPBAP Ujung Batee Tahun 2023 ini dapat terlaksana dengan baik.

LKj ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada BPBAP Ujung Batee dalam kurun waktu Tahun 2023. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Semoga laporan ini dapat menjadi tolak ukur peningkatan kinerja bagi BPBAP Ujung Batee dan menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan di masa mendatang.

Aceh Besar, 1 Februari 2024



Manijo, S.St.Pi



PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja satker Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee Tahun 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat menjadi tanggung jawab satker Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee.

Reviu bertujuan memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami tersebut, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan ini.

Jakarta, 1 Februari 2024

Analisis Kebijakan Muda

Tim Reviu LKj Ditjen Perikanan Budi Daya

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Ida Widaningsih, SH

NIP.197801102002122004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Tugas dan Fungsi.....	2
1.4. Sumber Daya Manusia	3
1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya	5
1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	6
BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	7
2.1. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	7
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2023	13
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023	17
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	19
3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	20
1. SS-1: Ekonomi sektor perikanan budi daya meningkat di BPBAP Ujung Batee	20
2. SS-2: Meningkatnya sarana dan prasarana pakan ikan untuk pembudidaya ikan	23
3. SS-3: Meningkatnya kawasan perikanan budi daya yang direvitalisasi	26
4. SS-4: Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	28



5.	SS-5: Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budi daya	44
6.	SS-6: Meningkatnya kualitas pengendalian pakan dan obat ikan	49
7.	SS-7: Tata kelola pemerintahan yang baik di BPBAP Ujung Batee	51
3.3.	Efisiensi.....	76
3.4.	Kinerja Anggaran.....	77
BAB 4.	PENUTUP	79



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sumberdaya Manusia Status PNS Berdasarkan Jabatan.....	3
Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Periode 2020-2024	8
Tabel 3. Penetapan Kinerja Tahun 2023	13
Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja	19
Tabel 5. Nilai PNBPN yang diperoleh.....	21
Tabel 6. Sumber PNBPN yang diperoleh	22
Tabel 7. Perbandingan capaian PNBPN antar satker	22
Tabel 8. Persentase pakan mandiri yang diproduksi	24
Tabel 9. Produksi dan distribusi pakan	25
Tabel 10. Perbandingan capaian produksi pakan mandiri	25
Tabel 11. Kluster tambak Udang dan Bandeng yang siap operasional.....	26
Tabel 12. Barang/jasa kluster tambak bandeng yang diserahkan.....	27
Tabel 13. Perbandingan capaian kluster tambak siap operasional	27
Tabel 14. Persentase produksi calon induk unggul	28
Tabel 15. Perbandingan capaian produksi calon induk	30
Tabel 16. Persentase bantuan calon induk yang disalurkan.....	31
Tabel 17. Perbandingan capaian bantuan calon induk disalurkan	32
Tabel 18. Persentase bantuan benih yang disalurkan	33
Tabel 19. Perbandingan capaian bantuan benih disalurkan	34
Tabel 20. Sarana produksi dan usaha komoditas ikan lokal yang disalurkan.....	35
Tabel 21. Perbandingan capaian sarana produksi dan usaha komoditas ikan lokal yang disalurkan.....	36
Tabel 22. Sarana produksi bioflok yang disalurkan ke masyarakat.....	37
Tabel 23. Kelompok penerima sarana produksi bioflok	39
Tabel 24. Perbandingan capaian sarana produksi bioflok yang disalurkan.....	40
Tabel 25. Persentase bantuan sarana kawasan budi daya yang disalurkan.....	41
Tabel 26. Kelompok penerima sarana kawasan budi daya	41



Tabel 27. Perbandingan capaian bantuan sarana kawasan budi daya yang disalurkan	42
Tabel 28. Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan.....	43
Tabel 29. Persentase kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji.....	44
Tabel 30. Pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan	45
Tabel 31. Perbandingan capaian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji.....	46
Tabel 32. Persentase pengujian sampel antimikrobal resistan (AMR).....	47
Tabel 33. Perbandingan capaian pengujian sampel antimikrobal resistan	48
Tabel 34. Persentase pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan.....	49
Tabel 35. Pengujian pakan berdasarkan jenis sampel dan parameter uji.....	50
Tabel 36. Perbandingan capaian pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan.	50
Tabel 37. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP.....	51
Tabel 38. Persentase pelaku usaha budi daya ikan yang terintegrasi KUSUKA.....	54
Tabel 39. Indeks profesionalitas ASN.....	55
Tabel 40. Indeks pengelolaan kepegawaian	58
Tabel 41. Indeks pengelolaan kepegawaian unit pelaksana teknis.....	58
Tabel 42. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK	60
Tabel 43. Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya wilayah kerja BPBAP Ujung Batee.....	61
Tabel 44. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.....	62
Tabel 45. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan	64
Tabel 46. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	66
Tabel 47. Rincian bobot IKPA.....	66
Tabel 48. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN.....	68
Tabel 49. Nilai kinerja anggaran.....	69
Tabel 50. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa.....	71
Tabel 51. Nilai pengawasan kearsipan.....	73
Tabel 52. Persentase layanan perkantoran	75
Tabel 53. Pagu dan realisasi anggaran tahun 2023	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPBAP Ujung Batee	3
Gambar 2. Pegawai BPBAP Ujung Batee berdasarkan jabatan	4
Gambar 3. Pegawai BPBAP Ujung Batee berdasarkan tingkat pendidikan	4
Gambar 4. Potensi Perikanan Budi Daya	5
Gambar 5. Tangkapan layar aplikasi Kinerjaku	18
Gambar 6. Perolehan PNBPN 2018-2023	21
Gambar 7. Produksi pakan tahun 2018-2023	24
Gambar 8. Perkembangan produksi calon induk bermutu 2018-2023	29
Gambar 9. Komoditas produksi calon induk bermutu.....	29
Gambar 10. Komoditas benih yang disalurkan.....	31
Gambar 11. Perkembangan benih yang disalurkan 2018-2023	33
Gambar 12. Komoditas benih yang disalurkan.....	34
Gambar 13. Perkembangan sarana produksi Bioflok yang disalurkan 2018-2023.....	38
Gambar 14. Pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan tahun 2018-2023	45
Gambar 15. Persentase resistensi antibiotik	48
Gambar 16. Tangkapan layar LKE AKIP BPBAP Ujung Batee	52
Gambar 17. Nilai PM SAKIP unit pelaksana teknis Ditjen PB.....	53
Gambar 18. Indeks profesionalitas ASN unit pelaksana teknis	56
Gambar 19. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN pada UPT	68
Gambar 20. Nilai kinerja anggaran pada UPT	70
Gambar 21. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa pada UPT	72
Gambar 22. Pengawasan kearsipan pada UPT	74
Gambar 23. Tangkapan layar aplikasi SMART tahun 2023	76
Gambar 24. Alokasi jenis belanja dan sumber dana belanja Tahun 2023.....	77
Gambar 25. Pagu anggaran tahun 2014-2023.....	78



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BPBAP Ujung Batee Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan. Selain itu, sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan. Untuk wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas maka dilakukan perjanjian kinerja sebagai pernyataan komitmen, tekad dan janji untuk mencapai target kinerja yang jelas dan terukur, serta didukung sumber daya anggaran yang memadai. Alokasi anggaran tahun 2023 awalnya sebesar Rp 41.019.562.000, setelah berjalannya waktu mengalami pengurangan direalokasi ke BUN, sehingga pagu akhir sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp 35.311.902.000 dengan realisasi Rp 34.917.372.638 (98,88 %). Adanya perubahan anggaran dan evaluasi indikator kinerja mengakibatkan beberapa kali penyesuaian perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja revisi terakhir pada bulan November 2023 telah ditetapkan 7 Sasaran Strategis (SS) dan 27 indikator kinerja, dan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPBAP Ujung Batee sampai dengan Tahun 2023 sesuai aplikasi “kinerjaku” adalah sebesar 111,25%. Dari 27 indikator kinerja yang telah dilaksanakan dan dilakukan pengukuran capaian terdapat 9 indikator telah mencapai target yaitu:

1. Nilai PNBP yang Diperoleh tercapai 11055,17 %
2. Persentase pakan mandiri yang diproduksi tercapai 126,7 %
3. Kluster tambak udang dan bandeng yang siap operasional tercapai 100 %
4. Persentase calon induk unggul yang diproduksi tercapai 103,71 %
5. Persentase bantuan calon induk yang disalurkan tercapai 140,22 %
6. Persentase bantuan benih yang disalurkan tercapai 142,25 %
7. Sarana produksi dan usaha komoditas ikan lokal yang disalurkan tercapai 100 %
8. Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan tercapai 106,6 %
9. Persentase bantuan sarana kawasan budi daya yang disalurkan tercapai 100 %
10. Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan tercapai 100 %
11. Persentase kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji tercapai 149,04 %
12. Persentase pengujian Antimikrobal Resistance (AMR) tercapai 109,8 %
13. Persentase pakan ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan tercapai 124,39 %
14. Persentase pelaku usaha budi daya ikan yang terintegrasi KUSUKA lingkup BPBAP Ujung Batee tercapai 101,7 %
15. Indeks profesionalitas ASN unit kerja lingkup BPBAP Ujung Batee tercapai 109,73 %
16. Indeks pengelolaan kepegawaian tercapai 200 %



17. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi tercapai 104,57 %
18. Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee tercapai 116,28 %
19. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 100 %
20. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPBAP Ujung Batee tercapai 128,57 %
21. Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBAP Ujung Batee tercapai 100,77 %
22. Nilai kinerja anggaran BPBAP Ujung Batee tercapai 104,49 %
23. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPBAP Ujung Batee tercapai 106,26 %.
24. Persentase Layanan Perkantoran BPBAP Ujung Batee tercapai 100 %.

Kemudian indikator kinerja yang tidak mencapai target yang telah ditentukan yaitu:

1. Nilai PM SAKIP BPBAP Ujung Batee hanya tercapai 98 %
2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBAP Ujung Batee hanya tercapai 93,46 %
3. Nilai Pengawasan Kearsipan BPBAP Ujung Batee hanya tercapai 91,67 %

Peningkatan kinerja terhadap pencapaian terhadap beberapa indikator kinerja yang masih di bawah target yang ditetapkan perlu senantiasa dilakukan melalui kerja keras pada beberapa kegiatan pendukung indikator kinerja dimaksud serta melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan internal yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis. Dengan demikian, diharapkan di masa yang akan datang dapat terjadi peningkatan capaian kinerja yang lebih optimal melalui kegiatan-kegiatan pendukung yang dilakukan secara efektif dan efisien.



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV Tahun 2020-2024, telah mengamanatkan untuk terus melakukan pembangunan perikanan budi daya secara berkelanjutan, karena diyakini dengan potensi dan kekuatan yang ada, perikanan budi daya mampu memberi kontribusi pada 9 agenda pembangunan nasional pemerintah (NAWACITA), diantaranya mewujudkan kemandirian ekonomi (termasuk pembudidaya ikan), serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi budi daya yang memiliki daya saing. Penjabaran pelaksanaan pembangunan perikanan budi daya, lebih lanjut dituangkan dalam buku Rencana Strategi (RENSTRA) Perikanan Budi Daya 2020-2024.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budi daya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budi daya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam beberapa perspektif dengan masing-masing indikator kinerja seperti yang tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan budi daya.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2023 ini merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Balai Budidaya Perikanan Air Payau Ujung Batee (BPBAP) Ujung Batee. Adapun tujuan penyusunan LKj adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran BPBAP Ujung Batee Tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu kesimpulan yang



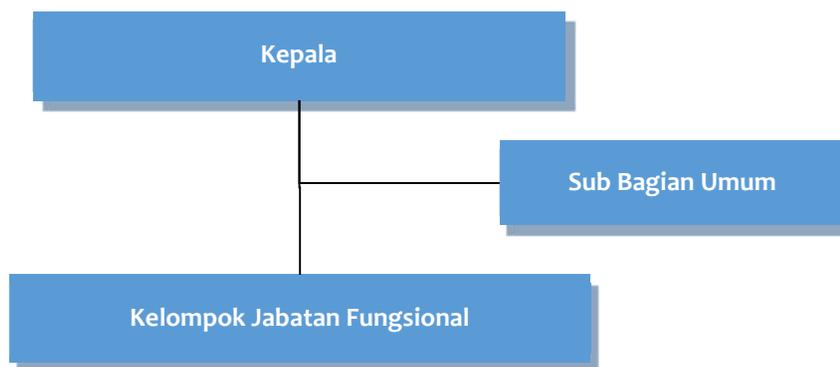
dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan budi daya ke depan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya, disebutkan bahwa tugas Balai Budidaya Perikanan Air Payau (salah satunya BPBAP Ujung Batee) adalah ***“melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi di bidang perikanan budi daya air payau”***. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BPBAP Ujung Batee mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perikanan budi daya air payau;
2. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budi daya air payau;
3. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budi daya air payau;
4. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budi daya air payau;
5. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budi daya air payau;
6. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budi daya air payau;
7. pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budi daya air payau;
8. pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budi daya air payau;
9. pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budi daya air payau;
10. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budi daya air payau; dan
11. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Susunan organisasi Balai Perikanan Budidaya Air Payau terdiri atas: a) Subbagian Umum; dan b) Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



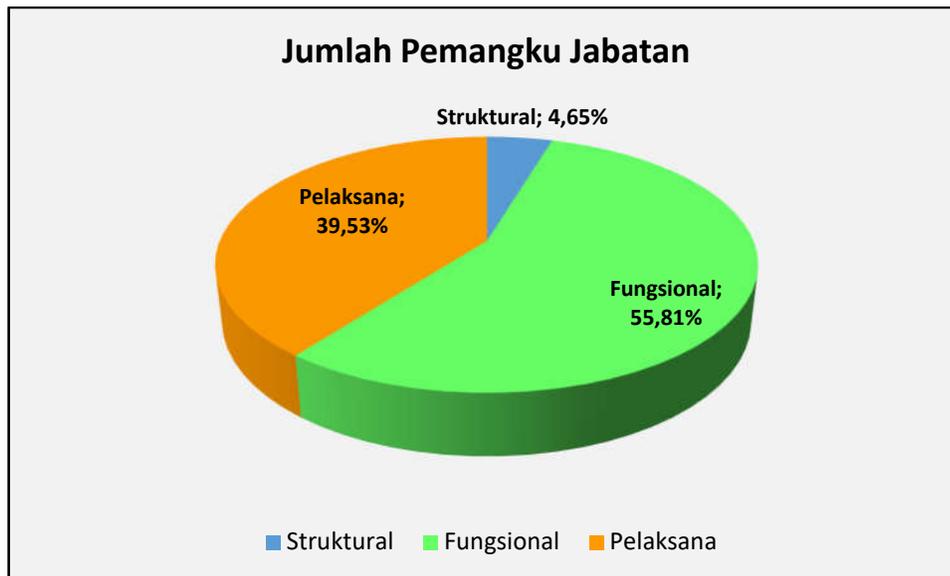
Gambar 1. Struktur Organisasi BPAP Ujung Batee

1.4. Sumber Daya Manusia

Total keseluruhan pegawai BPAP Ujung Batee sebanyak 76 orang, dengan rincian status PNS sebanyak 43 orang dan non PNS sebanyak 33 orang. Pegawai yang berstatus PNS didominasi oleh fungsional tertentu sebanyak 24 orang, sementara pelaksana hanya sebanyak 19 orang, dan pejabat struktural 2 orang.

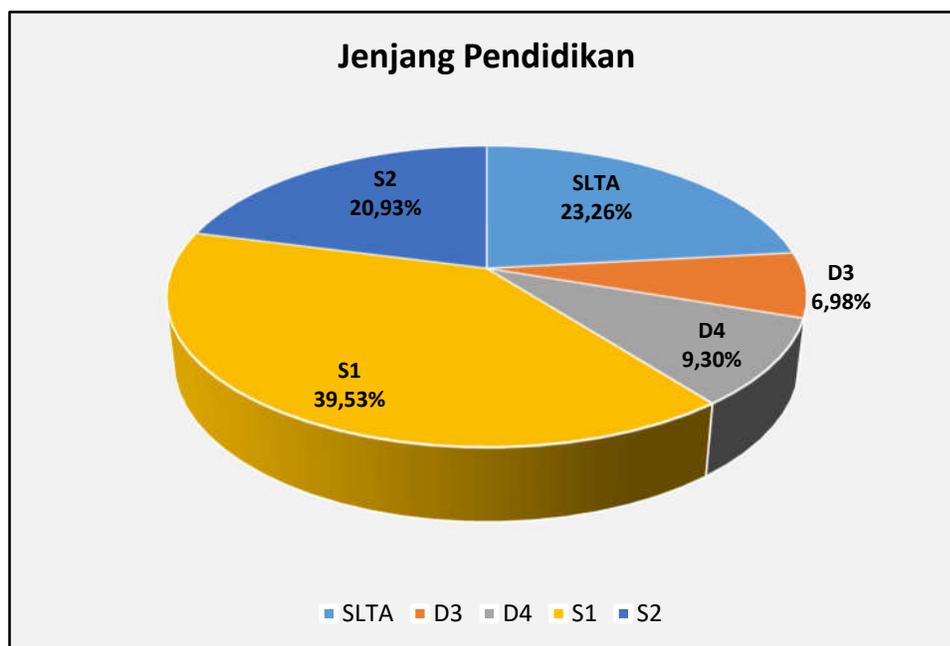
Tabel 1. Sumberdaya Manusia Status PNS Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Nama/Jenjang Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Struktural	1 Kepala Balai	1	
		2 Kepala Sub Bagian Umum	1	
2	Fungsional	1 Analis Akuakultur Ahli Muda	2	
		2 Perakayasa Ahli Madya	1	
		3 Perakayasa Ahli Muda	1	
		4 Pengawas Perikanan Ahli Muda	6	
		5 Pengawas Perikanan Pertama	2	
		6 Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan	4	
		7 PHPI Ahli Muda	1	
		8 PHPI Ahli Pertama	1	
		9 PHPI Pelaksana Lanjutan	1	
		10 Teknisi Litkayasa Pelaksana Lanjutan	1	
		11 Calon PHPI	1	
		12 Pranata Keuangan APBN Penyelia	1	
3	Pelaksana	1 Analis Perikanan Budidaya	1	
		2 Teknisi Perikanan Budidaya	8	
		3 Teknisi Listrik dan Jaringan	1	
		4 Pengadministrasi Pengujian	1	
		5 Analis Tata Usaha	1	
		6 Penyusun Laporan Keuangan	1	
		7 Pengelola Keuangan	1	
		8 Pengelola Surat	1	
	Pengadministrasi Barang Milik Negara	2		
Jumlah			43	



Gambar 2. Pegawai BPBAP Ujung Batee berdasarkan jabatan

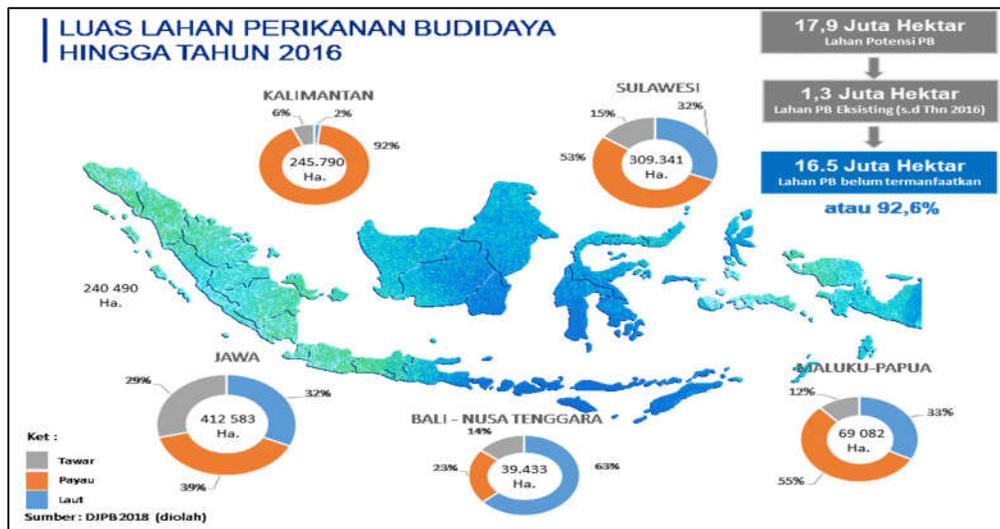
Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan, komposisi sumber daya manusia BPBAP Ujung Batee adalah sebagai berikut: (i) S2 sebanyak 9 orang (21%); (ii) S1 sebanyak 17 orang (40%); (iii) D4 sebanyak 4 orang (9%); (iv) D3 sebanyak 3 orang (7%); dan (v) SLTA sebanyak 10 orang (23%).



Gambar 3. Pegawai BPBAP Ujung Batee berdasarkan tingkat pendidikan

1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya

Potensi lahan perikanan budi daya secara nasional diperkirakan sebesar 17,92 juta ha yang terdiri potensi budi daya air tawar 2,83 juta ha, budi daya air payau 2,96 juta ha dan budi daya laut 12,12 juta ha (sumber: Review Masterplan Perikanan Budidaya Tahun 2014).



Gambar 4. Potensi Perikanan Budi Daya

Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 11,32 persen untuk budi daya air tawar, 22,74 persen pada budi daya air payau dan 2,28 persen untuk budi daya laut. Tingkat pemanfaatan ini masih rendah terutama untuk budi daya laut sehingga diperlukan upaya pemanfaatan agar produksi perikanan budi daya dapat terus ditingkatkan. Peningkatan produksi perikanan budi daya harus disertai dengan peningkatan serapan pasar baik ekspor maupun konsumsi dalam negeri.

Permasalahan yang dihadapi dalam perikanan budi daya secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu permasalahan internal dan eksternal.

- Permasalahan internal yang dihadapi meliputi : (i) terbatasnya ketersediaan benih dan induk yang bermutu dan berkualitas (ii) harga pakan masih dikontrol oleh pasar karena ketersediaan pakan yang berkualitas dan bermutu dengan harga terjangkau masih terbatas, (iii) potensi bahan baku pakan lokal untuk pembuatan pakan ikan di masyarakat (kelompok GERPARI) belum optimal dimanfaatkan sehingga masih bergantung pada impor; (iv) keterbatasan akses permodalan untuk usaha perikanan budi daya; (v) pengelolaan lingkungan dan penyakit ikan yang belum optimal; (vi) cara berbudidaya ikan yang baik (pembesaran, pembenihan dan pembuatan pakan) belum optimal diterapkan oleh pelaku usaha perikanan budi daya; dan (vii) kondisi infrastruktur yang belum optimal mendukung pengembangan usaha perikanan budi daya secara efisien.

- b. Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan perikanan budi daya meliputi: (i) ruang untuk usaha perikanan budi daya belum ada kepastian memadai, (ii) regulasi dan perizinan lintas sektoral belum begitu simetrik sehingga menghambat perkembangan usaha perikanan budi daya, dan (iii) perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan.

Lebih spesifik lagi permasalahan yang dihadapi BPBAP Ujung Batee yaitu adanya ketimpangan antara sumber daya (baik SDM maupun dukungan anggaran) dengan luas wilayah kerja. Wilayah kerja BPBAP Ujung Batee mencakup seluruh Sumatera yang begitu luas. Anggaran hanya cukup mengakomodir kegiatan di Aceh dan Sumut, selain itu instalasi budi daya perikanan BPBAP Ujung Batee hanya satu dan berada di Aceh Besar, sehingga sulit untuk menjangkau wilayah Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, maupun Lampung.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj BPBAP Ujung Batee Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja BPBAP Ujung Batee selama kurun waktu Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang BPBAP Ujung Batee serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi BPBAP Ujung Batee, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program BPBAP Ujung Batee pada Tahun 2020-2024, rencana kerja dan anggaran Tahun 2023, penetapan kinerja BPBAP Ujung Batee serta pengukuran/pengelolaan kinerja BPBAP Ujung Batee.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan prestasi indikator kinerja BPBAP Ujung Batee serta evaluasi dan analisis kinerja Tahun 2023. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Merujuk pada visi besar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Visi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 2020-2024 sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden serta visi KKP yaitu “Terwujudnya masyarakat perikanan budi daya yang sejahtera dan sumber daya perikanan budi daya yang berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden, yaitu:

1. Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan daya saing SDM dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
2. Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
3. Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
4. Misi ke-8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menjalankan Misi ke-2, yaitu “Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budi daya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional”. Misi utama DJPB di atas didukung dengan Misi ke-8, yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja DJPB di pusat dan daerah.

Sedangkan tujuan pembangunan perikanan budi daya adalah:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budi daya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan budi daya;
 - b. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan perikanan budi daya secara berkelanjutan; dan
2. Meningkatkan produksi perikanan budi daya secara berkelanjutan.

Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah disebutkan di atas, BPBAP Ujung Batee menetapkan tujuan pokok dalam kegiatannya yaitu:

1. Melaksanakan uji terap teknik perikanan budi daya air payau;

2. Melaksanakan penyiapan bahan standardisasi perikanan budi daya air payau;
3. Melaksanakan sertifikasi sistem perikanan budi daya air payau;
4. Melaksanakan kerja sama teknis perikanan budi daya air payau;
5. Mengelola pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budi daya air payau;
6. Melaksanakan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budi daya air payau;
7. Melaksanakan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budi daya air payau;
8. Melaksanakan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budi daya air payau;
9. Melaksanakan bimbingan teknis perikanan budi daya air payau.

Untuk melakukan pengukuran atas pencapaian tujuan yang ditetapkan maka harus ditetapkan pula sasaran strategis yang menjadi indikator keberhasilan ataupun kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan tersebut. Sasaran peningkatan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan disusun berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang berkembang. BPBAP Ujung Batee telah menetapkan Sasaran Strategis dalam kurun waktu 5 tahun yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategi BPBAP Ujung Batee 2020 - 2024. Sasaran strategis berdasarkan tujuan yang akan dicapai dijabarkan dalam masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Periode 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat lingkup BPBAP Ujung Batee	1) Nilai PNPB dari perikanan budidaya (Rp 000)	1.034.278	1.167.145	1.251.476	1.376.624	1.514.286
2	Pengelolaan kawasan perikanan budidaya yang berkelanjutan	2) Percontohan pengelolaan kluster kawasan perikanan budidaya berkelanjutan (kawasan)	1	2	1	1	1
3	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana UPT	3) UPT perikanan budidaya yang ditingkatkan fasilitasnya (unit)		1	1	1	1
4	Pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan	4) Sarana produksi usaha perikanan budidaya yang didistribusikan ke masyarakat (kelompok)	7	17	15	15	15
		5) Prasarana produksi dan usaha yang dikembangkan (unit)		1	1	1	1
		6) Benih yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	7.110.000	7.683.315	8.000.000	9.000.000	10.000.000
		7) Calon induk unggul yang disalurkan ke masyarakat (ekor)		14.820	15.000	15.000	15.000
		8) Calon induk unggul yang diproduksi (ekor)	49.400	64.100	65.000	67.000	70.000
		9) Pakan ikan yang disalurkan ke masyarakat (kg)	100.000	70.000	72.000	75.000	77.000



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
		10) Pakan ikan yang diproduksi untuk operasional UPT (kg)		37.000	37.000	37.000	37.000
		11) Rehabilitasi sarana dan prasarana UPR/HSRT (unit)		3	3	3	3
		12) Sarana teknologi yg diproduksi oleh UPT (paket)	1	4	4	4	4
		13) Layanan Diseminasi Teknologi PB (layanan)		5	5	5	5
4	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan budidaya yang partisipatif	14) Jumlah layanan sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang sesuai standar (sampel)	3.350	3.350	3.450	3.550	3.650
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPBAP Ujung Batee	15) Indeks profesionalisme ASN lingkup BPBAP Ujung Batee (%)	72	73	74	75	76
		16) Penyelesaian LHP BPK atas BPBAP Ujung Batee (%)	100	100	100	100	100
		17) Nilai rekon pengelolaan kinerja BPBAP Ujung Batee (%)	85	90	92	94	96
		18) Rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPBAP Ujung Batee yang dokumen tindak lanjutnya telah tuntas (%)	60	65	70	75	85
		19) Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	85	87	90
		20) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPBAP Ujung Batee (%)	88	89	90	91	92
		21) Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPBAP Ujung Batee (%)	85	86	87	88	89
		22) Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa (%)		72,5	75	75	75
		23) Tingkat pengelolaan barang milik negara (%)		72,5	75	75	75

Pada tahun 2023 terdapat beberapa perbedaan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target dengan yang tercantum pada Rencana Strategis 2020-2024 hal ini terjadi karena adanya penyesuaian menindaklanjuti kebijakan KKP dan tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB. Setelah mengalami perubahan maka sasaran strategis berdasarkan tujuan yang akan dicapai dijabarkan dalam masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

1. **Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat di BPBAP Ujung Batee.** Diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:



- 1) Nilai PNBPN yang Diperoleh
2. **Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pakan Ikan Untuk Pembudidaya Ikan.** Diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 2) Persentase Pakan Mandiri yang Diproduksi
3. **Meningkatnya Kawasan Perikanan Budi Daya yang Direvitalisasi.** Diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 3) Kluster Tambak Udang dan Bandeng yang Siap Operasional
4. **Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan.** Diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 4) Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi
 - 5) Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan
 - 6) Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan
 - 7) Sarana Produksi Dan Usaha Komoditas Ikan Lokal yang Disalurkan
 - 8) Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang Disalurkan
 - 9) Persentase Bantuan Sarana Kawasan Budi Daya yang Disalurkan
 - 10) Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan
5. **Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya.** Diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 11) Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji
 - 12) Persentase Pengujian Antimikrobia Resistance (AMR)
6. **Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pakan dan Obat Ikan.** Diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 13) Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan (Persen)
7. **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPBAP Ujung Batee.** Diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 14) Nilai PM SAKIP BPBAP Ujung Batee
 - 15) Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA
 - 16) Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 17) Indeks Pengelolaan Kepegawaian
 - 18) Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
 - 19) Persentase Pemberitaan Netral dan Positif Terhadap Total Pemberitaan Tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee
 - 20) Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBAP Ujung Batee
 - 21) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja BPBAP Ujung Batee
 - 22) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBAP Ujung Batee
 - 23) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBAP Ujung Batee
 - 24) Nilai Kinerja Anggaran BPBAP Ujung Batee
 - 25) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPBAP Ujung Batee
 - 26) Nilai Pengawasan Kearsipan BPBAP Ujung Batee
 - 27) Persentase Layanan Perkantoran BPBAP Ujung Batee

Matriks keselarasan indikator kinerja pada Rencana Strategis 2020-2024 dengan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja 2023 dapat dilihat lebih detail pada Lampiran 1.



No Urut SS	Sasaran Strategis (SS)	No Urut IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	No Urut SS	Sasaran Strategis (SS)	No. IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2023	Keterangan
1	Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat lingkup BPBA Ujung Batee	1	Nilai PNPB dari perikanan budidaya (Rp.000)	1.034.278	1.167.145	1.251.476	1.376.624	1.514.286	1	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat di BPBA Ujung Batee	1	Nilai PNPB yang Diperoleh (Rupiah 000)	1.632.830	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
2	Pengelolaan kawasan perikanan budidaya yang berkelanjutan	2	Percontohan pengelolaan kluster kawasan perikanan budidaya berkelanjutan (kawasan)	1	2	1	1	1	3	Meningkatnya Kawasan Perikanan Budidaya yang Direvitalisasi	3	Kluster Tambak Udang dan Bandeng yang Siap Operasional (Kluster)	2	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
3	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana UPT	3	UPT perikanan budidaya yang ditingkatkan fasilitasnya (unit)		1	1	1	1	4	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	9	Persentase Bantuan Sarana Kawasan Budidaya yang Disalurkan (Persen)	100	Terobosan kebijakan di DJPB
4	Pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan	4	Sarana produksi usaha perikanan budidaya yang didisrui busikan ke masyarakat (kelompok)	7	17	15	15	15	4	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	8	Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang Disalurkan (Persen)	100	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
5		5	Prasarana produksi dan usaha yang dikembangkan (unit)		1	1	1	1	4	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	7	Sarana Produksi Dan Usaha Komoditas Ikan Lokal yang Disalurkan (Paket)	1	Adanya terobosan kebijakan di DJPB
6		6	Benih yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	7.110.000	7.683.315	8.000.000	9.000.000	10.000.000	4	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	6	Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan (Persen)	75	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
7		7	Calon induk unggul yang disalurkan ke masyarakat (ekor)		14.820	15.000	15.000	15.000	4	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	5	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan (Persen)	75	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
8		8	Calon induk unggul yang diproduksi (ekor)	49.400	64.100	65.000	67.000	70.000	4	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	4	Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi (Persen)	100	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
9		9	Pakan ikan yang disalurkan ke masyarakat (kg)	100.000	70.000	72.000	75.000	77.000	2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pakan Ikan Untuk Pembudidayaan Ikan	2	Persentase Pakan Mandiri yang Diproduksi (Persen)	80	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
10		10	Pakan ikan yang diproduksi untuk operasional UPT (kg)		37.000	37.000	37.000	37.000						Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
11		11	Rehabilitasi sarana dan prasarana UPT/HSRT (unit)		3	3	3	3						Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
12		12	Sarana teknologi yg diproduksi oleh UPT (paket)	1	4	4	4	4						Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
13		13	Layanan Diseminasi Teknologi PB (layanan)		5	5	5	5	4	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	10	Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan (Persen)	100	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
14	Terseleenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan budidaya yang partisipatif	14	Jumlah layanan sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang sesuai standar (sampel)	3.350	3.350	3.450	3.550	3.650	5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya	11	Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji (Persen)	100	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
									6	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pakan dan Obat Ikan	12	Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR) (Persen)	100	Terobosan kebijakan di DJPB
											13	Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan (Persen)	100	Terobosan kebijakan di DJPB



No Urut SS	Sasaran Strategis (SS)	No. Urut IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	No Urut SS	Sasaran Strategis (SS)	No. IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2023	Keterangan	
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPAP Ujung Batee	15	Indeks profesionalisme ASN lingkup BPAP Ujung Batee (%)	72	73	74	75	76	7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di BPAP Ujung Batee	16	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPAP Ujung Batee (Indeks)	81	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
		16	Penyelesaian LHP BPK atas BPAP Ujung Batee (%)	100	100	100	100	100			20	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satter BPAP Ujung Batee (Persen)	100	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
		17	Nilai rekon pengelolaan kinerja BPAP Ujung Batee (%)	85	90	92	94	96			14	Nilai PM SAKIP BPAP Ujung Batee (Nilai)	75	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
		18	Rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPAP Ujung Batee yang dokumen tindak lanjutnya telah tuntas (%)	60	65	70	75	85			21	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimantakaan Untuk Perbaikan Kinerja BPAP Ujung Batee (Persen)	75	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
		19	Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	85	87	90							Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		20	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPAP Ujung Batee (%)	88	89	90	91	92			22	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPAP Ujung Batee (Nilai)	83,75	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
		21	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPAP Ujung Batee (%)	85	86	87	88	89			24	Nilai Kinerja Anggaran BPAP Ujung Batee (Nilai)	82	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
		22	Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa (%)		72,5	75	75	75			25	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPAP Ujung Batee (Persen)	77,5	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
		23	Tingkat pembelian barang milik negara (%)		72,5	75	75	75			23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPAP Ujung Batee (Persen)	77,5	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
											15	Persentase Pelaku Usaha Budidaya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	80	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
											17	Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	3	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
											18	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
											19	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif Terhadap Total Pemberitaan Tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Wilayah Kerja BPAP Ujung Batee (Persen)	86	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
											26	Nilai Pengawasan Kearsipan BPAP Ujung Batee (Nilai)	75	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
											26	Persentase Layanan Perkantoran BPAP Ujung Batee (Persen)	75	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja BPBAP Ujung Batee tahun 2023 dituangkan dalam perjanjian kinerja (sebagai mana terlampir). Kemudian dilakukan revisi penyempurnaan nomenklatur sasaran kegiatan maupun indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja mengalami perubahan pada bulan September 2023 dikarenakan adanya penyesuaian implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada bulan November 2023 Perjanjian Kinerja mengalami perubahan lagi berupa perubahan nomenklatur indikator dan target, adanya evaluasi pengelolaan kinerja. Berikut merupakan indikator kinerja hasil perubahan terakhir.

Tabel 3. Penetapan Kinerja Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat di BPBAP Ujung Batee	1.	Nilai PNBPN yang Diperoleh (Rupiah)	1.632.830.000
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pakan Ikan untuk Pembudidaya Ikan	2.	Persentase Pakan Mandiri yang Diproduksi (Persen)	80
3.	Meningkatnya Kawasan Perikanan Budi Daya yang Direvitalisasi	3.	Kluster Tambak Udang dan Bandeng yang Siap Operasional (Kluster)	2
4.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	4.	Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi (Persen)	100
		5.	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan (Persen)	75
		6.	Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan (Persen)	75
		7.	Sarana Produksi dan Usaha Komoditas Ikan Lokal yang Disalurkan (Paket)	1
		8.	Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang Disalurkan (Persen)	100
		9.	Persentase Bantuan Sarana Kawasan Budi Daya yang Disalurkan (Persen)	100
		10.	Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan (Persen)	100
5.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya	11.	Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji (Persen)	100
		12.	Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR) (Persen)	100
6.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pakan dan Obat Ikan	13.	Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan (Persen)	100



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
7.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPBAP Ujung Batee	14. Nilai PM SAKIP BPBAP Ujung Batee (Nilai)	75
		15. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	80
		16. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBAP Ujung Batee (Indeks)	81
		17. Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	3
		18. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76
		19. Persentase Pemberitaan Netral dan Positif Terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee (Persen)	86
		20. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBAP Ujung Batee (Persen)	100
		21. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBAP Ujung Batee (Persen)	75
		22. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBAP Ujung Batee (Nilai)	93,75
		23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBAP Ujung Batee (Persen)	77,5
		24. Nilai Kinerja Anggaran BPBAP Ujung Batee (Nilai)	82
		25. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)	77,5
		26. Nilai Pengawasan Kearsipan BPBAP Ujung Batee (Nilai)	75
27. Persentase Layanan Perkantoran BPBAP Ujung Batee (Persen)	75		

Matriks perubahan indikator kinerja 2023 semula dengan indikator kinerja 2023 akhir dapat dilihat lebih detail pada Lampiran 2.



PERJANJIAN KINERJA AWAL				PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN I				PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN II			
NO SS	SASARAN KEGIATAN (SS)	INDIKATOR KINERJA (IK)	TARGET	NO SS	SASARAN KEGIATAN (SS)	INDIKATOR KINERJA (IK)	TARGET	NO SS	SASARAN KEGIATAN (SS)	INDIKATOR KINERJA (IK)	TARGET
1	Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat di BPAP Ujung Batee	Nilai PNBP sakter BPAP Ujung Batee (Ribuan Rupiah)	1.632.830	1	Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat di BPAP Ujung Batee	Nilai PNBP yang diperoleh (Ribuan Rupiah)	1.632.830	1	Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat di BPAP Ujung Batee	Nilai PNBP yang diperoleh (Ribuan Rupiah)	1.632.830
3	Meningkatnya sarana dan prasarana pakan ikan untuk pembudidayaan ikan	Persentase produksi pakan mandiri yang dibandingkan dengan bahan baku yang tersedia lingkup BPAP Ujung Batee (Persen)	80	2	Meningkatnya sarana dan prasarana pakan ikan untuk pembudidayaan ikan	Persentase pakan mandiri yang diproduksi (Persen)	80	2	Meningkatnya sarana dan prasarana pakan ikan untuk pembudidayaan ikan	Persentase pakan mandiri yang diproduksi (Persen)	80
5	Meningkatnya kawasan perikanan budidaya yang direvitalisasi	Kluster tambak Udang dan Bandeng yang siap operasional di lingkup BPAP Ujung Batee (Kluster)	2	3	Meningkatnya kawasan perikanan budidaya yang direvitalisasi	Kluster tambak Udang dan Bandeng yang siap operasional (Kluster)	2	3	Meningkatnya kawasan perikanan budidaya yang direvitalisasi	Kluster tambak Udang dan Bandeng yang siap operasional (Kluster)	2
2	Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Produksi calon induk di lingkup BPAP Ujung Batee (Ekor)	52.600	4	Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase calon induk unggul yang diproduksi (Persen)	100	4	Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Persentase calon induk unggul yang diproduksi (Persen)	100
3	Persentase bantuan calon induk yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup BPAP Ujung Batee (Persen)	Persentase bantuan calon induk yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup BPAP Ujung Batee (Persen)	75	5	Persentase bantuan calon induk yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup BPAP Ujung Batee (Persen)	Persentase bantuan calon induk yang tersalurkan (Persen)	75	5	Persentase bantuan calon induk yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup BPAP Ujung Batee (Persen)	Persentase bantuan calon induk yang tersalurkan (Persen)	75
2	Persentase bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup BPAP Ujung Batee (Persen)	Persentase bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup BPAP Ujung Batee (Persen)	75	6	Persentase bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup BPAP Ujung Batee (Persen)	Persentase bantuan benih yang tersalurkan (Persen)	75	6	Persentase bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup BPAP Ujung Batee (Persen)	Persentase bantuan benih yang tersalurkan (Persen)	75
6	Tersalurkannya sarana produksi dan usaha komoditas ikan lokal ke masyarakat (Paket)	Tersalurkannya sarana produksi dan usaha komoditas ikan lokal ke masyarakat (Paket)	1	7	Tersalurkannya sarana produksi dan usaha komoditas ikan lokal ke masyarakat (Paket)	Sarana produksi dan usaha komoditas ikan lokal yang tersalurkan (Paket)	1	7	Tersalurkannya sarana produksi dan usaha komoditas ikan lokal ke masyarakat (Paket)	Sarana produksi dan usaha komoditas ikan lokal yang tersalurkan (Paket)	1
5	Tersalurkannya sarana dan prasarana Bioflok ke masyarakat lingkup BPAP Ujung Batee (Persen)	Tersalurkannya sarana dan prasarana Bioflok ke masyarakat lingkup BPAP Ujung Batee (Persen)	100	8	Tersalurkannya sarana dan prasarana Bioflok ke masyarakat lingkup BPAP Ujung Batee (Persen)	Persentase sarana dan prasarana bioflok yang tersalurkan (Persen)	100	8	Tersalurkannya sarana dan prasarana Bioflok ke masyarakat lingkup BPAP Ujung Batee (Persen)	Persentase sarana dan prasarana bioflok yang tersalurkan (Persen)	100
8	Persentase bantuan sarana kawasan budidaya yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat (Persen)	Persentase bantuan sarana kawasan budidaya yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat (Persen)	100	9	Persentase bantuan sarana kawasan budidaya yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat (Persen)	Persentase bantuan sarana kawasan budidaya yang tersalurkan (Persen)	100	9	Persentase bantuan sarana kawasan budidaya yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat (Persen)	Persentase bantuan sarana kawasan budidaya yang tersalurkan (Persen)	100
7	Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat (Persen)	Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat (Persen)	100	10	Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat (Persen)	Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan (Persen)	100	10	Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat (Persen)	Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan (Persen)	100
6	Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang kesehatan ikan	Persentase sampel layanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang diuji lingkup BPAP Ujung Batee (Persen)	100	5	Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya	Persentase kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji (Persen)	100	5	Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya	Persentase kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji (Persen)	100
13	Persentase pengujian sampel antimikrobal resistan (AMR) lingkup BPAP Ujung Batee (Persen)	Persentase pengujian sampel antimikrobal resistan (AMR) lingkup BPAP Ujung Batee (Persen)	100	12	Persentase pengujian sampel antimikrobal resistan (AMR) lingkup BPAP Ujung Batee (Persen)	Persentase pengujian antimikrobal resistan (AMR) (Persen)	100	12	Persentase pengujian sampel antimikrobal resistan (AMR) lingkup BPAP Ujung Batee (Persen)	Persentase pengujian antimikrobal resistan (AMR) (Persen)	100
4	Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang kesehatan	Persentase jumlah sampel pakan ikan yang diuji nutrisi pakan oleh BPAP Ujung Batee (Persen)	100	6	Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang kesehatan	Persentase pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan (Persen)	100	6	Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang kesehatan	Persentase pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan (Persen)	100



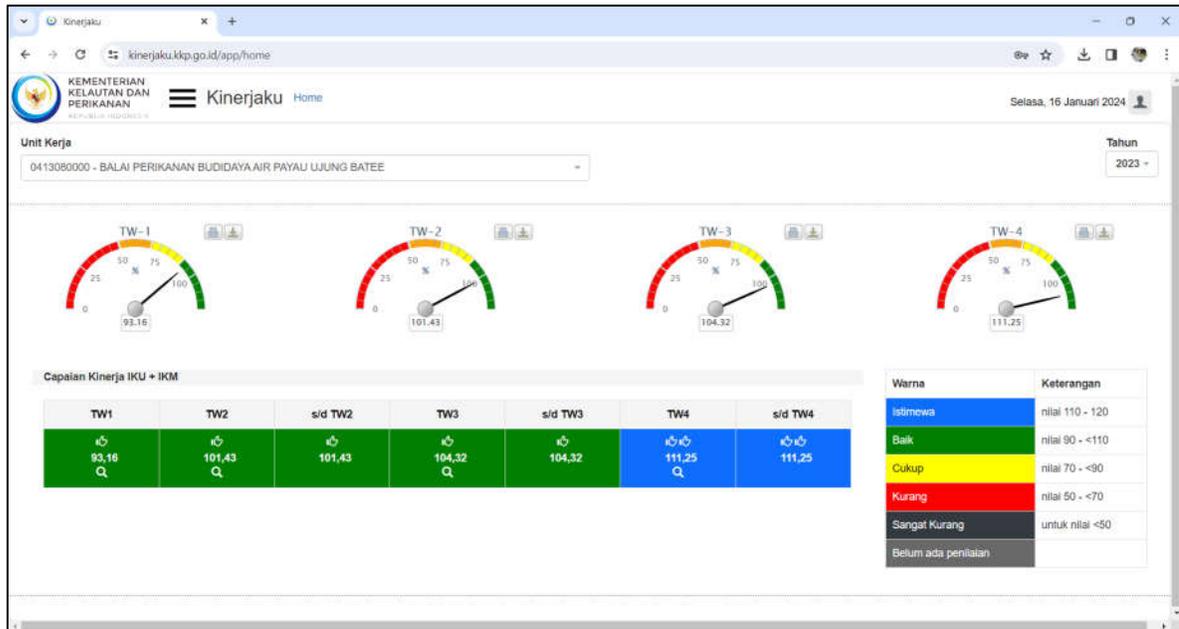
PERJANJIAN KINERJA AWAL				PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN I				PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN II			
NO SS	SASARAN KEGIATAN (SS)	INDIKATOR KINERJA (IK)	TARGET	NO SS	SASARAN KEGIATAN (SS)	INDIKATOR KINERJA (IK)	TARGET	NO IK	SASARAN KEGIATAN (SS)	INDIKATOR KINERJA (IK)	TARGET
7	Tata kelola pemerintahan yang baik di BPBAP Ujung Batee	16 Nilai rekonsiliasi SAKIP lingkup BPBAP Ujung Batee (Nilai)	93	7	Tata kelola pemerintahan yang baik di BPBAP Ujung Batee	14 Nilai rekonsiliasi kinerja BPBAP Ujung Batee (Nilai)	93	14	Nilai PM SAKIP BPBAP Ujung Batee (Nilai)		75
		23 Persentase jumlah pelaku usaha KP yang terintegrasi KUSUKA lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)	80			15 Persentase pelaku usaha budidaya lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)	80	15	Persentase pelaku usaha budidaya lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)		80
		14 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPBAP Ujung Batee (Indeks)	81			16 Indeks Profesionalitas ASN unit kerja lingkup BPBAP Ujung Batee (Indeks)	81	16	Indeks Profesionalitas ASN unit kerja lingkup BPBAP Ujung Batee (Indeks)		81
		24 Indeks pengelolaan kepegawaian lingkup BPBAP Ujung Batee (Indeks)	3			17 Indeks pengelolaan kepegawaian (Indeks)	3	17	Indeks pengelolaan kepegawaian (Indeks)		3
		18 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)	92								
		27 Hasil penilaian konsensus Zona Integritas lingkup BPBAP Ujung Batee (Nilai)	76			18 Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76	18	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)		76
		28 Persentase jumlah pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya wilker BPBAP Ujung Batee (Persen)	86			19 Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee (Persen)	86	19	Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee (Persen)		86
		15 Persentase Penyelesaian LHP BPK atas Saker BPBAP Ujung Batee (Persen)	100			20 Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Saker BPBAP Ujung Batee (Persen)	100	20	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Saker BPBAP Ujung Batee (Persen)		100
		17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)	75			21 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPBAP Ujung Batee (Persen)	75	21	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPBAP Ujung Batee (Persen)		75
		19 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran saker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	89			22 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBAP Ujung Batee (Nilai)	89	22	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBAP Ujung Batee (Nilai)		93,75
		22 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN saker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	77,5			23 Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Mik Negara (BMN) BPBAP Ujung Batee (Nilai)	77,5	23	Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Mik Negara (BMN) BPBAP Ujung Batee (Nilai)		77,5
		20 Nilai Kinerja Anggaran saker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	82			24 Nilai kinerja anggaran BPBAP Ujung Batee (Nilai)	82	24	Nilai kinerja anggaran BPBAP Ujung Batee (Nilai)		82
		21 Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa saker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	77,5			25 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPBAP Ujung Batee (Nilai)	77,5	25	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPBAP Ujung Batee (Nilai)		77,5
		26 Nilai pengawasan kearsipan lingkup BPBAP Ujung Batee (Nilai)	75			26 Nilai Pengawasan Kearsipan BPBAP Ujung Batee (Nilai)	75	26	Nilai Pengawasan Kearsipan BPBAP Ujung Batee (Nilai)		75
		25 Persentase layanan perkantoran lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)	75			27 Persentase layanan perkantoran BPBAP Ujung Batee (Persen)	75	27	Persentase Layanan Perkantoran BPBAP Ujung Batee (Persen)		75

2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja BPBAP Ujung Batee menggunakan pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Pengukuran kinerja berbasis *Balanced Scorecard* dilakukan dengan cara penghitungan capaian terhadap target dengan menggunakan polarisasi *Maximize*, *Minimize*, dan *Stabilize*. 1) *Maximize*, IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik; 2) *Minimize*, IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik; dan 3) *Stabilize*, IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *stabilize* yaitu IKU yang semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik. Pengukuran capaian Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik (triwulanan/semesteran/tahunan);
2. Pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas;
3. Pencapaian kinerja atasan merupakan akumulasi pencapaian kinerja bawahannya;
4. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh Tim Pengelola Kinerja lingkup BPBAP Ujung Batee) sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat; dan juga diukur melalui aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id>;
5. Status capaian Indikator Kinerja yang ada dalam aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id> ditunjukkan dengan warna: (i) merah (untuk indikator yang di bawah batas toleransi); (ii) kuning (untuk indikator dalam batas toleransi); dan (iii) hijau (untuk indikator yang telah/melebihi target).

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi indikator kinerja atau manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan implemementasi aplikasi BSC "Kinerjaku" yang merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi.



Gambar 5. Tangkapan layar aplikasi Kinerjaku

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id>, terlihat bahwa Nilai Capaian Kinerja BPBAP Ujung Batee sebesar 111,25 % yang berada dalam kategori ISTIMEWA. Artinya secara umum indikator kinerja sudah mencapai target.

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan budi daya pada Tahun 2023 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BPBAP Ujung Batee menitikberatkan pada 7 Sasaran Strategis dengan 27 indikator kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budi Daya dan hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj). Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi "kinerjaku.kkp.go.id" diperoleh Nilai Capaian Kinerja sebesar 111,25 %. Adapun rekapitulasi capaian kinerja BPBAP Ujung Batee pada Tahun 2023 seperti pada tabel berikut.

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja

	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Realisasi Terhadap Target (%)
1	Nilai PNBP yang diperoleh	1.632.830.000	Rupiah	1.805.159.659	110,55
2	Persentase pakan mandiri yang diproduksi	80,00	Persen	101,36	126,70
3	Kluster tambak Udang dan Bandeng yang siap operasional	2,00	Kluster	2,00	100,00
4	Persentase calon induk unggul yang diproduksi	100,00	Persen	103,71	103,71
5	Persentase bantuan calon induk yang disalurkan	75,00	Persen	105,16	140,22
6	Persentase bantuan benih yang disalurkan	75,00	Persen	106,69	142,25
7	Sarana produksi dan usaha komoditas ikan lokal yang disalurkan	1,00	Paket	1,00	100,00
8	Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan	100,00	Persen	106,06	106,06
9	Persentase bantuan sarana kawasan budi daya yang disalurkan	100,00	Persen	100,00	100,00
10	Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan	100,00	Persen	100,00	100,00
11	Persentase kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji	100,00	Persen	149,04	149,04
12	Persentase pengujian antimikrobal resistan (AMR)	100,00	Persen	109,80	109,80
13	Persentase pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan	100,00	Persen	124,39	124,39
14	Nilai PM SAKIP BPBAP Ujung Batee	75,00	Nilai	73,50	98,00
15	Persentase pelaku usaha budi daya ikan yang terintegrasi KUSUKA lingkup BPBAP Ujung Batee	80,00	Persen	81,36	101,70
16	Indeks Profesionalitas ASN unit kerja lingkup BPBAP Ujung Batee	81,00	Indeks	88,88	109,73
17	Indeks pengelolaan kepegawaian	3,00	Indeks	6,00	200,00
18	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	76,00	Nilai	79,47	104,57
19	Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee	86,00	Persen	100,00	116,28
20	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBAP Ujung Batee	100,00	Persen	100,00	100,00
21	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPBAP Ujung Batee	75,00	Persen	96,43	128,57
22	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBAP Ujung Batee	93,75	Nilai	87,62	93,46

	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Realisasi Terhadap Target (%)
23	Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPAP Ujung Batee	78,00	Nilai	78,10	100,77
24	Nilai kinerja anggaran BPAP Ujung Batee	82,00	Nilai	85,68	104,49
25	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPAP Ujung Batee	78,00	Nilai	82,35	106,26
26	Nilai Pengawasan Kearsipan BPAP Ujung Batee	75,00	Nilai	68,75	91,67
27	Persentase Layanan Perkantoran BPAP Ujung Batee	75,00	Persen	100,00	133,33

Capaian target indikator kinerja Tahun 2023 ada 3 indikator yang tidak tercapai yaitu indikator kinerja: Nilai PM SAKIP BPAP Ujung Batee (14), Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPAP Ujung Batee (22), Nilai Pengawasan Kearsipan BPAP Ujung Batee (26). Sementara target indikator kinerja yang mencapai dan melebihi target sebanyak 24 indikator. Secara umum indikator kinerja BPAP Ujung Batee telah tercapai. Begitu pun pada capaian kinerja secara keseluruhan terlihat capaian target mencapai 111,25 % (dapat dilihat pada Gambar 5).

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan indikator kinerja untuk setiap Perspektif sebagai berikut:

1. SS-1: Ekonomi sektor perikanan budi daya meningkat di BPAP Ujung Batee

IK-1: Nilai PNBP yang diperoleh

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Dasar hukum pemungutan PNBP pada BPAP Ujung yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang pedoman umum PNBP dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sumber PNBP BPAP Ujung Batee berasal dari:

- 1) Pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) yaitu PNBP yang berasal dari pungutan perikanan. Pungutan perikanan adalah pungutan negara atas hak perusahaan dan/atau pemanfaatan sumberdaya ikan yang harus dibayar kepada pemerintah oleh perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha perikanan atau oleh perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha budi daya Perikanan.
- 2) PNBP Non SDA yaitu PNBP yang berasal dari penjualan hasil usaha budi daya dan imbalan jasa UPT lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. PNBP ini terdiri dari: (i) Penjualan hasil Perikanan Budi daya; (ii) Imbal Jasa Teknologi; (iii) Jasa Desiminasi; (iv)

Jasa Penggunaan Laboratorium; (v) Jasa Penggunaan fasilitas; (vi) Jasa Fasilitas Lainnya; dan (vii) Jasa Kerjasama dengan Pihak Ketiga.

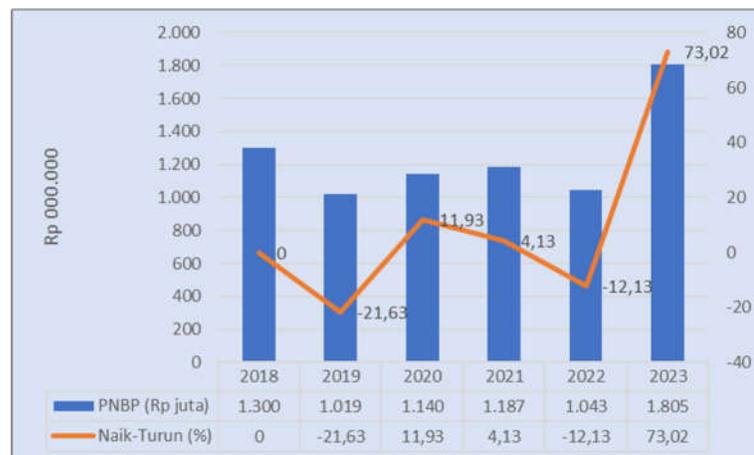
Tabel 5. Nilai PNBPN yang diperoleh

Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018 (Rp 000)	2019 (Rp 000)	2020 (Rp 000)	2021 (Rp 000)	2022 (Rp 000)	Target (Rp 000)	Realisasi (Rp 000)	%	Target 2024 (Rp 000)	% Capaian 2022 terhadap 2024
1.299.917	1.018.761	1.140.297	1.187.390	1.043.320	1.632.830	1.805.160	110,55	1.514.286	119,21

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Realisasi PNBPN pada tahun 2023 sudah melampaui target dengan capaian hingga 110,55 % dari target. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian PNBPN tahun 2023 menjadi yang tertinggi, sementara tahun 2022 mengalami penurunan, begitu juga terhadap dengan tahun 2019 juga mengalami penurunan. Realisasi PNBPN tahun 2023 juga melampaui target 2024 yaitu 119,21 % dari target sebesar Rp 1,5 Milyar

Penyebab turunnya PNBPN pada umumnya lebih disebabkan oleh sumber-sumber utama PNBPN mengalami pemblokiran anggaran berakhir realokasi, sedangkan target PNBPN tidak mengalami penyesuaian sehingga mempengaruhi perolehan PNBPN. Sumber utama PNBPN yang pertama yaitu calon induk induk yang diproduksi, dimana akhir dari produksi calon induk sebagai setoran PNBPN. Kedua pengujian dan pengendalian penyakit, di mana jasa-jasa pengujian sampel dari pihak eksternal sebagai setoran PNBPN. Selain itu produksi benih lebih mendahulukan untuk dihibahkan ke masyarakat setelah target hibah dicapainya barulah selanjutnya akan dijadikan setoran PNBPN.



Gambar 6. Perolehan PNBPN 2018-2023

Berdasarkan data dari tahun 2018-2023 bahwa realisasi PNBPN mengalami naik turun. Hal ini bisa terjadi karena PNBPN bergantung anggaran operasional kegiatan teknis dan anggaran operasional kegiatan teknis tersebut sebagai sumber utama PNBPN, di mana anggaran tersebut setiap tahunnya mengalami naik turun. terlihat realisasi PNBPN terendah pada tahun 2019 hanya sebesar 1,01 milyar rupiah dan tertinggi pada 2023 mencapai sebesar 1,8 milyar rupiah. Penurunan PNBPN tertinggi pada tahun 2019 mencapai 21,63 % sedangkan

peningkatan PNBП tertinggi pada tahun 2023 mencapai 73,02 %. Perolehan PNBП tahun 2023 menjadi *all time high* (ATH) selama periode pengamatan.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Berdasarkan surat dari Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya Nomor B.221/DJPB.1/KU.340/I/2024 tertanggal 10 Januari 2024 perihal Capaian Realisasi PNBП Lingkup DJPB Triwulan IV Tahun 2022, realisasi PNBП satker BPAP Ujung Batee dirincikan sebagai berikut.

Tabel 6. Sumber PNBП yang diperoleh

No	Jenis Pendapatan	Target Sesuai PK	Realisasi s/d Desember 2023	% Sesuai PK	Keterangan
1	Pendapatan Fungsional dan Umum	1.632.830.000	1.743.665.422	106,79	
2	Pendapatan Non Anggaran	-	1.494.237	-	
	Jumlah PNBП	1.632.830.000	1.805.159.659	110,55	Capaian IKU

Tahun 2023 terjadi perubahan kebijakan dimana PNBП yang ada indikator kinerja merupakan semua PNBП yang disetorkan BPAP Ujung Batee. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Dimana PNBП yang diakui sebagai capaian indikator kinerja hanya pendapatan fungsional dan umum tidak termasuk pendapatan non anggaran. Pendapatan non anggaran hanya sebesar Rp 1.494.237 tersebut bersumber dari penerimaan kembali belanja pegawai, penerimaan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah, dan penerimaan kembali belanja modal. Dari tabel terlihat dari pendapatan fungsional dan umum sebesar 1,7 milyar rupiah sudah dapat melampaui target 1,7 milyar rupiah atau tercapai 106,79 %.

Tabel 7. Perbandingan capaian PNBП antar satker

No	Satuan Kerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	BBPBAT Sukabumi	1.266.132.000	2.558.965.804	202,11
2	BBPBAP Jepara	4.240.598.000	4.703.436.382	110,91
3	BBPBL Lampung	1.325.270.000	1.533.409.558	115,71
4	BPBAP Ujung Batee	1.632.830.000	1.805.159.659	110,55
5	BPBAT Sungai Gelam	1.534.500.000	2.546.839.656	165,97
6	BPBL Batam	1.220.210.000	1.241.650.271	101,76
7	BPBAP Situbondo	3.375.974.000	6.040.665.462	178,93
8	BPBAT Mandiangin	1.150.000.000	1.293.808.440	112,51
9	BPBAT Tatelu	1.143.800.000	1.568.915.135	137,17
10	BPBAP Takalar	1.616.512.000	2.924.087.218	180,89
11	BPBL Lombok	762.305.000	690.190.937	90,54
12	BPBL Ambon	940.200.000	1.057.818.530	112,51
13	BPKIL Serang	550.000.000	1.532.172.329	278,58
14	BLUPPB Karawang	1.124.725.000	8.402.399.780	747,06
15	BPIU2K Karangasem	706.750.000	843.143.641	119,30

Capaian PNBП paling tinggi diraih oleh BLUPPB Karawang dengan capaian sebesar 747,06%, dan capaian PNBП terendah oleh BPBL Lombok dengan capaian hanya sebesar 90,54%.

Sedangkan BPAP Ujung Batee sendiri berada pada posisi ke-13 dari 15 satker yang ada dengan capaian PNBPN yaitu sebesar 110,55%.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Kendala yang terjadi pada triwulan III adalah benih diprioritaskan untuk kegiatan hibah sehingga perolehan PNBPN meningkat drastis di akhir-akhir tahun. Kendala tersebut sudah ditindaklanjuti dengan cara memaksimalkan produksi benih untuk meningkatkan target PNBPN.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Adapun kendala pencapaian target tahun 2023 yaitu pemblokiran anggaran yang berakhir realokasi BUN menjadi kendala pencapaian target PNBPN. Dengan pemblokiran dan realokasi proses produksi menjadi terganggu, capaian output kegiatan yang dapat dijadikan sumber PNBPN sulit dicapai karena sumber dana (anggaran) yang diblokir dan direalokasi.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Rencana tindak lanjut periode berikutnya yaitu 1) mengidentifikasi potensi-potensi penghambat pencapaian target PNBPN; 2) melakukan monitoring dan evaluasi lebih aktif secara periodik sehingga potensi penghambat dapat segera diambil keputusan.

2. SS-2: Meningkatkan sarana dan prasarana pakan ikan untuk pembudidaya ikan

IK-2: Persentase pakan mandiri yang diproduksi

Efektivitas adalah suatu kriteria yang digunakan untuk menilai hasil atau akibat dari implementasi suatu kebijakan publik berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan dalam dokumen kebijakan tersebut. Indeks efektivitas kebijakan pemerintah adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterbitkan oleh KKP dapat diterima oleh stakeholders bidang perikanan budi daya, mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan memberikan dampak positif terhadap kinerja perikanan budi daya sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut. Terkait dengan bidang perikanan budi daya, kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan meliputi bidang pakan dan obat ikan, perbenihan, produksi dan usaha budi daya dan kawasan kesehatan ikan dan lingkungan budi daya.

Produksi pakan mandiri BPAP Ujung Batee bertujuan untuk menyediakan pakan buatan untuk operasional budi daya lingkup BPAP Ujung Batee. Pakan buatan yang dihasilkan adalah pakan terapung untuk ikan air payau dan pakan tenggelam untuk ikan air payau.

Tabel 8. Persentase pakan mandiri yang diproduksi

Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018 (kg)	2019 (kg)	2020 (kg)	2021 (kg)	2022 (kg)	Target (kg)/(%)	Realisasi (kg)/(%)	%	Target 2024 (kg)	% Capaian 2022 terhadap 2024
66.370,00	84.410,00	85.800,00	27.086,00	45.800,00	49.920,00	50.600,00	101,36	37.000,00	136,76
-	-	-	-	-	80,00	101,36	126,70	-	-

* Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 indikator menggunakan satuan %.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Pakan ikan yang diproduksi hanya tercapai sebesar 50.600 kg atau 101,367 % dari target 49.920 kg. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, bahwa realisasi produksi pakan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 10 %. Realisasi ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena dalam Rencana Strategi 2020-2024 pakan ikan diproduksi untuk operasional belum diakomodir.



Gambar 7. Produksi pakan tahun 2018-2023

Pertumbuhan produksi pakan terlihat mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 68,43 %, hal ini disebabkan tingginya pemotongan anggaran produksi sehingga berimbas pada menurunnya volume produksi. Sedangkan pada tahun 2017 produksi pakan belum diakomodir dalam perjanjian kinerja.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Anggaran pakan yang diproduksi untuk operasional pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 638.976.000 dengan realisasi mencapai Rp 637.899.000 (99,83 %). Jika dibandingkan realisasi anggaran dengan realisasi volume produksi maka dapat dikatakan penggunaan anggaran cukup efisien, karena realisasi output melebihi 100 % sedangkan realisasi anggaran tidak mencapai 100 %.

Tabel 9. Produksi dan distribusi pakan

Bulan	Persediaan			Transfer Persediaan		Sisa Persediaan 2023
	Produksi 2022	Produksi 2023	Total Persedian	Penjualan	Afkir, Susut, Pemusnahan dan Internal	
Sisa Pakan 2022	28.000					
Januari			28.000		1.240	26.760
Februari			26.760		2.480	24.280
Maret		5.000	29.280		2.480	26.800
April		-	26.800		3.480	23.320
Mei		5.000	28.320		3.400	24.920
Juni		-	24.920		2.500	22.420
Juli		-	22.420		-	22.420
Agustus		6.000	28.420	6.920	-	21.500
September		9.600	31.100	6.000	-	25.100
Oktober		6.000	31.100	7.500	-	23.600
November		12.000	35.600	-	-	35.600
Desember		7.000	42.600	-	-	42.600
Jumlah	28.000	50.600	42.600	20.420	15.580	42.600

Awal tahun 2023 terlihat produksi pakan sangat rendah berbeda dengan di akhir tahun. Hal ini karena terdapat kegiatan uji coba mesin *extruder* serta sanitasi pada gudang dan mesin pakan sehingga pabrik pakan sementara sempat tidak produksi pada bulan tertentu.

Tabel 10. Perbandingan capaian produksi pakan mandiri

No	Satuan Kerja	Target (kg)	Realisasi (kg)	Capaian (%)
1	BBPBAT Sukabumi	104.770	104.800	100,03
2	BBPBAP Jepara	119.955	105.620	88,05
3	BBPBL Lampung	53.760	53.790	100,06
4	BPBAP Ujung Batee	49.920	50.600	101,36
5	BPBAT Sungai Gelam	233.865	226.950	97,04
6	BPBAP Situbondo	53.760	61.790	114,94
7	BPBAT Mandiangin	53.895	63.520	117,86
8	BPBAT Tatelu	65.162	61.209	93,93
9	BPBAP Takalar	24.210	37.850	156,34
10	BLUPPB Karawang	37.000	38.100	102,97

Capaian produksi pakan mandiri paling tinggi diperoleh oleh BPBAP Takalar yaitu mencapai 156,34%, dan capaian paling terendah diperoleh oleh BBPBAP Jepara yaitu hanya sebesar 88,05%. Sedangkan BPBAP Ujung Batee berada pada posisi ke-5 dari 10 satker yang menjadi perbandingan.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Pemanfaatan pakan yang diproduksi mandiri terutama untuk operasional internal balai karena masyarakat belum begitu berminat memanfaatkan pakan produksi balai. Kendala ini ditindaklanjuti dengan sosialisasi pakan mandiri yang diproduksi oleh balai ke pembudidaya perikanan.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Kegiatan uji coba produksi pakan terapung dengan mesin extruder serta sanitasi gudang pakan serta mesin pakan menjadi permasalahan di awal tahun untuk pencapaian indikator. Namun produksi pakan mandiri dapat terus berjalan sampai akhir tahun untuk memenuhi capaian target.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Melanjutkan operasional produksi pakan mandiri sesuai target yang ditentukan serta sosialisasi pakan mandiri ke masyarakat agar lebih mengenal pakan mandiri produksi balai.

3. SS-3: Meningkatnya kawasan perikanan budi daya yang direvitalisasi

IK-3: Kluster tambak Udang dan Bandeng yang siap operasional

Kluster tambak kawasan perikanan budi daya adalah model kawasan perikanan budi daya yang prinsipnya mengatur desain dan tata letak tambak yang terdiri dari petak pembesaran, petak tandon dan petak reservoir yang menggunakan benih dan sarana produksi berkualitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas tambak. Dengan model kluster ini produktivitas bisa ditingkatkan serta mengedepankan pengelolaan teknis yang lebih terintegrasi dan ramah lingkungan, disamping manajemen pengelolaan yang dilakukan secara kolektif.

Tabel 11. Kluster tambak Udang dan Bandeng yang siap operasional

Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018 (kluster)	2019 (kluster)	2020 (kluster)	2021 (kluster)	2022 (kluster)	Target (kluster)	Realisasi (kluster)	%	Target 2024 (kluster)	% Capaian 2022 terhadap 2024
-	-	1,00	2,00	-	2,00	2,00	100,00	Indikator belum diakomodir Renstra 2020-2024	-

* Indikator kinerja hanya ada pada tahun 2020, 2021, 2023.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Realisasi kawasan perikanan budi daya yang direvitalisasi berupa pembangunan kluster tambak udang dan bandeng yang siap operasional tercapai sebanyak dua lokasi atau 100 % dari target pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, bahwa realisasi kluster tambak yang siap operasional mengalami peningkatan yaitu penambahan lokasi kluster. Realisasi ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena dalam Rencana Strategi 2020-2024 kluster tambak yang siap operasional belum diakomodir.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Anggaran revitalisasi dan pembangunan kluster tambak udang dan bandeng siap operasional pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 6.250.000.000 dengan realisasi mencapai Rp 6.210.304.538 (99,36 %). Jika dibandingkan realisasi anggaran dengan realisasi output maka dapat dikatakan penggunaan anggaran cukup efisiensi, karena realisasi output sebesar 100 % sedangkan anggaran mencapai 99 %.

Kluster tambak udang siap operasional diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMD) Rakyat Mandiri Sejahtera yang berlokasi di Desa Paya Dua Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh. Pembangunan/revitalisasi kluster tambak udang menghabiskan waktu 6 bulan dimulai sejak Juni 2023, dan pada Desember dilakukan serah terima dengan BUMD Rakyat Mandiri Sejahtera berupa:

1. konstruksi tambak udang beserta kolam plastik
2. reservoir dan pemipaan
3. gudang pakan
4. ruang genset
5. rumah jaga
6. jembatan ancho
7. instalasi Listrik
8. pagar biosecurity dan gerbang
9. pakan dan obat-obatan
10. benih udang
11. peralatan dan mesin (genset, kincir, dan pompa)
12. perlengkapan pendukung operasional tambak

Sedangkan kluster tambak bandeng siap operasional diserahkan kepada 5 kelompok pembudidaya ikan bandeng yang berlokasi di Desa Alue Kuta Kecamatan Jangkata Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh.

Tabel 12. Barang/jasa kluster tambak bandeng yang diserahkan

Kelompok Penerima	Benih Ikan Bandeng (ekor)	Pakan Ikan (kg)	Pompa Meriam (unit)	Gerobak Sorong (unit)	Gudang Ikan Bandeng (unit)
Bina Jaya	7.400	1.628	1	1	1
Mina Mulia	15.800	3.476	1	1	
Mina Sejahtera	13.400	2.948	1	1	
Mina Bina	9.000	2.178	1	1	
Bina Insani	9.540	2.099	1	1	
Beumeuhase	12.600	2.772	1	1	

Benih dan pakan diserahkan berbeda-beda tiap kelompok karena kapasitas terpasang yang dimiliki masing-masing kelompok berbeda-beda, kemudian peralatan (pompa meriam dan gerobak sorong) masing-masing kelompok mendapatkan 1 unit, sedangkan gudang ikan hanya 1 unit untuk dipergunakan bersama oleh kelompok penerima.

Tabel 13. Perbandingan capaian kluster tambak siap operasional

No	Satuan Kerja	Target (kluster)	Realisasi (kluster)	Capaian (%)
1	BBPBAP Jepara	4	4	100,00
2	BPBAP Ujung Batee	2	2	100,00
3	BPBAP Situbondo	4	4	100,00
4	BPBAP Takalar	3	3	100,00
5	BLUPPB Karawang	2	2	100,00



Seluruh capaian kluster sebesar 100%. Target kluster yang paling banyak yaitu kluster dari BBPBAP Jepara dan BPBAP Situbondo sebesar 4 Kluster. Sedangkan pembentukan kluster paling kecil yaitu BPBAP Ujung Batee dan BLUPPB Karawang sebanyak 2 kluster.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Melanjutkan pembangunan kluster tambak udang dengan percepatan pembuatan konstruksi tambak serta sarana lain yaitu rumah jaga, reservoir dan gudang genset. Serta berkomunikasi dengan penyedia barang tentang ketepatan waktu pasokan bahan baku supaya tidak terjadi keterlambatan.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Pasokan bahan baku yang tidak tepat waktu serta cuaca hujan membuat pekerjaan terkendala dalam pelaksanaan konstruksi tambak dan pekerjaan lainnya.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Melihat kendala yang dialami pada kegiatan revitalisasi kawasan perikanan berupa kluster tambak udang dan bandeng yang siap operadional, rencana pada tahun berikutnya mengusulkan penambahan alat berat, tenaga kerja dalam proses pembangunan serta komunikasi dan koordinasi dengan penyedia barang agar pasokan bahan baku tersedia tepat waktu.

4. SS-4: Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan

IK-4: Persentase calon induk unggul yang diproduksi

Produksi induk unggul di BPBAP Ujung Batee bertujuan untuk menyediakan induk bagi unit perbenihan pada masyarakat stakeholder perikanan budi daya. Tersedianya induk unggul akan mendukung peningkatan produksi benih yang merupakan komponen utama kegiatan pengembangan kualitas dan kuantitas produksi perikanan budi daya.

Tabel 14. Persentase produksi calon induk unggul

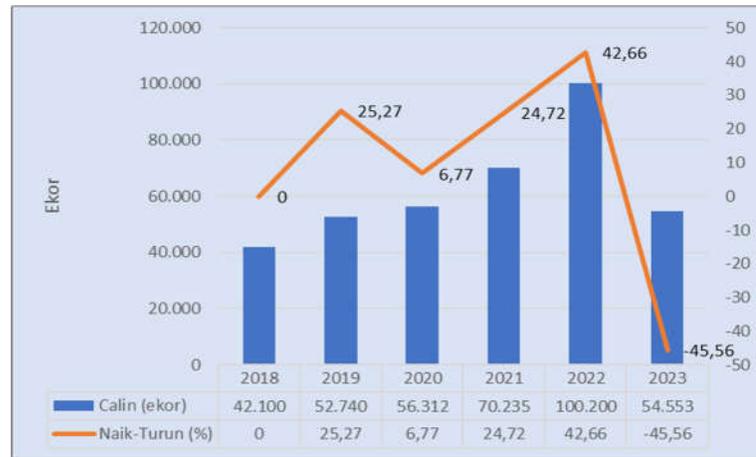
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018 (ekor)	2019 (ekor)	2020 (ekor)	2021 (ekor)	2022 (ekor)	Target (ekor)/(%)	Realisasi (ekor)/(%)	%	Target 2024 (ekor)	% Capaian 2022 terhadap 2024
42.100,00	52.740,00	56.312,00	70.235,00	100.200,00	52.600,00	54.553,00	103,71	70.000,00	77,93
-	-	-	-	-	100,00	103,71	103,71	-	-

* Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 indikator menggunakan satuan %.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Calon induk unggul yang diproduksi mampu mencapai sebanyak 54.553 ekor atau 103,71 % dari target 52.600 ekor. Jika dibandingkan dengan tahun pengamatan (2018-2023), bahwa realisasi tahun 2022 yang tertinggi mencapai 100.200 ekor sementara terendah tahun 2018

hanya 42.100 ekor. Perkembangan calon induk unggul yang diproduksi BPAP Ujung disajikan dalam grafik berikut.

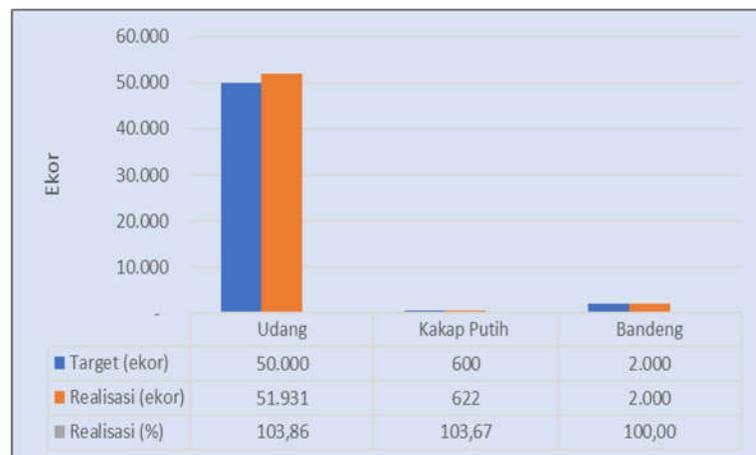


Gambar 8. Perkembangan produksi calon induk bermutu 2018-2023

Data *time series* 2018-2023 menunjukkan calon induk yang diproduksi mengalami peningkatan tiap tahunnya kecuali pada tahun 2023. Dimulai dari tahun 2018 hanya mampu mencapai 42.100 ekor, kemudian tahun 2019 sebanyak 52.740 ekor atau meningkat 25,27 % tahun 2020 sebanyak 56.312 ekor atau meningkat 6,77 % tahun 2021 sebanyak 70.235 ekor atau meningkat 24,72 %, dan puncaknya pada tahun 2022 mampu mencapai hingga 100.200 ekor atau meningkat 42,66 %. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan hingga 45,56 % atau terproduksi hanya 54.553 ekor saja.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Calon induk unggul yang diproduksi pada tahun 2023 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 2.587.614.000 dengan realisasi mencapai Rp 2.574.979.336 (99,51 %). Jika dibandingkan realisasi anggaran dengan realisasi produksi calon induk maka dapat dikatakan penggunaan anggaran cukup efisien, karena realisasi output mencapai 103 % tidak jauh berbeda dengan realisasi anggaran mencapai 99 %. Berikut disajikan komoditas yang diproduksi.



Gambar 9. Komoditas produksi calon induk bermutu

Grafik menunjukkan calon induk unggul yang diproduksi berdasarkan komoditas. Udang Vaname mampu merealisasikan sebanyak 51.931 ekor atau 103,86 % dari target 50.000 ekor. Realisasi produksi calon induk Kakap Putih sebanyak 622 ekor atau 103,67 % dari target 600 ekor dan calon induk Bandeng mencapai realisasi 100 % dari target 2.000 ekor.

Tabel 15. Perbandingan capaian produksi calon induk

No	Satuan Kerja	Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Capaian (%)
1	BBPBAT Sukabumi	194.000	200.263	103,23
2	BBPBAP Jepara	94.375	94.760	100,41
3	BBPBL Lampung	2.910	3.050	104,81
4	BPBAP Ujung Batee	52.600	54.553	103,71
5	BPBAT Sungai Gelam	101.775	117.318	115,27
6	BPBL Batam	1.400	1.840	131,43
7	BPBAP Situbondo	77.600	99.475	128,19
8	BPBAT Mandiangin	95.060	107.549	113,14
9	BPBAT Tatelu	67.900	78.848	116,12
10	BPBAP Takalar	77.000	104.670	135,94
11	BPBL Lombok	1.400	1.781	127,21
12	BPBL Ambon	1.438	2.234	155,35
13	BLUPPB Karawang	66.860	80.977	121,11
14	BPIU2K Karangasem	111.502	134.287	120,43

Capaian produksi calon induk paling besar yaitu BPBL Ambon dengan capaian 155,35%, dan capaian produksi calon induk paling kecil yaitu BBPBAP Jepara dengan capaian hanya 100,41%. Sedangkan BPBAP Ujung Batee berada di posisi ke-12 dari 14 (empat belas) satker dengan capaian 103,71%.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Telah dilakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan produksi calon induk. Perbaikan sarana dan prasarana produksi calon induk juga sudah dilakukan untuk meningkatkan produksi calon induk.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Keterbatasan fasilitas untuk pemeliharaan calon induk bandeng dan calon induk kakap putih sehingga mempengaruhi proses produksi calon induk.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Rencana aksi ke depan yaitu akan melakukan monitoring pelaksanaan produksi dan memaksimalkan fasilitas yang tersedia sehingga dapat meningkatkan produksi calon induk unggul.

IK-5: Persentase bantuan calon induk yang disalurkan

Persentase bantuan calon induk yang disalurkan merupakan kegiatan bantuan calon induk ikan yang disalurkan kepada kelompok pembudidaya ikan. Adapun komoditas-komoditas calon induk yang disalurkan ke masyarakat mengaju pada petunjuk teknis penyaluran

bantuan calon induk tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP. Capaian diukur berdasarkan persentase jumlah penyaluran bantuan calon induk ikan dibandingkan dengan jumlah target bantuan calon induk ikan sesuai anggaran yang disediakan.

Tabel 16. Persentase bantuan calon induk yang disalurkan

Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018 (ekor)	2019 (ekor)	2020 (ekor)	2021 (ekor)	2022 (ekor)	Target (ekor)/(%)	Realisasi (ekor)/(%)	%	Target 2024 (ekor)	% Capaian 2022 terhadap 2024
-	-	-	168,00	-	1.550,00	1.630,00	105,16	Indikator belum diakomodir Renstra 2020-2024	-
-	-	-	-	-	75,00	105,16	140,22	-	-

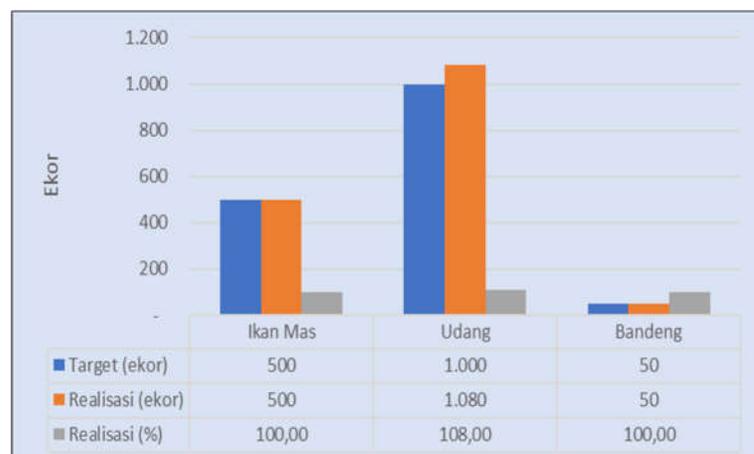
* Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 indikator menggunakan satuan %.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Bantuan calon induk yang disalurkan ke masyarakat mampu mencapai sebanyak 1.630 ekor atau 105,16 % dari target 1.550 ekor. Realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Realisasi ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena dalam Rencana Strategi 2020-2024 bantuan calon induk yang disalurkan belum diakomodir.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Anggaran bantuan calon induk yang disalurkan ke masyarakat pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 76.694.000 dengan realisasi mencapai sebesar Rp 74.960.500 (97,74 %). Jika dibandingkan realisasi anggaran dengan realisasi output maka dapat dikatakan penggunaan anggaran lumayan efisiensi, karena realisasi calon induk yang disalurkan ke masyarakat sebesar 105 % sedangkan realisasi anggaran mencapai 97 %. Berikut disajikan komoditas yang disalurkan ke masyarakat.



Gambar 10. Komoditas benih yang disalurkan

Grafik menunjukkan bantuan calon induk yang disalurkan ke masyarakat berdasarkan komoditas. Bantuan calon induk berupa komoditas Ikan Mas dan bandeng mampu

mencapai realisasi sebesar 100 % dari target yaitu masing-masing sebanyak 500 ekor untuk Ikan Mas dan 50 ekor untuk Bandeng. Sementara capaian bantuan calon induk tertinggi yaitu Udang Vaname realisasi mencapai 108 % atau sebanyak 1.080 ekor dari target 1.000 ekor.

Tabel 17. Perbandingan capaian bantuan calon induk disalurkan

No	Satuan Kerja	Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Capaian (%)
1	BBPBAT Sukabumi	13.565	15.405	113,56
2	BBPBAP Jepara	4.180	4.418	105,69
3	BBPBL Lampung	60	210	350,00
4	BPBAP Ujung Batee	1.550	1.630	105,16
5	BPBAT Sungai Gelam	12.000	13.385	111,54
6	BPBL Batam	15	15	100,00
7	BPBAP Situbondo	2.429	2.429	100,00
8	BPBAT Mandiangin	11.000	11.708	106,44
9	BPBAT Tatelu	10.000	12.890	128,90
10	BPBAP Takalar		5.370	137,32
11	BPBL Lombok	1.040	1.246	119,81
12	BPBL Ambon	40	60	150,00
13	BLUPPB Karawang	5.630	5.665	100,62
14	BPIU2K Karangasem	111.502	134.287	120,43

Capaian bantuan calon induk paling besar yaitu BBPBL Lampung sebesar 350,00%, dan bantuan capaian bantuan calon induk paling rendah yaitu BPBL Batam dan BPBAP Situbondo sebesar 100%. Sedangkan BPBAP Ujung Batee berada pada posisi ke-11 dari 14 satker dengan capaian sebesar 105,16%.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Permasalahan pada triwulan III penyaluran calon induk ke masyarakat yang belum mencapai target karena masih dalam proses untuk memproduksi calon induk yang sesuai dengan standar yang dipersyaratkan untuk bantuan. Permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melanjutkan proses produksi calon induk agar sesuai dengan standar.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Keterbatasan fasilitas untuk pemeliharaan calon induk bandeng dan calon induk kakap putih serta tidak adanya kelompok yang mengajukan proposal pengajuan calon induk bandeng.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Rencana aksi ke depan yaitu melakukan monitoring dan evaluasi proses produksi calon induk serta memaksimalkan fasilitas yang tersedia sehingga mampu meningkatkan produksi calon induk dan menghasilkan calon induk yang sesuai dengan standar persyaratan penyaluran ke masyarakat. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketersediaan calon induk.

IK-6: Persentase bantuan benih yang yang disalurkan

Guna pencapaian target kebutuhan bahan baku industri pengolahan dari sektor hulu terutama dari komoditas budi daya unggulan, maka sub sektor perbenihan memegang peranan sangat penting untuk menyediakan benih bermutu yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi, efisiensi dan efektivitas kegiatan budi daya.

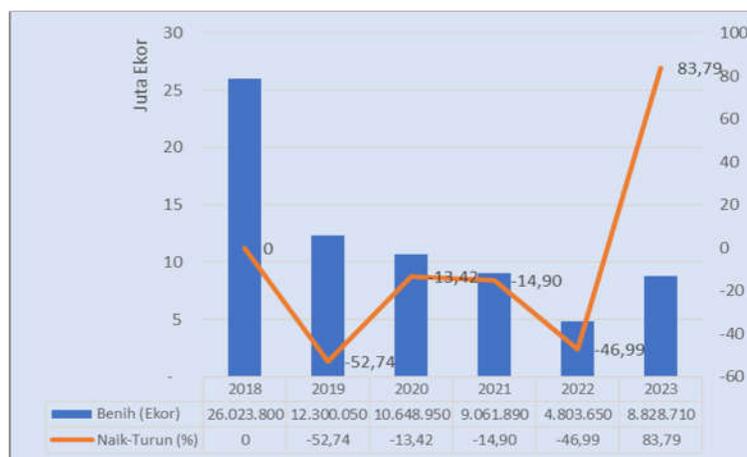
Tabel 18. Persentase bantuan benih yang disalurkan

Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018 (ekor)	2019 (ekor)	2020 (ekor)	2021 (ekor)	2022 (ekor)	Target (ekor)/(%)	Realisasi (ekor)/(%)	%	Target 2024 (ekor)	% Capaian 2022 terhadap 2024
26.023.800,00	12.300.050,00	10.648.950,00	9.061.890,00	4.803.650,00	8.275.400,00	8.828.710,00	106,69	11.110.000,00	79,47
-	-	-	-	-	75,00	106,69	142,25	-	-

* Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 indikator menggunakan satuan %

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Bantuan benih yang disalurkan ke masyarakat pada tahun 2023 mampu mencapai sebanyak 8.828.710 ekor atau 106,69 % dari target 8.275.400 ekor. Realisasi bantuan benih yang tersalurkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Capaian bantuan benih yang disalurkan ke masyarakat tahun 2023 sebesar 79,47 % jika dibandingkan dengan target 2024 yaitu 11.110.000 ekor.



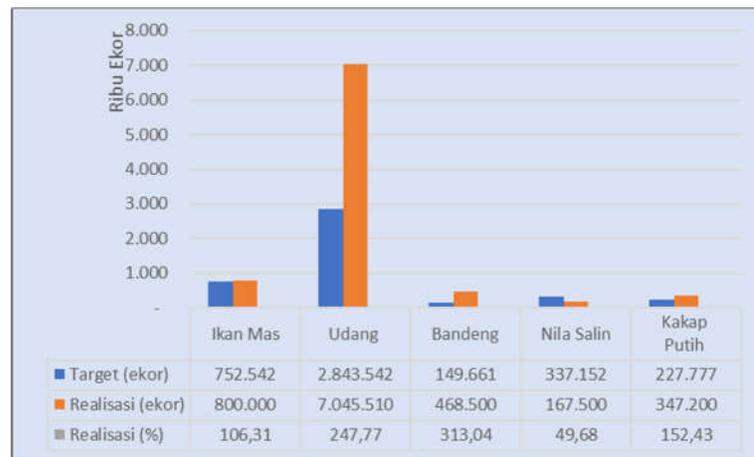
Gambar 11. Perkembangan benih yang disalurkan 2018-2023

Data *time series* menunjukkan bantuan benih yang disalurkan ke masyarakat mengalami tren menurun pada durasi tahun 2018-2022. Dimulai dari tahun 2018 mampu mencapai 26 juta ekor, kemudian tahun 2019 menurun menjadi 12 juta ekor, tahun 2020 menurun lagi menjadi 10 juta ekor, selanjutnya tahun 2021 menurun menjadi 9 juta ekor serta tahun 2022 juga menurun menjadi 4 juta ekor. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2019 mencapai titik terendah -52,74 %. Penyaluran benih ke masyarakat pada tahun 2023 mengalami peningkatan hingga 83,79 %. Penurunan ini terjadi antar lain karena faktor kenaikan biaya produksi dan distribusi benih tidak sebanding dengan kenaikan pagu anggaran untuk produksi benih dan distribusi benih. Anggaran untuk produksi benih dan distribusi benih

tahun 2018-2019 hanya naik tipis (2018 sebesar Rp 3.289.784.000; 2019 sebesar Rp 3.057.800.000; dan 2020 sebesar Rp 3.411.680.000), sementara tahun 2021-2022 mengalami penurunan (tahun 2021 sebesar Rp 1.442.088.000; dan tahun 2022 hanya sebesar Rp 1.389.429.000). Adapun pagu anggaran untuk produksi benih dan distribusi benih pada tahun 2023 lebih tinggi dibanding tahun 2022 dengan besaran Rp 2.608.090.000.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Anggaran bantuan benih yang disalurkan ke masyarakat pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 1.842.273.000 dengan realisasi mencapai Rp 1.665.056.150 (90,38 %). Jika dibandingkan realisasi anggaran dengan realisasi benih yang disalurkan ke masyarakat maka dapat dikatakan penggunaan anggaran sangat efisien, karena realisasi output sebesar 106 % sedangkan realisasi anggaran hanya 90 %.



Gambar 12. Komoditas benih yang disalurkan

Bantuan benih yang disalurkan pada tahun 2023 berupa komoditas Ikan Mas, Bandeng, Kakap Putih, Nila Salin dan Udang. Capaian realisasi tertinggi yaitu Bandeng sebesar 313,04 % dan Nila Salin hanya mencapai realisasi sebesar 44,20 %. Ikan Mas, Udang dan Kakap Putih mampu mencapai target, masing-masing mampu merealisasikan sebesar 106,31 % untuk Ikan Mas; 247,77 % untuk Udang dan 152,43 % untuk Kakap Putih.

Tabel 19. Perbandingan capaian bantuan benih disalurkan

No	Satuan Kerja	Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Capaian (%)
1	BBPBAT Sukabumi	7.166.612	14.236.425	198,65
2	BBPBAP Jepara	22.227.321	22.510.776	101,28
3	BBPBL Lampung	641.122	719.500	112,22
4	BPBAP Ujung Batee	8.275.400	8.828.710	106,69
5	BPBAT Sungai Gelam	5.695.000	5.745.300	100,88
6	BPBL Batam	571.777	571.900	100,02
7	BPBAP Situbondo	12.223.684	13.757.480	112,55
8	BPBAT Mandiangin	3.866.315	4.416.400	163,18
9	BPBAT Tatelu	3.226.900	3.836.000	169,82
10	BPBAP Takalar		22.316.000	137,32
11	BPBL Lombok	863.422	1.002.236	116,08



No	Satuan Kerja	Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Capaian (%)
12	BPBL Ambon	542.698	642.000	118,30
13	BLUPPB Karawang	2.478.373	2.372.735	136,09
14	BPIU2K Karangasem	6.000	1.800	130,00

Capaian bantuan benih yang disalurkan tertinggi yaitu 198,65% oleh BBPBAT Sukabumi, dan capaian benih terendah yaitu BPBL Batam dengan capaian hanya sebesar 100,02%. Sedangkan BPBAP Ujung Batee berada pada posisi ke-11 dari 14 satker dengan nilai 106,69%.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Permasalahan pada triwulan III beberapa komoditas yang belum mencapai target. Permasalahan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan melanjutkan kegiatan proses produksi benih serta distribusi benih yang akan disalurkan ke masyarakat.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Terdapat beberapa komoditas yang belum mencapai target produksi sehingga belum dapat dilakukan pendistribusian benih di awal tahun, namun dengan melanjutkan proses produksi tetap dapat dilakukan pendistribusian benih pada tahun berjalan.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Rencana aksi ke depan yaitu melakukan monitoring dan evaluasi proses produksi benih serta memaksimalkan fasilitas yang tersedia sehingga mampu meningkatkan produksi benih dan menghasilkan benih yang sesuai dengan standar persyaratan penyaluran ke masyarakat. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai informasi ketersediaan benih ikan yang diproduksi.

IK-7: Sarana produksi dan usaha komoditas ikan lokal yang disalurkan

Sarana produksi dan usaha komoditas ikan lokal yang disalurkan merupakan kegiatan bantuan sarana produksi dan usaha ikan Jurung yang disalurkan kepada kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Aceh Tenggara. Ikan jurung termasuk komoditas ikan lokal di Kabupaten Aceh Tenggara. Penyaluran komoditas tersebut ke masyarakat mengacu pada petunjuk teknis penyaluran bantuan tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP. Capaian diukur berdasarkan jumlah paket bantuan sarana produksi dan usaha ikan Jurung.

Tabel 20. Sarana produksi dan usaha komoditas ikan lokal yang disalurkan

Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018 (paket)	2019 (paket)	2020 (paket)	2021 (paket)	2022 (paket)	Target (paket)	Realisasi (paket)	%	Target 2024 (paket)	% Capaian 2022 terhadap 2024
-	-	-	-	-	1,00	1,00	100,00	Indikator belum diakomodir Renstra 2020-2024	-

* Indikator kinerja belum diakomodir pada tahun sebelumnya

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Pada tahun 2023, sarana produksi dan usaha ikan Jurung yang disalurkan ke masyarakat sudah sepenuhnya selesai disalurkan ke masyarakat sesuai target sebanyak 1 paket. Capaian ini tidak dibandingkan dengan tahun 2024 karena belum diakomodir dalam Rencana Strategis 2020-2024. Begitu juga tahun 2017-2019 indikator ini belum diakomodir pada rencana strategis maupun perjanjian kinerja.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Anggaran sarana produksi dan usaha komoditas ikan lokal yang disalurkan ke masyarakat pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 300.000.000 dengan realisasi mencapai Rp 298.864.750 (99,62 %). Jika dibandingkan realisasi anggaran dengan realisasi volume produksi maka dapat dikatakan penggunaan anggaran cukup efisien, karena realisasi output melebihi 100 % sedangkan realisasi anggaran 99 %. Anggaran tersebut sudah termasuk belanja barang non operasional, biaya identifikasi, verifikasi, monitoring calon penerima sarana produksi bioflok, dan pengadaan sarana produksi bioflok itu sendiri.

Kelompok menerima satu paket sarana produksi dan usaha komoditas ikan lokal berupa barang yang terdiri dari benih ikan jurung, pakan, sarana (kolam fiber, pompa, dan perlengkapan budi daya lainnya), dan bangunan unit budi daya. Kelompok penerima Sarana produksi dan usaha komoditas ikan lokal yaitu Kelompok Gotong Royong yang berlokasi di Desa Natam Baru Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh.

Tabel 21. Perbandingan capaian sarana produksi dan usaha komoditas ikan lokal yang disalurkan

No	Satuan Kerja	Target (paket)	Realisasi (paket)	Capaian (%)
1	BPBAP Ujung Batee	1	1	100
2	BPBAT Sungai Gelam	1	1	100

Terdapat dua satuan kerja yang menyalurkan hasil produksi dan komoditas ikan lokal yaitu BPBAP Ujung Batee dan BPBAT Sungai Gelam. Dari ke dua satker ini masing-masing telah merealisasikan capaiannya sebesar 100%.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Tindak lanjut telah dilakukan yaitu identifikasi kendala yang mungkin terjadi, monitoring dan evaluasi kegiatan sehingga bantuan sarana produksi dan usaha komoditas ikan lokal sukses diserahkan kepada kelompok penerima.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Ikan lokal yang dimaksud adalah Ikan Jurung yang merupakan ikan familiar di masyarakat sekitar dari hasil tangkapan alam bukan budi daya. Dengan demikian ada sedikit kendala di masyarakat untuk menyakin bahwa Ikan Jurung dapat dibudidayakan.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Monitoring pemanfaatan bantuan sarana produksi dan usaha komoditas ikan lokal yang disalurkan ke masyarakat pembudidaya.

IK-8: Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan

BPBAP Ujung Batee selain penyedia benih bermutu, dilakukan pencontohan pengelolaan produksi dan usaha melalui sarana bioflok yang diserahkan kepada masyarakat sehingga produksi perikanan budi daya dapat meningkat sesuai yang diharapkan. Budi daya perikanan sistem bioflok merupakan kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang menggunakan metode pemanfaatan gumpalan-gumpalan kecil yang tersusun dari sekumpulan mikroorganisme hidup yang melayang-layang di air. Percontohan produksi dan usaha perikanan budi daya di masyarakat merupakan bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi budi daya ikan sistem bioflok. Percontohan produksi dan usaha perikanan budi daya di masyarakat berupa bantuan sarana prasarana produksi budi daya ikan sistem bioflok diperuntukan bagi komoditas ikan Lele dan capaian perhitungan IKU bersifat tahunan.

Tabel 22. Sarana produksi bioflok yang disalurkan ke masyarakat

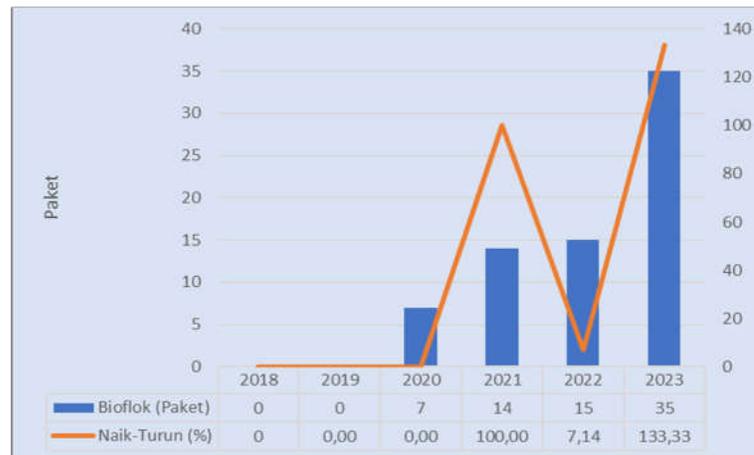
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018 (paket)	2019 (paket)	2020 (paket)	2021 (paket)	2022 (paket)	Target (paket)/(%)	Realisasi (paket)/(%)	%	Target 2024 (paket)	% Capaian 2022 terhadap 2024
-	-	7,00	14,00	15,00	33,00	35,00	106,06	15,00	233,33
-	-	-	-	-	100,00	106,06	106,06	-	-

* Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 indikator menggunakan satuan %.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Pada tahun 2023, sarana produksi bioflok yang disalurkan ke masyarakat sudah sepenuhnya selesai disalurkan ke masyarakat mencapai realisasi sebanyak 35 paket atau 106,06 % dari target 33 paket. Sarana produksi bioflok yang telah selesai diserahkan yaitu konstruksi fisik, peralatan, bahan operasional seperti benih, pakan, dan obat-obatan. Jumlah target sarana produksi bioflok pada tahun 2023 yang disalurkan ke masyarakat meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 15 paket.

Indikator ini jika dibandingkan dengan tahun 2024 telah melampaui target 2024, karena seiring waktu berjalan dari tahun ke tahun mengalami penyesuaian target setiap tahunnya pada tahun 2020-2024. Untuk tahun 2018-2019 indikator ini belum diakomodir pada rencana strategis maupun perjanjian kinerja.



Gambar 13. Perkembangan sarana produksi Bioflok yang disalurkan 2018-2023

Data time series menunjukkan sarana produksi bioflok yang disalurkan ke masyarakat mengalami kenaikan jumlah paket bantuan. Dimulai dari tahun 2020 mampu menyalurkan 7 paket sarana produksi bioflok, 14 paket pada tahun 2021, 15 paket pada tahun 2022 dan 35 paket pada tahun 2023. Terlihat penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2022 mencapai titik terendah 7,14 %. Penurunan ini terjadi karena sarana produksi bioflok yang disalurkan ke masyarakat jika dibandingkan dengan tahun 2021 hanya terdapat penambahan 1 paket pada tahun 2022. Adapun peningkatan nilai tertinggi terdapat pada tahun 2023 sebesar 133,33 % sarana produksi bioflok yang tersalurkan ke masyarakat.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Anggaran sarana produksi bioflok yang disalurkan ke masyarakat pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 6.829.000.000 dengan realisasi mencapai Rp 6.753.514.373 (98,89 %). Anggaran tersebut sudah termasuk belanja barang non operasional, biaya identifikasi, verifikasi, monitoring calon penerima sarana produksi bioflok, dan pengadaan sarana produksi bioflok itu sendiri. Jika dibandingkan realisasi anggaran dengan realisasi sarana produksi Bioflok yang disalurkan ke masyarakat maka dapat dikatakan penggunaan anggaran cukup efisien, karena realisasi output melebihi 106 % sedangkan realisasi anggaran hanya mencapai 98 %.

Setiap kelompok menerima satu paket sarana produksi sistem bioflok berupa barang yang terdiri dari benih ikan, pakan ikan, obat ikan dan vitamin, sarana (kolam terpal, intalasi listrik/air/airasi, lantai, tiang, dan atap pelindung), peralatan perikanan; dan pendampingan teknis bioflok.

Tabel 23. Kelompok penerima sarana produksi bioflok

No	Kelompok Penerima	Lokasi	Komoditas
1	Karang Taruna	Meunasah Kota, Jeunieb, Bireuen, Aceh	Lele
2	DMDH Farm	Paloh Gadeng, Dewantara, Aceh Utara, Aceh	Lele
3	Bina Bersama	Gp. Punti SB , Tanah Luas, Aceh Utara, Aceh	Lele
4	Sumber Rezeki	Krueng Lingka Barat, Baktiya, Aceh Utara, Aceh	Lele
5	Cahaya Asasul Islamiah	Leuge, Peureulak, Aceh Timur, Aceh	Nila
6	Beringin Maju	Kuta Lang Lang Bakhu, Babel, Aceh Tenggara, Aceh	Lele
7	Gunung Bahagia	Aunan Sepakat, Ketambe, Aceh Tenggara, Aceh	Lele
8	Ikhtiar Bersama	Air Pinang, Simeulue Timur, Simeulue, Aceh	Lele
9	Pasti Belayar	Blang Sebel, Teupah Selatan, Simeulue, Aceh	Nila
10	Damai Makmur	Sinabang, Simeulue Timur, Simeulue, Aceh	Nila
11	Gareng Jaya	Tomuan, Siantar Timur, Pematang Siantar, Sumatera Utara	Lele
12	Mahoni Jaya	Kahean, Siantar Utara, Pematang Siantar, Sumatera Utara	Lele
13	Berkah Rezeki Bersama	Teluk Lapian, Ujung Padang, Simalungun, Sumatera Utara	Nila
14	Rakyat Sejahtera	Tanah Rakyat, Pulo Bandring, Asahan, Sumatera Utara	Lele
15	Lae Lak Lak	Sidiangkat, Sidikalang, Dairi, Sumatera Utara	Nila
16	Metuah	Perapat Hilir, Babussalam, Aceh Tenggara, Aceh	Nila
17	Rumah Jahe	Pasir Nunggul, Lawe Alas, Aceh Tenggara, Aceh	Nila
18	Amanna	Rumah Kampung, Lawe Alas, Aceh Tenggara, Aceh	Lele
19	Lukup Penalam Gayo	Dsn. Dadalu, Lut Tawar, Aceh Tengah, Aceh	Nila
20	Jaya Bersama	Teupin Panah, Jeunieb, Bireuen, Aceh	Lele
21	GNM Jaya	Madat, Simpang Ulim, Aceh Timur, Aceh	Lele
22	Camar Putih	Birem Rayeuk, Birem Bayeun, Aceh Timur, Aceh	Lele
23	Paroy Indah	Paro, Lhong, Aceh Besar, Aceh	Lele
24	Tanalima	Kapias Pulau Buaya, Teluk Nibung, Tanjung Balai, Sumatera Utara	Nila
25	Silau Bestari	Kedai Ledang, Kisaran Timur, Asahan, Sumatera Utara	Lele
26	Karya Tani	Pematang Marihat, Siantar Marimbun, Pematang Siantar, Sumatera Utara	Lele
27	Lubuk Lele Besar	Lubuk Besar, Datuh Lima Puluh, Batubara, Sumatera Utara	Nila
28	Ikan Huta Bayu Raya	Raya Huluan, Dolog Masagal, Simalungun, Sumatera Utara	Lele
29	Paya Babaka Simalem	Pasar Baru, Juhar, Karo, Sumatera Utara	Nila
30	Kasindir Sejahtera Bersama	Kasindir, Jorlang Hataran, Simalungun, Sumatera Utara	Lele
31	Tawar	Rianiate, Pangunguran, Samosir, Sumatera Utara	Lele
32	Lamtire	Hatoguan, Palipi, Samosir, Sumatera Utara	Lele
33	Mandiri Parhorian	Paropo, Silahi Sabungan, Dairi, Sumatera Utara	Lele
34	Sulton Aulia	Desa Bunisari RT.04 RW.07, Warungkondang, Cianjur, Jawa Barat	Nila
35	Karya Berbudi	Cilendek Timur RT.03 RW.04, Bogor Barat, Bogor, Jawa Barat	Nila

Kelompok penerima sarana produksi bioflok untuk budi daya ikan nila dan lele dengan lokasi kelompok penerima tersebar pada beberapa daerah di provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Jawa Barat. Sebanyak 22 kelompok penerima bantuan bioflok lele dan bioflok nila sebanyak 13 kelompok. Lokasi kelompok penerima sarana produksi bioflok tersebar pada beberapa daerah di provinsi Aceh (Aceh Besar; Bireuen; Aceh Utara; Aceh Timur dan Aceh Tenggara), Sumatera Utara (Tanjung Balai; Asahan; Pematang Siantar; Batubara; Simalungun; Karo; Samosir dan Dairi) dan Jawa Barat (Cianjur dan Bogor).

Tabel 24. Perbandingan capaian sarana produksi bioflok yang disalurkan

No	Satuan Kerja	Target (paket)	Realisasi (paket)	Capaian (%)
1	BBPBAT Sukabumi	93	96	103,22
2	BBPBAP Jepara	61	63	103,28
3	BBPBL Lampung	60	65	108,33
4	BPBAP Ujung Batee	33	35	106,06
5	BPBAT Sungai Gelam	37	40	108,11
6	BPBL Batam	8	8	100,00
7	BPBAP Situbondo	63	64	101,59
8	BPBAT Mandiangin	65	65	100,00
9	BPBAT Tatelu	29	29	100,00
10	BPBAP Takalar	43	48	111,63
11	BPBL Lombok	75	75	100,00
12	BPBL Ambon	36	36	100,00
13	BLUPPB Karawang	34	37	100,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 13 satker yang memiliki capaian sarana produksi bioflok terbesar yaitu satker BPBAP Takalar dengan capaian 111,63%. Satker yang memiliki capaian terkecil yaitu BPBL Batam, BPBAT Mandiangin, BPBAT Tatelu, BPBL Lombok, BPBL Ambon, dan BLUPPB Karawang yaitu sebesar 100%. Sedangkan BPBAP Ujung Batee berada di posisi ke-4 dari 13 sakter dengan capaian 106,6%.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Tindak lanjut telah dilakukan yaitu identifikasi kendala yang mungkin terjadi, monitoring dan evaluasi kegiatan serta melanjutkan proses pembangunan sarana prasarana bioflok sehingga sukses diserahkan kepada kelompok penerima.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Perubahan petunjuk teknis bantuan sarana dan prasarana bioflok awal tahun menyebabkan pelaksanaan pengadaan sarana prasarana mengalami sedikit keterlambatan. Perubahan petunjuk teknis tersebut terkait dengan ekatalog sarana prasana bioflok yang komprehensif mulai dari benih ikan, pakan ikan, obat ikan dan vitamin, sarana (kolam terpal, instalasi listrik/air/airasi, lantai, tiang, dan atap pelindung), peralatan perikanan.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Rencana aksi ke depan akan dilakukan pendampingan lebih optimal secara *online* untuk memandu dan memastikan kelompok penerima melakukan kegiatan sesuai dengan SOP. Selanjutnya akan dilakukan pembagian wilayah binaan kepada anggota timja untuk mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi dengan penerima bantuan dan penyuluh pendamping serta monev berkala (*offline* maupun *online*) terhadap kelompok penerima bantuan sehingga dapat mengetahui perkembangan dan progress yang berkesinambungan terhadap bantuan yang telah diberikan.

IK-9: Persentase bantuan sarana kawasan budi daya yang disalurkan

Bantuan sarana kawasan budi daya yang disalurkan merupakan merupakan bantuan kincir yang disalurkan ke kelompok pembudidaya perikanan. Tujuan kegiatan ini untuk mendukung kegiatan usaha budi daya perikanan sehingga dapat meningkatkan produktifitas budi daya perikanan. Penyaluran kincir tersebut ke masyarakat mengacu pada petunjuk teknis penyaluran bantuan tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP. Capaian diukur berdasarkan persentase jumlah unit kincir yang telah disalurkan dibandingkan dengan target total unit kincir.

Tabel 25. Persentase bantuan sarana kawasan budi daya yang disalurkan

Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018 (unit)	2019 (unit)	2020 (unit)	2021 (unit)	2022 (unit)	Target (unit)/(%)	Realisasi (unit)/(%)	%	Target 2024 (unit)	% Capaian 2022 terhadap 2024
-	-	-	-	-	180,00	180,00	100,00	Indikator belum diakomodir Renstra 2020-2024	-
-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-

* Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 s.d 2022 indikator belum diakomodir.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Pada tahun 2023, bantuan sarana kawasan budi daya yang disalurkan ke masyarakat berupa unit kincir sudah sepenuhnya selesai disalurkan ke masyarakat sesuai target sebanyak 180 unit. Indikator ini tidak dibandingkan dengan tahun 2024 karena belum diakomodir dalam Rencana Strategis 2020-2024. Begitu juga tahun 2018-2022 indikator ini belum diakomodir pada rencana strategis maupun perjanjian kinerja.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Anggaran sarana kawasan budi daya yang disalurkan ke masyarakat pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 1.800.000.000 dengan realisasi mencapai Rp 1.799.946.066 (99,99 %). Anggaran tersebut sudah termasuk belanja barang non operasional, biaya identifikasi, verifikasi, monitoring calon penerima sarana kawasan budi daya, dan pengadaan sarana sarana kawasan budi daya itu sendiri. Setiap kelompok menerima satu paket kincir beserta kelengkapannya berupa kabel, kontaktor, MCB, dan pemasangan.

Tabel 26. Kelompok penerima sarana kawasan budi daya

No	Nama Kelompok	Tujuan Pengiriman	Jumlah (Unit)
1	Na Usaha III	Samuti Krueng, Gandapura, Bireuen, Aceh	10
2	Rekan Jaya	Matang Karieng, Seunuddon, Aceh Utara, Aceh	10
3	Usaha Rakan	Matang Jurong, Tanah Jambo Aye, Aceh Uatara, Aceh	10
4	Cipta Keurani	Uteun Bayi, Banda Sakti, Lhokseumawe, Aceh	10
5	Gaseh Poma	Bayeun, Rantau Selamat, Aceh Timur, Aceh	10
6	Bina Usaha	Pasie Kuala Ba'u, Kluet Utara, Aceh Selatan, Aceh	10
7	Maju Jaya	Pasie Kuala Asahan, Kluet Utara, Aceh Selatan, Aceh	10
8	Usaha Mandiri	Paloh Lada, Dewantara, Aceh Utara, Aceh	10
9	Anoe Rahabi	Matang Anoe, Seunuddon, Aceh Utara, Aceh	10

No	Nama Kelompok	Tujuan Pengiriman	Jumlah (Unit)
10	Pesisir Pantai UJP	Ujung Padang, Labuhan Haji Barat, Aceh Selatan, Aceh	10
11	Jaddam Vaname	Padang Beurahan, Bakongan, Aceh Selatan, Aceh	10
12	Serumpun Bagawik Bakulak	Sungai Ular, Secanggang, Langkat, Sumatera Utara	10
13	Pandan Baru Wangi	Koto Baru, Ranah Pesisir, Pesisir Selatan, Sumatera Barat	10
14	Plasma Pratama Mandiri	Bumi Pratama Mandiri, Sungai Menang, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan	10
15	Berkah Jaya I	Sido Asih, Ketapang, Lampung Selatan, Lampung	10
16	Bandar Baru Vaname	Bandar Negeri, Labuhan Maringgai, Lampung Timur, Lampung	10
17	Mina Citra Lestari I	Labuhan Batu, Pasir Sakti, Lampung Timur, Lampung	10
18	Mulia Bahari	Paya Lipah, Peureulak, Aceh Timur, Aceh	10

Sejumlah 18 kelompok penerima sarana kawasan budi daya masing-masing menerima 10 unit kincir dan lokasi kelompok penerima tersebar pada beberapa daerah di provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung.

Tabel 27. Perbandingan capaian bantuan sarana kawasan budi daya yang disalurkan

No	Satuan Kerja	Target (unit)	Realisasi (unit)	Capaian (%)
1	BBPBAP Jepara	150	150	100,00
2	BPBAP Ujung Batee	180	180	100,00
3	BPBAP Situbondo	120	120	100,00
4	BPBAP Takalar		97	116,87
5	BLUPPB Karawang	110	110	100,00

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian benih yang disalurkan paling besar yaitu satker BPBAP Takalar dengan capaian 116,87%. Satker lain memiliki capaian yang sama yaitu 100% termasuk BPBAP Ujung Batee.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Tindak lanjut telah dilakukan yaitu menyelesaikan proses identifikasi calon penerima dan melanjutkan proses pengadaan barang/jasa sehingga bantuan sarana kawasan budi daya berupa unit kincir sukses diserahkan kepada kelompok penerima.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Kendala pencapaian indikator adalah keterlambatan pengusulan proposal bantuan sarana kawasan budi daya dari kelompok sehingga belum dapat dilakukan verifikasi calon penerima proses pengadaan barang. Dibutuhkan waktu yang lebih lama dalam pendistribusian barang karena sebagian besar penyedia barang e-katalog LKPP berada di pulau Jawa yang memiliki jarak tempuh cukup jauh ke lokasi penerima bantuan sarana kawasan budi daya.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Koordinasi dan komunikasi dengan kelompok calon penerima bantuan untuk dapat mengusulkan proposal di awal tahun sehingga dapat segera ditindaklanjuti dengan verifikasi calon penerima serta distribusi sarana kawasan budi daya pada triwulan berikutnya. Hal ini

akan mempercepat capaian indikator terselesaikan serta kelompok penerima mendapat bantuan tepat waktu.

IK-10: Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan

Diseminasi teknologi pembesaran ikan merupakan suatu kegiatan interaktif dalam menyampaikan informasi teknologi budi daya perikanan pada lokasi yang telah ditentukan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku pembudidaya perikanan untuk mendapatkan meningkatkan produksi. Capaian dari kegiatan ini dihitung berdasarkan persentase jumlah diseminasi teknologi yang telah disampaikan ke masyarakat dibandingkan dengan jumlah target kegiatan diseminasi teknologi sesuai perencanaan.

Tabel 28. Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan

Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021 (Layanan)	2022	Target (Unit)/(%)	Realisasi (Unit)/(%)	%	Target 2024 (Layanan)	% Capaian 2022 terhadap 2024
-	-	-	2,00	-	1,00	1,00	100,00	5	20,00
-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-

* Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 s.d 2022 indikator belum diakomodir.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Pada tahun 2023, persentase jumlah diseminasi teknologi pembesaran ikan ke masyarakat sudah sepenuhnya selesai sesuai target sebanyak 100 %. Indikator capaian ini tidak dibandingkan dengan tahun 2024 karena belum diakomodir dalam Rencana Strategis 2020-2024. Begitu juga tahun 2018-2022 indikator ini belum diakomodir pada rencana strategis maupun perjanjian kinerja.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Anggaran diseminasi teknologi pembesaran ikan pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 300.000.000 dengan realisasi mencapai Rp 299.904.620 (99,97 %). Jika dibandingkan realisasi anggaran dengan realisasi diseminasi teknologi pembesaran ikan maka dapat dikatakan penggunaan anggaran cukup efisien, karena realisasi output sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran mencapai 99 %. Diseminasi teknologi pembesaran ikan yang dilakukan adalah penyampaian teknologi pembesaran ikan dengan sistem bioflok dan budi daya udang sistem kluster. Lokasi pelaksanaan diseminasi teknologi pembesaran ikan dilakukan di provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Tindak lanjut telah dilakukan yaitu identifikasi kendala yang mungkin terjadi, monitoring dan evaluasi kegiatan sehingga diseminasi teknologi pembesaran ikan dapat dilaksanakan dan informasi tersampaikan kepada kelompok penerima.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Kelompok penerima diseminasi teknologi pembesaran ikan merupakan pembudidaya pemula dalam penggunaan teknologi yang disampaikan.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Rencana tindak lanjut periode berikutnya yaitu diperlukan pendampingan bagi kelompok pembudidaya terkait kegiatan diseminasi teknologi yang telah dilakukan sehingga informasi yang telah diterima dapat memberikan pemahaman kepada kelompok pembudidaya untuk meningkatkan produksi budi daya.

5. SS-5: Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budi daya

IK-11: Persentase kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji

Sasaran strategis yang ke lima dari BPBAP Ujung Batee ini merupakan wujud kepedulian balai terhadap pembudidaya ikan wilayah kerja dalam menjaga dan memelihara Kesehatan ikan dan lingkungan budi daya ikan. BPBAP Ujung Batee telah menyediakan pelayanan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan yang terdiri dari pengujian kualitas air, mikrobiologi dan biologi molekuler, selain itu juga melayani pengujian patologi, nutrisi pakan dan *antimicrobial resistance*. Capaian kegiatan ini dihitung berdasarkan jumlah sampel (kualitas air, mikrobiologi, dan biologi molekuler) layanan kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji dibandingkan dengan target sampel layanan kesehatan ikan dan lingkungan. Sampel layanan kesehatan ikan berasal dari monitoring internal BPBAP Ujung Batee maupun dari stakeholder eksternal.

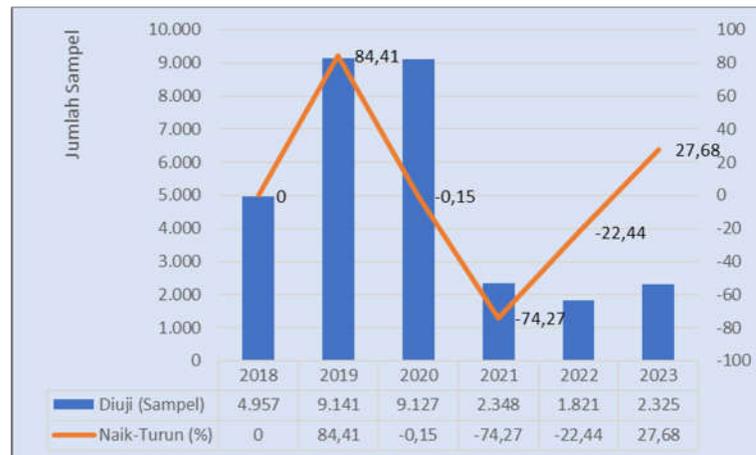
Tabel 29. Persentase kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji

Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018 (sampel)	2019 (sampel)	2020 (sampel)	2021 (sampel)	2022 (sampel)	Target (sampel)	Realisasi (sampel)	%	Target 2024 (sampel)	% Capaian 2022 terhadap 2024
4.957,00	9.141,00	9.127,00	2.348,00	1.821,00	1.560,00	2.325,00	149,04	3.350,00	69,40
-	-	-	-	-	100,00	149,04	149,04	-	-

* Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 indikator menggunakan satuan %.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Realisasi target pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan sudah melampaui sebesar 149,04% dari target 1.560 sampel. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, bahwa realisasi 2023 mengalami peningkatan dimana tahun 2022 mencapai 1.821 sampel dan 2.325 sampel pada tahun 2023. Peningkatan capaian tahun ini disebabkan oleh adanya penerimaan sampel yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi volume output.



Gambar 14. Pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan tahun 2018-2023

Data time series menunjukkan pengujian sampel laboratorium cukup tinggi pada tahun 2019 dan 2020 sedangkan tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena adanya pengurangan dan realokasi anggaran sehingga mempengaruhi volume output kegiatan pengujian sampel. Pada tahun 2023, pengujian sampel laboratorium meningkat dibandingkan tahun 2022 walaupun masih lebih rendah dari tahun 2018-2021.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Anggaran kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 503.070.000 dengan realisasi mencapai Rp 501.953.710 (99,78 %). Jika dibandingkan realisasi anggaran dengan realisasi pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan maka dapat dikatakan penggunaan anggaran sangat efisien, karena realisasi output mencapai 145 % sedangkan realisasi anggaran mencapai 99 %. Adapun capaian pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan sampai dengan tahun 2023 ini dapat terlihat pada data berikut:

Tabel 30. Pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan

Bulan	Kualitas Air (Kimia)	Mikrobiologi	Biologi Molekuler	Jumlah
Januari	113	31	25	169
Februari	118	40	53	211
Maret	108	60	22	190
April	11	53	2	66
Mei	41	14	19	74
Juni	47	19	55	121
Juli	165	70	17	252
Agustus	262	57	51	370
September	239	9	71	319
Oktober	320	0	32	352
November	162	3	19	184
Desember	4	0	13	17
Total	1.590	356	379	2.325

Dari sejumlah 2.325 pelayanan pengujian sampel didominasi oleh sampel kualitas air sebanyak 1.590 sampel untuk pengujian kualitas air secara kimia diikuti dengan sampel molekuler (379 sampel) dan mikrobiologi (356 sampel).

Tabel 31. Perbandingan capaian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji

No	Satuan Kerja	Target (sampel)	Realisasi (sampel)	Capaian (%)
1	BBPBAT Sukabumi	3.001	7.781	259,30
2	BBPBAP Jepara	3.330	4.770	143,24
3	BBPBL Lampung	1.673	3.041	181,77
4	BPBAP Ujung Batee	1.560	2.325	149,04
5	BPBAT Sungai Gelam	930	1.667	179,25
6	BPBL Batam	1.390	1.975	142,09
7	BPBAP Situbondo	2.852	6.162	216,06
8	BPBAT Mandiangin	1.297	1.892	145,88
9	BPBAT Tatelu	1.182	1.415	119,71
10	BPBAP Takalar	2.265	4.504	198,85
11	BPBL Lombok	1.391	2.878	206,90
12	BPBL Ambon	1.201	2.526	210,32
13	BLUPPB Karawang	1.936	3.897	201,29
14	BPIU2K Karangasem	1.310	1.763	134,58

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji capaian tertinggi diperoleh BBPBAT Sukabumi dengan capaian 259,30%, dan capaian terendah yaitu BPBAT Tatelu dengan capaian hanya sebesar 119,71%. Sedangkan BPBAP Ujung Batee berada pada posisi ke-9 dari 14 satker dengan capaian sebesar 149,04%.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Permasalahan pengujian sampel layanan Kesehatan ikan telah ditindaklanjuti dengan memaksimalkan proses pengujian setelah proses pengadaan bahan uji laboratorium selesai dilaksanakan.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia menjadi salah satu penghambat pencapaian indikator ini. Selain itu beberapa peralatan laboratorium mulai tidak optimal lagi untuk dimanfaatkan, bahkan ada alat yang membutuhkan perawatan dan penggantian periperal.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Permasalahan keterbatasan sumber daya manusia akan dilakukan pengusulan pengadaan sumber daya manusia baik CPNS maupun PPPK menjadi salah satu alternatif mengatasi keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu juga akan mengalokasi anggaran untuk perawatan dan penggantian periperal peralatan laboratorium.

IK-12: Persentase pengujian antimikrobal resistan (AMR)

Pengendalian dan pengujian AMR (*Anti Microbial Resistance*) merupakan upaya pengendalian lingkungan melalui pengujian AMR yang telah dilakukan oleh Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan. Indikator ini bertujuan untuk mengendalikan bahaya cemaran residu yang dapat resistance baik pada lingkungan maupun organisme akuatik agar tidak terjadi resistensi yang berasal dari residu kegiatan perikanan budi daya yang dilakukan di wilayah kerja. Resistensi dapat timbul secara spontan melalui proses mutasi, selain itu gen dapat diwariskan secara vertikal atau dapat diperoleh dari bakteri lain secara horizontal melalui unsur genetik seluler seperti plasmid. Cara menghitung capaian kegiatan pengujian sampel ini adalah dengan menghitung jumlah sampel yang telah dilakukan pemeriksaan atau pengujian AMR sesuai dengan laporan hasil uji.

Tabel 32. Persentase pengujian sampel antimikrobal resistan (AMR)

Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018 (sampel)	2019 (sampel)	2020 (sampel)	2021 (sampel)	2022 (sampel)	Target (sampel)	Realisasi (sampel)	%	Target 2024 (sampel)	% Capaian 2022 terhadap 2024
-	-	-	-	35,00	51,00	56,00	109,80	Indikator belum diakomodir Renstra 2020-2024	-
-	-	-	-	-	100,00	109,80	109,80	-	-

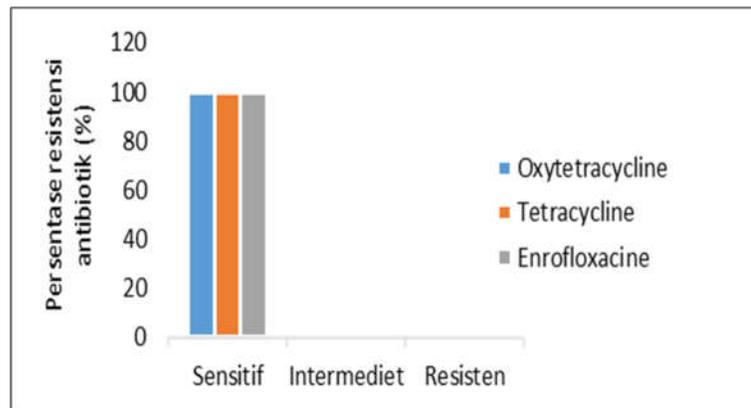
* Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 s.d 2022 indikator belum diakomodir, dan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 indikator menggunakan satuan %.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Pengendalian dan pengujian AMR tercapai sebesar 109,80 % dari target 51 sampel. Indikator ini merupakan terobosan pada tahun 2023 sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target tahun 2024. Jenis sampel yang menjadi target kegiatan surveilan AMR tahun 2023 oleh Laboratorium BPBAP Ujung Batee adalah komoditas udang. Jenis udang budi daya yang diperoleh dalam kegiatan surveilan ini adalah vannamei dan windu. Dari total jumlah sampel hasil surveilan, sebagian besar sampel komoditas yang diperoleh adalah udang vannamei pada sistem pembesaran dan pembenihan.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Anggaran pengujian sampel antimikrobal resistan (AMR) pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 44.393.000 dengan realisasi mencapai Rp 43.693.774 (98,42 %). Jika dibandingkan realisasi anggaran dengan realisasi pengujian sampel AMR maka dapat dikatakan penggunaan anggaran lumayan efisien, karena realisasi output mencapai 109 % sedangkan realisasi anggaran mencapai 98 %.



Gambar 15. Persentase resistensi antibiotik

Hasil kegiatan surveilan AMR yang dilakukan sebanyak 56 sampel dan ditemukan 12 isolat *Vibrio parahaemolyticus* dari beberapa daerah kabupaten/kota di provinsi Aceh. Keduabelas isolat yang teridentifikasi *vibrio* berasal dari udang budi daya pembesaran di tambak. Isolat *V. parahaemolyticus* yang ditemukan masih sensitif terhadap beberapa jenis antibiotik yang diuji berdasarkan daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri.

Tabel 33. Perbandingan capaian pengujian sampel antimikrobal resistan

No	Satuan Kerja	Target (sampel)	Realisasi (sampel)	Capaian (%)
1	BBPBAT Sukabumi	100	459	459,00
2	BBPBAP Jepara	100	120	120,00
3	BBPBL Lampung	86	94	109,30
4	BPBAP Ujung Batee	51	56	109,80
5	BPBAT Sungai Gelam	51	79	154,90
6	BPBL Batam	50	63	126,00
7	BPBAP Situbondo	80	82	102,50
8	BPBAT Mandiangin	51	72	141,18
9	BPBAT Tatelu	31	38	122,58
10	BPBAP Takalar	51	73	143,14
11	BPBL Lombok	51	52	101,96
12	BPBL Ambon	51	78	152,94
13	BLUPPB Karawang	80	94	117,50
14	BPIU2K Karangasem	51	57	111,76

Capaian pengujian sampel antimikrobal resistan terbesar yaitu 459,00% oleh BBPBAT Sukabumi, dan capaian terkecil diperoleh BPBL Lombok dengan capaian 101,96%. Sedangkan BPBAP Ujung Batee berada di posisi ke-11 dari 14 satker dengan capaian 109,80%.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Tindak lanjut telah dilakukan yaitu memonitoring dan berkoordinasi dengan pihak terkait serta segera melakukan perjalanan pengambilan sampel untuk surveilan AMR.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Musim penghujan merupakan salah satu permasalahan dalam pencapaian indikator pengendalian dan pengujian AMR dikarenakan Masyarakat pembudidaya enggan untuk melakukan penebaran benih.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Pengalokasian anggaran untuk perjalanan pengambilan sampel dan bahan pengujian tidak tergabung lagi dengan kegiatan-kegiatan lain. Keterbatasan sumber daya manusia akan dilakukan mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat atau kursus khusus bidang pengujian AMR. Selain itu pengusulan pengadaan sumber daya manusia baik CPNS maupun PPPK menjadi salah satu alternatif mengatasi keterbatasan sumber daya manusia.

6. SS-6: Meningkatnya kualitas pengendalian pakan dan obat ikan

IK-13: Persentase pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan

Pengujian nutrisi dan mutu pakan ikan merupakan kegiatan pengujian laboratorium nutrisi pakan meliputi salah satu atau keseluruhan (lengkap) dari parameter uji proksimat yang terdiri dari kadar protein, kadar lemak, kadar serat kasar, kadar abu dan kadar air. Capaian kegiatan ini dihitung berdasarkan perbandingan jumlah sampel pakan ikan yang telah diuji dibandingkan dengan target sampel pakan sesuai perencanaan.

Tabel 34. Persentase pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan

Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018 (sampel)	2019 (sampel)	2020 (sampel)	2021 (sampel)	2022 (sampel)	Target (sampel)	Realisasi (sampel)	%	Target 2024 (sampel)	% Capaian 2022 terhadap 2024
-	-	-	-	-	41,00	51,00	124,39	Indikator belum diakomodir Renstra 2020-2024	-
-	-	-	-	-	100,00	124,39	124,39	-	-

* Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 s.d 2022 indikator belum diakomodir, dan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 indikator menggunakan satuan %.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Realisasi pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan tercapai sebesar 124,39 % dari target 41 sampel. Indikator capaian ini tidak dibandingkan dengan tahun 2024 karena belum diakomodir dalam Rencana Strategis 2020-2024. Begitu juga tahun 2018-2022 indikator ini belum diakomodir pada rencana strategis maupun perjanjian kinerja.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Anggaran pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 20.600.000 dengan realisasi mencapai Rp 20.139.000 (97,76 %). Jika dibandingkan realisasi anggaran dengan realisasi pengujian nutrisi/mutu pakan maka dapat dikatakan penggunaan anggaran lumayan efisien, karena realisasi output mencapai 124 %

sedangkan realisasi anggaran mencapai 97 %. Adapun capaian pengujian pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan sampai dengan tahun 2023 ini dapat terlihat pada data berikut:

Tabel 35. Pengujian pakan berdasarkan jenis sampel dan parameter uji

Bulan	Jenis Sampel			Parameter Uji				
	Pakan Ikan	Pakan Udang	Bahan Baku	Kadar Air	Kadar Abu	Kadar Lemak	Kadar Serat	Kadar Protein
Januari	1	-	-	1	1	-	-	-
Februari	-	2	-	2	2	1	-	-
Maret	-	2	-	2	2	1	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	2	-	1	1	3	3	2	-
Juni	-	2	-	2	2	2	-	-
Juli	1	1	-	2	2	2	-	-
Agustus	2	1	-	3	3	2	-	-
September	3	21	6	28	27	24	-	-
Oktober	2	2	2	6	6	6	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	11	31	9	47	48	41	2	0
Total Sampel	51							

Hasil kegiatan pengujian pakan dan obat ikan untuk uji nutrisi dan mutu pakan, jenis sampel dari sejumlah 51 sampel pengujian didominasi oleh pakan udang sebanyak 31 sampel diikuti dengan pakan ikan (11 sampel) dan bahan baku (356 sampel). Parameter uji yang mendominasi adalah kadar abu kemudian diikuti dengan kadar air, kadar lemak, kadar serat dan tidak terdapat sampel untuk parameter kadar protein.

Tabel 36. Perbandingan capaian pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan

No	Satuan Kerja	Target (sampel)	Realisasi (sampel)	Capaian (%)
1	BBPBAT Sukabumi	450	835	185,60
2	BBPBAP Jepara	302	331	109,60
3	BBPBL Lampung	81	109	134,57
4	BPBAP Ujung Batee	41	51	124,39
5	BPBAT Sungai Gelam	41	57	139,02
6	BPBAP Situbondo	252	719	285,32
7	BPBAT Mandiangin	51	80	156,86
8	BPBAT Tatelu	51	67	131,37
9	BPBAP Takalar	51	74	145,10
10	BLUPPB Karawang	40	61	152,50

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian pakan ikan dan obat ikan yang di uji nutrisi dan mutu pakan dengan capaian terbesar 285,32% yaitu satker BPBAP Situbondo. Capaian terkecil yaitu Satker BBPBAP Jepara dengan nilai 109,60%. BPBAP Ujung Batee berada pada posisi 9 (Sembilan) dari 10 (sepuluh) satket dengan capaian 124,39%.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Permasalahan pada periode sebelumnya dalam pencapaian output telah ditindaklanjuti dengan memaksimalkan anggaran pada kegiatan lain dan memanfaatkan sisa bahan pengujian tahun sebelumnya.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Kerusakan alat uji nutrisi dan mutu pakan sehingga tidak semua parameter uji dapat dilakukan. Selain itu juga tidak tersedia anggaran khusus perjalanan pengambilan sampel untuk pengujian nutrisi dan mutu pakan sehingga pencapaian indikator hanya sampling pasif yaitu menerima sampel yang masuk ke laboratorium untuk pemeriksaan uji nutrisi dan mutu pakan. Keterbatasan sumber daya manusia baik jumlah maupun kemampuan menjadi salah satu penghambat pencapaian indikator ini.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Mengalokasikan anggaran untuk perawatan dan penggantian periperiferal peralatan uji nutrisi dan mutu pakan. Peningkatan kemampuan pengujian analisis dengan mengikuti diklat atau kursus khusus bidang pengujian nutrisi dan mutu pakan serta pengusulan pengadaan sumber daya manusia baik CPNS maupun PPPK untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia.

7. SS-7: Tata kelola pemerintahan yang baik di BPBAP Ujung Batee

IK-14: Nilai PM SAKIP BPBAP Ujung Batee

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi padapencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Evaluasi AKIP untuk menilai sejauh mana implementasinya. Sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Itjen KKP melakukan evaluasi AKIP dengan mengacu pada aturan tersebut, yang dilaksanakan secara berjenjang.

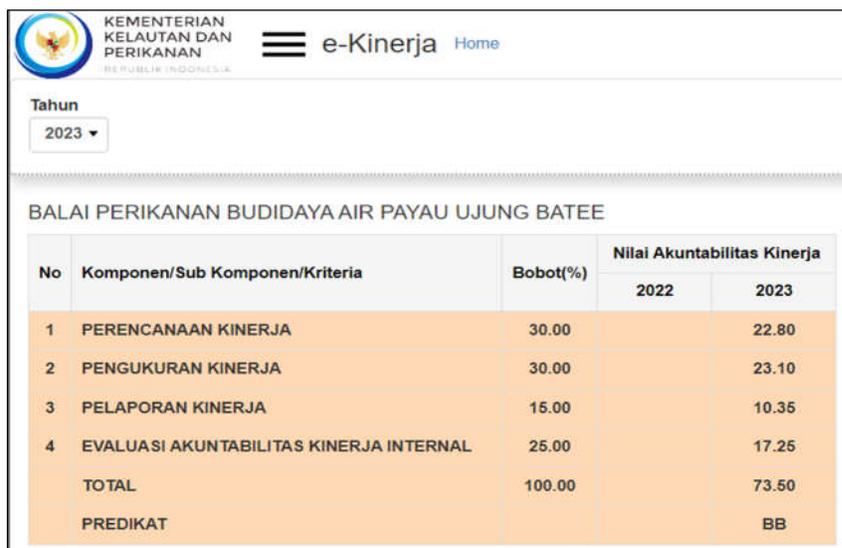
Tabel 37. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP

Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018 (Nilai)	2019 (Nilai)	2020 (Nilai)	2021 (Nilai)	2022 (Nilai)	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	%	Target 2024 (Nilai)	% Capaian 2022 terhadap 2024
-	-	73,58	94,27	97,94	75,00	73,50	98,00	85,00	86,47

* Pada Perjanjian Kinerja tahun-tahun sebelumnya masih menggunakan nilai rekonsialisasi pengelolaan kinerja.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Nilai penilaian mandiri (PM) SAKIP merupakan indikator kinerja dengan target 75 dan realisasi 73,25 atau hanya tercapai 98 %. Pada periode 2020-2022 setiap tahunnya terjadi peningkatan nilai dan melebihi target. Kegiatan ini pada tahun-tahun sebelumnya melihat dari nilai rekonsiliasi kinerja dengan penilaian pada 5 aspek yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja, sehingga sulit untuk dibandingkan dengan capaian pada periode tahun 2023 maupun target pada Rencana Strategis BPBAP Ujung Batee Tahun 2020-2024. Penilaian pada tahun 2023 ini pada portal <https://kinerjaku.kkp.go.id> dan inspektorat yang melakukan review dan penilaian atas dokumen-dokumen implementasi SAKIP pada periode tertentu.



No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot(%)	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00		22.80
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00		23.10
3	PELAPORAN KINERJA	15.00		10.35
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00		17.25
	TOTAL	100.00		73.50
	PREDIKAT			BB

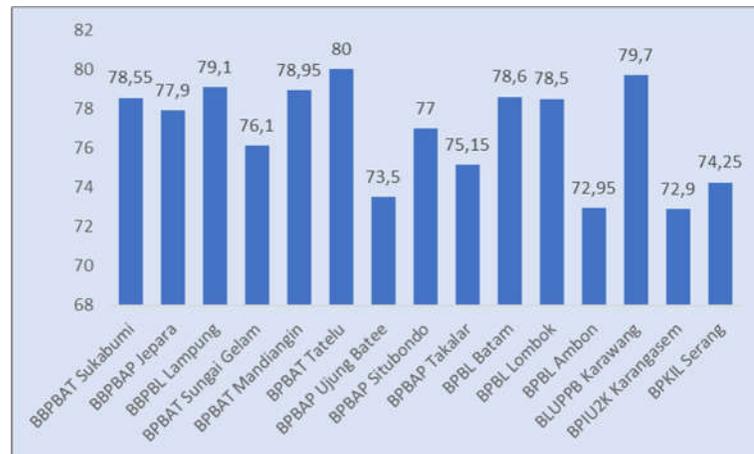
Gambar 16. Tangkapan layar LKE AKIP BPBAP Ujung Batee

Komponen "Pelaporan Kinerja" dan "Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal" kurang maksimal dalam mencapai nilai indikator. Kedua komponen tersebut hanya mencapai 69 % dari bobot nilai ($10,35/15 \times 100 = 69\%$ dan $17,25/25 \times 100 = 69\%$). Setelah ditelusuri lebih detail bahwa sub komponen "Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya" belum maksimal dilaksanakan hanya mendapat nilai 4,5 dari bobot 7,5 atau 60 %, begitu juga dengan sub komponen "Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja" belum maksimal dilaksanakan hanya mendapat nilai 7,5 dari bobot 12,5 atau 60 %.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Tidak terdapat anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator kinerja ini, karena hasil kinerja seluruh kegiatan akan mendukung aspek penilaian, jadi anggarannya melekat pada seluruh kegiatan yang menjadi aspek penilaian dan secara tidak langsung akan mempengaruhi capaian indikator.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Unit Pelaksana Teknis (UPT) lainnya lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya, mengacu pada surat Sekretaris Ditjen Perikanan Budi daya Nomor B.8163/DJPB.1/HP.440/XI/2023 tanggal 8 November 2023, hal Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 17. Nilai PM SAKIP unit pelaksana teknis Ditjen PB

Semua UPT memperoleh predikat BB (Sangat Baik: nilai > 70 – 80), dan telah di atas target yaitu 75. Nilai PM SAKIP tertinggi diperoleh BPBAT Tatelu mencapai 80 dan terendah BPIU2K Karangasem hanya sebesar 72,9, sedangkan BPBAP Ujung Batee dengan nilai 73,5 berada diposisi ke-13 dari 15 UPT. Dengan demikian seluruh UPT telah melaksanakan SAKIP dengan baik tidak ada UPT yang cukup atau kurang menerapkan SAKIP.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Sudah dilakukan identifikasi yang berpotensi besar menjadi penghambat nilai PM SAKIP tidak maksimal yaitu:

1. Pengukuran kinerja belum optimal dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
2. Pelaporan Kinerja belum optimal memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
3. Implementasi SAKIP belum optimal meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan harapan memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Kendala yang dialami adalah kurangnya personil tim kinerja yang aktif mendokumentasi dan melaporkan kegiatan dalam pencapaian kinerja, sehingga menyebabkan penyelesaian dokumen kinerja membutuhkan waktu yang lama. Selain itu kurangnya pemahaman personal tim kinerja tentang SAKIP menjadi penghambat dalam pelaporan kinerja.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Beberapa rencana aksi tahun 2023 yaitu 1) meningkatkan keaktifan personal tim kinerja dalam pemenuhan dokumen-dokumen kinerja; 2) pimpinan lebih berperan aktif memonitor, mengevaluasi, dan mengambil tindakan dalam pelaksanaan SAKIP; dan 3) meningkatkan pemahaman personal tim kinerja tentang SAKIP melalui diklat maupun pendampingan secara langsung dari eselon I.

IK-15: Persentase pelaku usaha budi daya ikan yang terintegrasi KUSUKA lingkup BPBAP Ujung Batee

Indikator kinerja persentase pelaku usaha budi daya ikan yang terintegrasi KUSUKA merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah terdaftar di database KUSUKA dengan status submit valid dan revisi. Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/updating data pelaku usaha budi daya ikan. Pendataan KUSUKA dihitung mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2023.

Tabel 38. Persentase pelaku usaha budi daya ikan yang terintegrasi KUSUKA

Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target 2024 (%)	% Capaian 2022 terhadap 2024
-	-	-	-	-	80,00	81,36	101,70	Indikator belum diakomodir Renstra 2020-2024	-

* Indikator mulai diakomodir tahun 2023.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Persentase pelaku usaha budi daya ikan yang terintegrasi KUSUKA lingkup BPBAP Ujung Batee telah tercapai dengan nilai sebesar 81,36 % atau 101,7 % dari target tahunan yang ditetapkan. Indikator kinerja ini mulai diakomodir di tahun anggaran 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, begitupun pada Rencana Strategis BPBAP Ujung Batee Tahun 2020-2024 indikator kinerja ini diakomodir.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Tidak adanya anggaran khusus yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan ini karena kegiatan ini bersifat administratif penginputan data pada aplikasi KUSUKA. Beberapa kegiatan seperti bantuan benih, calon induk, bioflok, dan kincir secara tidak langsung dapat mendukung pencapaian indikator kinerja ini.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Tindak lanjut atas rencana aksi pada periode sebelumnya ialah telah dilakukan penginputan data pelaku usaha pada aplikasi KUSUKA.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Kendala yang dialami dalam penginputan data pelaku usaha ini masih ada beberapa anggota/pokdakan yang belum memiliki kartu KUSUKA, hal ini menyebabkan capaian kegiatan ini belum optimal.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode pelaporan selanjutnya yaitu akan membantu dan memonitoring penginputan data pelaku usaha (KUSUKA) pada laman satu data KKP. Akan mengoptimalkan personil kerja dalam melakukan penginputan data pelaku usaha pada aplikasi KUSUKA.

IK-16: Indeks Profesionalitas ASN unit kerja lingkup BPAP Ujung Batee

Indikator kinerja IKU ini adalah adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Badan Kepegawaian No. 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Standar professional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu: 1) Kualifikasi, menggambarkan tingkat atau jenjang Pendidikan; 2) Kompetensi, menggambarkan kemampuan; 3) Kinerja, menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai; dan 4) Disiplin, menggambarkan kesanggupan untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pencapaian Indeks Profesionalitas dengan cara memberikan kesempatan ASN untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui: tugas belajar, izin belajar, pendidikan dan latihan, seminar/workshop/magang, dan sejenisnya. Selain itu didukung pula dengan pembinaan terhadap setiap PNS agar menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik. SDM yang berintegritas dan berkompotensi tinggi adalah SDM yang memiliki sikap (*attitude*) dan kapasitas (*skill*) yang memadai dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Tabel 39. Indeks profesionalitas ASN

Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018 (Indeks)	2019 (Indeks)	2020 (Indeks)	2021 (Indeks)	2022 (Indeks)	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	%	Target 2024 (Indeks)	% Capaian 2022 terhadap 2024
-	48,94	80,81	75,23	81,62	81,00	88,88	109,73	76,00	116,95

* Indikator tidak diakomodir tahun 2019.

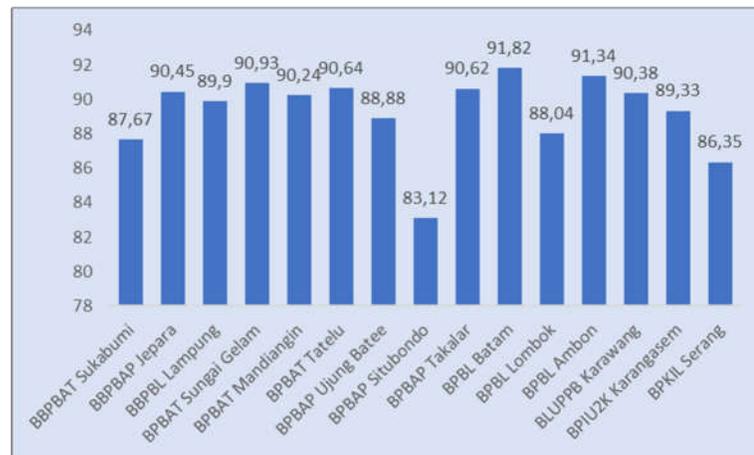
Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Capaian Indeks Profesionalitas ASN BPAP Ujung Batee tahun 2023 mampu mencapai 88,88 atau tercapai 109,73 % dari target 81. Dibandingkan dengan tahun 2019 s.d 2022 tahun 2023 merupakan capaian indeks tertinggi. Jika dibandingkan dengan target 2024 juga sudah melampaui target sebesar 116,95 %. Runtun waktu 2019 s.d 2023 terlihat IP-ASN BPAP Ujung Batee mengalami naik turun, kecuali 2018 belum adanya data capaian karena pada waktu itu ada indikator ini.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Pada rencana kerja anggaran tahun 2023, alokasi anggaran untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebesar Rp 44.803.000 dengan realisasi Rp 43.431.239 (96.94 %). Jika dibandingkan realisasi anggaran dengan realisasi indeks profesionalitas ASN maka dapat dikatakan penggunaan anggaran cukup efisien, karena realisasi output sebesar 109.73 % sedangkan realisasi anggaran hanya mencapai 96,94 %.

Indeks Profesionalitas ASN Unit Pelaksana Teknis (UPT) lainnya lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya, mengacu pada surat Sekretaris Ditjen Perikanan Budi daya Nomor B.217/DJPB.1/KP.720/I/2024 tanggal 10 Januari 2024, hal Capaian IKU IP-ASN Semester II Tahun 2023 Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 18. Indeks profesionalitas ASN unit pelaksana teknis

Indeks profesionalitas ASN predikat Sangat Tinggi (nilai 91-100) diperoleh BPBL Batam dan BPBL Ambon, sedangkan sisanya predikat Tinggi (nilai 81 – 90) diperoleh UPT lainnya. Indeks profesionalitas ASN tertinggi yaitu 91,82 oleh BPBL Batam, kemudian terendah yaitu 83,12 oleh BPBAP Situbondo, sedangkan BPBAP Ujung Batee dengan nilai 88,88 berada diposisi ke-11 dari 15 UPT. Dengan demikian seluruh UPT memiliki profesionalitas ASN yang tinggi, tidak ada UPT yang memiliki cukup atau kurang profesionalitas ASN.



Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Kendala pencapaian target indikator ini pada triwulan III yaitu masih minim pegawai mendapatkan Diklat 20 JP. Beberapa diklat 20 JP yang tersedia hanya dapat diikuti sebagian kecil pegawai. Kendala-kendala tersebut sudah ditindaklanjuti dengan membuat pendampingan dan workshop penyusunan dokumen WBK/WBBM. Selain itu pegawai juga didorong untuk mengikuti berbagai diklat secara online dan mandiri dari beberapa instansi yang menyediakan pelatihan, seperti melalui e-Milea dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kemenkeu Learning Center (KLC) dari Kementerian Keuangan.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Masih ada pimpinan yang belum Diklat PIM, sedangkan keikutsertaan pimpinan dalam Diklat PIM sangat terbatas. Kemudian masih ada beberapa pejabat fungsional tertentu yang belum mengikuti diklat fungsional, dan diklat fungsional itu sendiri tidak sepanjang waktu tersedia ditambahkan ketersediaan anggaran untuk mengikuti diklat fungsional. Selanjutnya untuk mencapai indeks profesionalitas ASN sebesar 80 harus semua pegawai memenuhi komponen Dimensi Kompetensi, terutama komponen Diklat 20 JP dan Seminar.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Rekomendasi atas rencana aksi ke depan yaitu 1) mengidentifikasi komponen-komponen pembentuk IP-ASN yang masih rendah di periode sebelumnya, 2) identifikasi kebutuhan diklat PIM dan diklat fungsional, dan segera menyampaikan usulan dan rencana diklat tersebut ke eselon I, serta secara berkala melakukan koordinasi dan komunikasi tentang diklat-diklat tersebut; 3) mengalokasikan anggaran yang optimal untuk pelaksanaan diklat.

IK-17: Indeks pengelolaan kepegawaian lingkup BPBAP Ujung Batee

Indeks pengelolaan kepegawaian adalah merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan SDM Aparatur yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam stantar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses pengelolaan SDM Aparatur mulai dari pengangkatan hingga pemberhentian bagi SDM Aparatur lingkup BPBAP Ujung Batee. Proses tersebut dibagi dalam 3 (tiga) rumpun, yaitu : (1) proses mutasi, yang terdiri dari proses pengangkatan CASN, pengangkatan CPNS menjadi PNS, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengangkatan pertama dalam jabatan, perpindahan jabatan, pencantuman gelar pendidikan, proses peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan pemberhentian; (2) proses ketatausahaan, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan atau sanksi, dan (3) informasi ASN, yang terdiri dari : rekapitulasi kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpah PNS, dan peremajaan data ASN. Hasil pengukuran merupakan rata-rata hasil capaian komponen penyusun indeks yang telah ditetapkan (rata-rata tersebut ditetapkan dengan mengkonversikan persentase rata-rata dengan nilai six sigma). Pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

Tabel 40. Indeks pengelolaan kepegawaian

Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018 (Indeks)	2019 (Indeks)	2020 (Indeks)	2021 (Indeks)	2022 (Indeks)	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	%	Target 2024 (Indeks)	% Capaian 2022 terhadap 2024
-	-	-	-	-	3,00	6,00	200,00	Indikator belum diakomodir Renstra 2020-2024	-

* Indikator mulai diakomodir tahun 2023.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Berdasarkan pada tabel diatas, terlihat bahwa kegiatan ini telah tercapai dengan nilai indeks sebesar 6 atau 200 % dari target tahunan yang ditetapkan. Indikator kinerja ini mulai diakomodir pada tahun 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, begitupun pada Rencana Strategis BPBAP Ujung Batee Tahun 2020-2024 indikator kinerja ini belum diakomodir.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Tidak terdapat anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator kinerja ini, karena hasil kinerja seluruh kegiatan akan mendukung aspek penilaian, jadi anggarannya melekat pada seluruh kegiatan yang menjadi aspek penilaian. Pengelolaan kepegawaian secara tidak langsung didukung anggaran perangkat pengolahan data dan komunikasi, layanan perkantoran, layanan manajemen SDM, yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja ini.

Indeks pengelolaan kepegawaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) lainnya lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya, mengacu pada surat Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya Nomor B.213/DJPB.1/KP.720/I/2024 tanggal 10 Januari 2024, hal Capaian IKU IP-ASN Semester II Tahun 2023 Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41. Indeks pengelolaan kepegawaian unit pelaksana teknis

Satker	Komponen Indeks			Jumlah	Predikat	Level
	Layanan Mutasi	Layanan Kesejahteraan	Informasi Kepegawaian			
BPBAT Sungai Gelam	40,00	30,00	30,00	100,00	Sangat Baik	6,00
BPBAP Ujung Batee	40,00	30,00	30,00	100,00	Sangat Baik	6,00
BPIU2K Karangasem	40,00	30,00	30,00	100,00	Sangat Baik	6,00
BPKIL Serang	40,00	30,00	30,00	100,00	Sangat Baik	6,00
BLUPPB Karawang	38,00	30,00	30,00	98,00	Sangat Baik	6,00
BPBAT Tatelu	35,00	30,00	30,00	95,00	Baik	5,00
BBPBAP Jepara	33,04	30,00	30,00	93,04	Baik	5,00
BPBAP Takalar	32,38	30,00	30,00	92,38	Baik	5,00
BBPBAT Sukabumi	30,00	30,00	30,00	90,00	Diatas Rata-Rata	5,00
BPBAT Mandiangin	30,00	30,00	30,00	90,00	Diatas Rata-Rata	5,00
BPBL Batam	29,33	30,00	30,00	89,33	Diatas Rata-Rata	4,00
BPBL Lombok	29,09	30,00	30,00	89,09	Diatas Rata-Rata	4,00
BPBL Ambon	26,67	30,00	30,00	86,67	Diatas Rata-Rata	4,00
BBPBL Lampung	23,33	30,00	30,00	83,33	Rata-rata	3,00
BPBAP Situbondo	23,33	30,00	30,00	83,33	Rata-rata	3,00



Indeks pengelolaan kepegawaian predikat Sangat Baik (nilai 100, level 6) diperoleh 5 UPT, kemudian predikat Baik (nilai 91 – 99, level 5) diperoleh 3 UPT, selanjutnya predikat Diatas Rata-rata (nilai 86-90, level 5 dan 4) sebanyak 5 UPT, dan sisanya preditkat Rata-rata (nilai < 86, level 3). BPBAP Ujung Batee dengan nilai indeks level 6 berada pada peringkat ke-2 dari 15 UPT. Dengan demikian seluruh UPT telah melaksanakan pengelolaan kepegawaian sesuai ekspektasi karena nilai indeks terendah pada level rata-rata sesuai target yaitu level indeks 3.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Tindak lanjut atas rencana aksi periode pelaporan sebelumnya ialah telah dilakukan kegiatan pengelolaan kepegawaian sesuai ketentuan yakni berupa pengelolaan absensi, perhitungan tunjangan kinerja, update data pegawai, proses kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji berkala.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Kendala yang dialami pada periode ini adalah tidak tersedianya pejabat fungsional pengelola kepegawaian di BPBAP Ujung Batee, sehingga kegiatan kepegawaian ini dirangkap oleh pejabat fungsional yang lain.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Rencana aksi ke depan yang dilakukan perlunya pengusulan keikutsertaan pegawai dalam diklat kepegawaian dan pengusulan penambahan pegawai jabatan fungsional kepegawaian. Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode pelaporan selanjutnya yaitu tetap melakukan kegiatan pengelolaan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.

IK-18: Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah suatu predikat yang diperoleh satker yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,25, dengan nilai sub komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal 15,75 (survei 3,60) Nilai Sub Komponen "kinerja lebih baik" minimal 2,50;
4. Memiliki nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal 14,00 (survei 3,20).

Predikat WBK merupakan status yang dapat disandang oleh unit kerja yang telah menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang transparan, bebas pungutan liar, dan mampu dipertanggungjawabkan secara berkala. Target unit kerja berpredikat WBK merupakan target yang diberikan kepada beberapa satuan kerja yang telah memiliki status

WBK untuk dipertahankan dalam siklus 2 tahunan atau kepada unit kerja yang dipersiapkan untuk menjadi unit kerja bersertifikat WBK. Target ini dapat dinyatakan berhasil saat predikat yang telah diperoleh mampu dipertahankan oleh unit kerja.

Tabel 42. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK

Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018 (Nilai)	2019 (Nilai)	2020 (Nilai)	2021 (Nilai)	2022 (Nilai)	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	%	Target 2024 (Nilai)	% Capaian 2022 terhadap 2024
-	-	-	-	-	76,00	79,47	104,57	Indikator belum diakomodir Renstra 2020-2024	-

* Indikator mulai diakomodir tahun 2023.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Hasil penilaian pembangunan zona integritas menuju WBK sebesar 79,47 atau tercapai 104,57 % dari target 76. Capaian ini belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena pembangunan zona integritas ini mulai tahun 2023 merupakan tahun pertama penilaian yang telah dicanangkan sejak tahun 2022. Begitupun pada Rencana Strategis BPBAP Ujung Batee Tahun 2020-2024 indikator kinerja ini belum diakomodir.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Tidak terdapat anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator kinerja ini, karena hasil kinerja seluruh kegiatan akan mendukung aspek penilaian, jadi anggarannya melekat pada seluruh kegiatan yang menjadi aspek penilaian. Kegiatan yang dilaksanakan pada pencapaian indikator ini diantaranya ialah area I manajemen perubahan; area II Penataan tata laksana; area III penataan sistem manajemen SDM; area IV penguatan akuntabilitas; area V penguatan pengawasan; dan area VI peningkatan kualitas pelayanan publik. Faktor pendorong internal keberhasilan indikator ini berupa tingginya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai BPBAP Ujung Batee untuk mewujudkan zona integritas WBK; kerja sama yang solid dalam tim WBK; kerja sama antara tim WBK dan seluruh komponen; dan tersedianya anggaran pendukung untuk WBK dalam RKA/K-L BPBAP Ujung Batee. Faktor pendorong eksternal keberhasilan IKU ini adanya pembinaan dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana KKP; adanya pembinaan dan pengawasan dari Inspektorat Jenderal KKP; dan adanya pembinaan dari Kementerian lain misalnya BKN dan KemenpanRB.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Tindak lanjut rencana aksi triwulan sebelumnya telah dilaksanakan dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi zona integritas pada area manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja ini perlunya peningkatan inovasi pelayanan publik di BPBAP Ujung Batee.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Rencana aksi untuk triwulan berikutnya; a) peningkatan peran serta seluruh pegawai dalam mempertahankan predikat WBK dan penilaian WBK tingkat Nasional; b) peningkatan sarana dan prasarana layanan publik; c) perlu terus dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penilaian WBK tingkat nasional dari TPN (tim Penilai Nasional MENPAN RB).

IK-19: Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee

Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee merupakan jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang perikanan budi daya merupakan jumlah pemberitaan yang netral dan positif tentang perikanan budi daya yang dimuat di berbagai media baik cetak maupun online. Kegiatan pendukung untuk mencapai indikator kinerja ini adalah pengumpulan dan pengolahan isu publik tentang pemberitaan dari media sosial yang mengunggah pemberitaan tentang KKP kemudian mengidentifikasi sifat pemberitaan (positif, negatif atau netral), serta membuat rekapitulasi.

Tabel 43. Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya wilayah kerja BPBAP Ujung Batee

Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target 2024	% Capaian 2022 terhadap 2024
-	-	-	-	-	100,00	116,28	116,28	Indikator belum diakomodir Renstra 2020-2024	-

* Indikator mulai diakomodir tahun 2023.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Terlihat pada tabel di atas bahwa sampai dengan akhir 2023 telah dilakukan perhitungan capaian dengan angka capaian 100 % atau 116,28 % dari target tahun 2023, hal ini menandakan bahwa selama kurun waktu tahun anggaran 2023 ini tidak ditemukan adanya pemberitaan yang bersifat negatif terkait BPBAP Ujung Batee tahun 2023. Indikator kinerja ini mulai diakomodir pada tahun 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, begitupun pada Rencana Strategis BPBAP Ujung Batee Tahun 2020-2024 indikator kinerja ini belum diakomodir.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk mencapai target indikator ini sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Sudah dilakukan tindak lanjut dengan memperbanyak pemberitaan positif pada tahun berikutnya sehingga target depan akan lebih baik lagi.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Rekapitulasi pemberitaan hanya mengandalkan mesin pencarian Google, di mana pencarian berita harus klik satu persatu hasil pencarian kata kunci. Cukup banyak berita yang isi sama persis tetapi dipublikasikan di media yang berbeda-beda. Ada potensi yang cukup tinggi, bahwa berita sub sektor perikanan budi daya di wilayah kerja BPAP Ujung Batee yang tidak diketahui.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Rencana aksi akan dilakukan pada periode yang akan datang adalah tetap melakukan kegiatan monitoring hasil pemberitaan baik internal maupun eksternal.

IK-20: Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPAP Ujung Batee

Persentase penyelesaian LHP BPK atas BPAP Ujung Batee merupakan persentase penyelesaian tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas BPAP Ujung Batee sebagai pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah ditindaklanjuti/diselesaikan oleh BPAP Ujung Batee. Kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Persentase penyelesaian LHP BPK atas BPAP Ujung Batee merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan 3 tahun 2020. Capaian indikator dihitung berdasarkan hasil dokumen tindak lanjut yang telah tuntas diselesaikan dan telah dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dibandingkan dengan jumlah temuan hasil pengawasan yang dilakukan.

Tabel 44. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target 2024 (%)	% Capaian 2022 terhadap 2024
-	-	97,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Tahun 2018 s.d 2019 indikator menggunakan nilai temuan.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Pada Tahun 2023, realisasi presentase penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas satker BPAP Ujung Batee adalah 100,00%. Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ada temuan maka dianggap tuntas semua penyelesaian semua temuan karena tidak ada temuan. Perlu

diketahui bahwa pemeriksaan oleh BPK tersebut untuk tahun anggaran 2022, sementara untuk tahun anggaran 2023 belum dilaksanakan pemeriksaan oleh BPK. Keberhasilan pencapaian ini dikarenakan sistem pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh BPBAP Ujung Batee sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun 2022, yaitu: 1) Memenuhi permintaan dokumen BPK; dan 2) Melakukan tindak lanjut penyelesaian atas LHP BPK.

Indikator ini mulai diakomodir pada perjanjian kinerja tahun 2020, sehingga belum dapat diperbandingkan untuk tahun 2018 dan 2019. Sejak tahun 2020, data *time series* menunjukkan bahwa adanya perbaikan tindak lanjut penyelesaian LHP BPK oleh BPBAP Ujung, hal ini dapat dilihat dari tahun 2020 tindak lanjut penyelesaian hanya 97,64 %, kemudian tahun 2021 s.d 2023 mampu tuntas ditindaklanjuti menjadi 100 %.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Tidak terdapat anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator kinerja ini, karena pelaksanaan anggaran seluruh kegiatan akan menjadi aspek pemeriksaan, jadi anggarannya melekat pada seluruh kegiatan yang menjadi aspek pemeriksaan.

Berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor B.142/DJPB.1/KU.130/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 perihal Capaian IKU Prosentase Penyelesaian LHP BPK-RI, bahwa unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya penyelesaian yaitu sebanyak 15 UPT telah menyelesaikan, menindaklanjuti, dan menuntaskan rekomendasi LHP BPK.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

BPBAP Ujung Batee telah mengidentifikasi yang mungkin menjadi temuan BPK. Kemudian memastikan semua kegiatan dari perencanaan sampai pembayaran sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Tidak mengalami permasalahan pada tahun 2023, namun memastikan semua kegiatan dari perencanaan sampai pembayaran sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan melakukan indentifikasi dan mitigasi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan oleh BPBAP Ujung Batee pada periode-periode selanjutnya adalah dengan mempertahankan komitmen untuk segera melakukan tindak lanjut atas penyelesaian LHP BPK dan meningkatkan komunikasi dengan Inspektorat Jenderal KKP dengan harapan memiliki persepsi yang sama atas LHP yang diberikan ke BPBAP Ujung Batee.

IK-21: Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPBAP Ujung Batee

Persentase pemenuhan rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPBAP Ujung Batee merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan 3 tahun 2020. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Tahun 2020 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BPBAP Takalar yang menjadi objek pengawasan. Capaian indikator dihitung berdasarkan hasil dokumen tindak lanjut yang telah tuntas diselesaikan dan telah dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dibandingkan dengan jumlah temuan hasil pengawasan yang dilakukan dalam satuan persen (%).

Tabel 45. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan

Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target 2024 (%)	% Capaian 2022 terhadap 2024
-	-	22,22	92,00	100,00	75,00	96,43	128,57	85,00	113,45

* Tahun 2018 s.d 2019 indikator belum diakomodir.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Capaian telah terealisasi 96,43 % atau 128,57 % dari target tahunan, capaian ini diperoleh dikarenakan sampai dengan periode akhir tahun anggaran 2023 ini saran rekomendasi Inspektorat Jenderal telah selesai ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja. Dari 28 rekomendasi hanya 1 rekomendasi yang belum tuntas diproses, sebenarnya telah disampaikan dokumentasi pemenuhan rekomendasi tetapi masih dalam proses verifikasi saja. Dibandingkan dengan target rencana jangka menengah yang tertuang pada Rencana Strategis BPBAP Ujung Batee Tahun 2020-2024 telah tercapai sebesar 113,45 %. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun anggaran sebelumnya (2021-2023) terlihat mengalami naik turun, periode 2021 s.d 2022 mengalami peningkatan sementara pada tahun 2023 tidak mencapai seratus persen.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Tidak terdapat anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator kinerja ini, karena pelaksanaan anggaran seluruh kegiatan akan menjadi aspek pengawasan, jadi anggarannya melekat pada seluruh kegiatan yang menjadi aspek pengawasan dan perbaikan kinerja.

Berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor B.6843/DJPB.1/HP.130/X/2022 tanggal 5 Oktober 2022 perihal Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup DJPB Triwulan III Tahun 2022, bahwa BPBAP Ujung Batee memiliki 9 rekomendasi

yang harus ditindaklanjuti. Sampai dengan September 2022 telah ditindaklanjuti semua rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal tersebut.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Upaya tindak lanjut permasalahan triwulan sebelum sudah dilakukan dengan memastikan semua kegiatan dari perencanaan sampai pembayaran sesuai ketentuan. Terus berusaha untuk segera menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan, berserta bukti-bukti dan dokumentasi pelaksanaan tindak lanjut.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Kendala dalam melaksanakan pencapaian indikator ini adalah pemahaman dan penerjemahan temuan dan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP, sehingga terkadang terjadi perbedaan persepsi antara auditor dengan penanggung jawab kegiatan lingkup BPBAP Ujung Batee.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan oleh BPBAP Ujung Batee pada periode-periode selanjutnya adalah dengan mempertahankan komitmen untuk segera melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan guna perbaikan kinerja dan meningkatkan komunikasi dengan Inspektorat Jenderal KKP dengan harapan memiliki persepsi yang sama atas temuan atau rekomendasi yang diberikan ke BPBAP Ujung Batee. Selain itu, dengan adanya aplikasi SIDAK KKP, memudahkan BPKIL Serang dalam memantau dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan tersebut.

IK-22: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBAP Ujung Batee

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Guna mengetahui kinerja suatu program maka perlu dilakukan pengukuran. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-KL. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah PMK 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L. Orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada besarnya penyerapan anggaran tetapi juga pencapaian output anggaran melalui: (1) Kelancaran pelaksanaan anggaran (pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM); (2) Mendukung manajemen kas (pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, renkas/RPD, deviasi halaman III DIPA, retur SP2D); dan (3) Meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKKL/LKPP), penyampaian LPJ Bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja.

Tabel 46. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018 (Nilai)	2019 (Nilai)	2020 (Nilai)	2021 (Nilai)	2022 (Nilai)	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	%	Target 2024 (Nilai)	% Capaian 2022 terhadap 2024
-	93,45	88,57	92,29	91,49	93,75	87,62	93,46	92,00	95,24

* Tahun 2018 indikator belum diakomodir.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada tahun 2023 ini sebesar 87,62 atau hanya tercapai 93,46 % dari target sebesar 93,75. Realisasi ini belum mampu mencapai target tahun 2024 hanya tercapai 95,24 % dari target 92. Pencapaian tahun ini turun dari tahun 2022. Penurunan ini disebabkan adanya beberapa komponen penilaian yang tidak optimal tercapai. Data time series nilai IKPA BPAP Ujung Batee mengalami fluktuasi, di mana capaian IKPA tertinggi pada 2019 mencapai sebesar 93,45 terendah pada tahun 2023 hanya sebesar 87,62 dan 2020 sebesar 88,57, sementara untuk tahun 2018 data tidak tersedia karena pada saat itu IKPA belum diakomodir dalam perjanjian kinerja.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Pada rencana kerja anggaran tahun 2023 tidak ada secara khusus alokasi anggaran untuk pencapaian IKPA, karena perencanaan/pelaksanaan/output seluruh anggaran kegiatan akan menjadi aspek perhitungan IKPA. Berikut ini hasil penilaian IKPA berdasarkan aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan pada akhir periode tahun 2023.

Tabel 47. Rincian bobot IKPA

	Perencanaan		Pelaksanaan					Kualitas Hasil	Nilai Akhir
	Revisi DIPA	Deviasi Hal.III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	
Nilai	100,00	54,33	62,23	100,00	100,00	97,42	100,00	100,00	87,62
Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25	
Nilai Akhir	10,00	5,43	12,45	10,00	10,00	9,74	5,00	25,00	
Nilai Aspek	77,17		91,93					100,00	

Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran menjadi terendah dalam membentuk nilai bobot diantara beberapa lainnya. 1) Deviasi Halaman III DIPA hanya mencapai nilai akhir 5,43 dari bobot 10, hal ini terjadi karena rencana penarikan dana yang terdapat pada Halaman III DIPA sering mengalami deviasi terlalu tinggi (selisih antara rencana penarikan dana dengan realisasi penerikan dana). 2) Penyerapan Anggaran hanya mencapai nilai akhir 12,45 dari bobot 20, hal ini terjadi karena penyerapan anggaran per jenis belanja per triwulan terlalu jauh selisihnya dengan target serapan anggaran per jenis belanja per triwulan.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Sudah dilakukan dengan lebih cermat menyusun Rencana Penarikan Dana dengan memperhatikan estimasi serapan anggaran, dan rencana tindak lanjut yaitu melakukan revisi Halaman III DIPA dengan lebih cermat mengestimasi serapan anggaran. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi capaian komponen IKPA yang masih rendah untuk segera dilakukan perbaikan bulan berikutnya.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Walaupun sudah dilakukan penyusunan rencana penarikan dana lebih cermat dan melakukan monitoring dan evaluasi setiap tetapi deviasi Halaman III DIPA tetap tinggi, sehingga tetap menjadi permasalahan dalam pencapaian IKPA yang maksimal. Dapat diidentifikasi kendala pencapaian indikator ini yaitu 1) rencana penarikan dana dalam hal ini belanja barang dari pelaksana kegiatan sering tidak akurat, sering berubah-ubah sehingga perbandingan (deviasi) Halaman III DIPA terlalu besar baik minus ataupun plus; 2) Ditambah lagi revisi rencana penarikan dana yang diperhitungkan oleh sistem SPAN hanya per triwulan sebelum tanggal 15 bulan berikut, sehingga ketika ada revisi pada pertengahan triwulan tidak dianggap ada perubahan rencana penarikan dana tetap mengacu rencana penarikan dana triwulan sebelumnya.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Lebih cermat lagi menyusun rencana penarikan dana dengan memperhatikan estimasi serapan anggaran, lebih sering berkoordinasi dengan pelaksana kegiatan dan memberikan pemahaman lebih tentang rencana penarikan dana bagi kinerja organisasi. Selain itu lebih ketat lagi dalam monitoring dan evaluasi capaian komponen IKPA yang masih rendah untuk segera dilakukan perbaikan bulan berikutnya.

IK-23: Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPAP Ujung Batee

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Barang Milik Negara semakin berkembang dan kompleks, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan yang penanganannya belum dapat dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara perlu dilakukan penggantian untuk menjawab permasalahan dan praktik yang belum tertampung dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian,

Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan Barang Milik Negara tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang disesuaikan dengan siklus perbendaharaan.

Tabel 48. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN

Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target 2024 (%)	% Capaian 2022 terhadap 2024
-	-	-	73,25	76,21	78,00	78,10	100,13	75,00	104,13

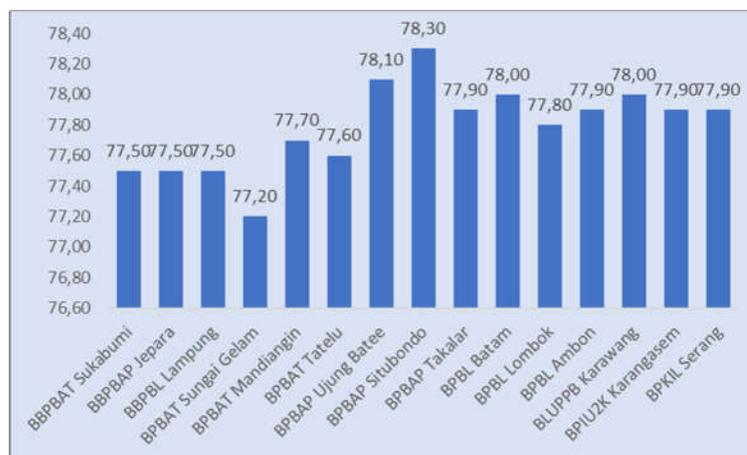
* Tahun 2018-2020 indikator belum diakomodir.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN tahun 2023 sebesar 78,10 atau tercapai 100,13 % dari target sebesar 78. Capaian indikator ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan di mana tahun 2022 tingkat kepatuhan hanya mencapai sebesar 76,21 dan tahun 2021 sebesar 73,25. Pencapaian ini jika dibandingkan target 2024 sudah melampaui sebesar 104,13 % dari target hanya 75. Tahun 2018 sampai dengan 2020 indikator ini belum diakomodir dalam perjanjian kinerja. Indikator ini merupakan indikator terobosan mulai diakomodir pada tahun 2021.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Pada rencana kerja anggaran tahun 2023 tidak ada secara khusus alokasi anggaran untuk pencapaian tingkat kepatuhan pengelolaan BMN. Berdasarkan surat Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya Nomor B.148/DJPB.1/TU.210/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 perihal IKU Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), seperti berikut.



Gambar 19. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN pada UPT



Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN pada UPT berkisar antara 77,2-78,30. Tingkat kepatuhan terendah sebesar 77,20 pada BPBAP Sungai Gelam dan tertinggi sebesar 78,30 pada BPBAP Situbondo, sedangkan BPBAP Ujung Batee dengan nilai 78,10 berada pada peringkat ke-2 dari 15 UPT.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Sudah dilakukan pengidentifikasian yang mungkin menjadi penghambat pencapaian tingkat kepatuhan pengelolaan BMN, selain itu juga dilakukan peningkatan ketelitian dan kecermatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengelolaan BMN.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Kendala yang dialami dalam merealisasikan kegiatan ini adalah sumber daya manusia di bidang keuangan dan akuntansi masih terbatas.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Penambahan sumber daya manusia yang lebih kompeten, baik melalui diklat di bidang akuntansi dan keuangan maupun rekrutmen PNS atau PPPK dengan kompetensi bidang keuangan dan akuntansi.

IK-24: Nilai kinerja anggaran BPBAP Ujung Batee

Nilai kinerja anggaran merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui kinerja suatu program. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-KL. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan 3 tahun 2021. Nilai kinerja anggaran lingkup BPBAP Ujung Batee diperoleh dari aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) e-monev anggaran Kementerian Keuangan RI. Hasil pengukuran aspek impelentasi terdiri dari variabel: Penyerapan Anggaran, Konsistensi atas RPD (awal), Konsistensi atas RPD (akhir), Capaian Keluaran, dan Efisiensi.

Tabel 49. Nilai kinerja anggaran

Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018 (Nilai)	2019 (Nilai)	2020 (Nilai)	2021 (Nilai)	2022 (Nilai)	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	%	Target 2024 (Nilai)	% Capaian 2022 terhadap 2024
96,00		25,16	80,14	85,90	82,00	85,68	104,49	89,00	96,27

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

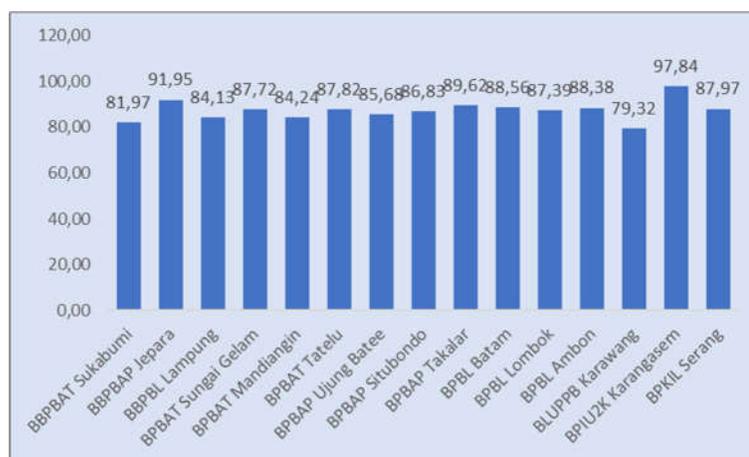
Nilai kinerja anggaran tahun 2023 sebesar 85,68 atau tercapai sebesar 104,49 % dari target sebesar 82. Pencapaian ini jika dibandingkan target 2024 belum tercapai, hanya mencapai

sebesar 96,27 % dari target hanya 89. Data time series nilai kinerja anggaran mengalami fluktuasi, di mana capaian tertinggi terjadi pada tahun 2018 mencapai sebesar 96, dan terendah pada tahun 2020 hanya sebesar 25,16, sementara untuk tahun 2019 data tidak tersedia karena pada saat itu nilai kinerja anggaran tidak diakomodir dalam perjanjian kinerja.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Pada rencana kerja anggaran tahun 2023 tidak ada secara khusus alokasi anggaran untuk pencapaian nilai kinerja anggaran, karena perencanaan/pelaksanaan/output seluruh anggaran kegiatan akan menjadi komponen pembentuk nilai kinerja anggaran.

Berikut ini hasil penilaian nilai kinerja anggaran berdasarkan aplikasi SMART Kementerian Keuangan pada akhir periode tahun 2023.



Gambar 20. Nilai kinerja anggaran pada UPT

Nilai kinerja anggaran pada UPT berkisar antara 79,32-97,84. Nilai kinerja anggaran terendah sebesar 79,32 pada BLUPPB Karawang dan tertinggi sebesar 97,84 pada BPIU2K Karangasem, sedangkan BPBAP Ujung Batee dengan nilai kinerja anggaran sebesar 85,68 berada pada peringkat ke-11 dari 15 UPT.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Sudah dilakukan dengan lebih cermat menyusun Rencana Penarikan Dana dengan memperhatikan estimasi serapan anggaran, dan rencana tindak lanjut yaitu melakukan revisi Halaman III DIPA dengan lebih cermat mengestimasi serapan anggaran. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi capaian variabel efisiensi yang masih rendah untuk segera dilakukan perbaikan bulan berikutnya.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Walaupun sudah dilakukan penyusunan rencana penarikan dana lebih cermat dan melakukan monitoring dan evaluasi setiap tetapi efisiensi masih rendah, sehingga tetap

menjadi permasalahan dalam pencapaian yang maksimal. Dapat diidentifikasi kendala pencapaian indikator ini yaitu rencana penarikan dana dari pelaksana kegiatan sering tidak akurat, sering berubah-ubah sehingga perbandingan (deviasi) antara rencana penarikan dana dengan output terlalu besar baik minus ataupun plus.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Lebih cermat lagi menyusun rencana penarikan dana dengan memperhatikan estimasi serapan anggaran, lebih sering berkoordinasi dengan pelaksana kegiatan dan memberikan pemahaman lebih tentang rencana penarikan dana bagi kinerja organisasi. Selain itu lebih ketat lagi dalam monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja yang masih rendah untuk segera dilakukan perbaikan bulan berikutnya.

IK-25: Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPBAP Ujung Batee

Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Pengadaan barang dan jasa sendiri dapat dibagi menjadi dua. Pertama, pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintah. Pada sektor pemerintah, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berlangsung cukup sulit. Proses yang berlangsung harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan tidak boleh melanggar peraturan sedikitpun.

Definisi pengadaan barang dan jasa adalah pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan pengadaan dalam hal untuk mendapatkan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintahan terbilang sulit karena pembiayaannya berkaitan erat dengan APBN/APBD sehingga segala proses yang terjadi harus dapat dipertanggungjawabkan dengan sejelas-jelasnya. Sementara itu, pengadaan barang dan jasa pada sektor non pemerintah atau perusahaan, proses pengadaan yang dilaksanakan cenderung cukup mudah dan tidak rumit pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada pengadaan di sektor non pemerintah, aturan-aturan pengadaan barang dan jasa cenderung mengacu pada kebijakan instansi atau perusahaan masing-masing.

Tabel 50. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa

Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target 2024 (%)	% Capaian 2022 terhadap 2024
-	-	-	73,25	76,21	77,50	82,35	106,26	75,00	109,80

* Tahun 2018-2020 indikator belum diakomodir.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

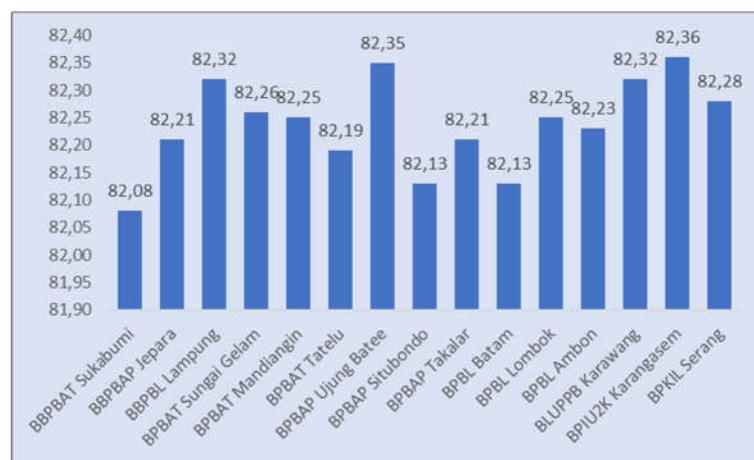
Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa tahun 2023 sebesar 82,35 atau tercapai 106,26 % dari target sebesar 77,5. Pencapaian ini jika dibandingkan target 2024 telah melampaui target sebesar 109,8 % dari target 75. Data *time series* terlihat bahwa tingkat kepatuhan

mengalami tren meningkat dibanding tahun sebelumnya, dimana tahun 2021 tingkat kepatuhan hanya sebesar 73,25 kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 76,21 dan tahun 2023 meningkat lagi menjadi 82,35, dan capaian ini sebagai *all time high* (ATH)

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Pada rencana kerja anggaran tahun 2023 tidak ada secara khusus alokasi anggaran untuk pencapaian tingkat kepatuhan. Pelaksanaan anggaran seluruh kegiatan tidak terlepas dari pengadaan barang/jasa, jadi anggarannya melekat pada seluruh kegiatan yang menjadi komponen perhitungan Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan surat Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya Nomor B.112/DJPB.1/RC.610/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 perihal IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Satker Lingkup DJPB, seperti berikut.



Gambar 21. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa pada UPT

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BPBAP Ujung Batee cenderung sama dengan UPT lainnya yaitu 82, hanya angka di belakang koma yang menjadi pembeda. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa terendah sebesar 82,08 pada BBPBAT Sukabumi, dan tertinggi sebesar 82,36 pada BPIU2K Karangasem, sedangkan BPBAP Ujung Batee sebesar 82,35 berada pada peringkat ke-2 dari 15 UPT.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Sudah dilakukan pengidentifikasian yang mungkin menjadi penghambat pencapaian tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa, selain itu juga dilakukan peningkatan ketelitian dan kecermatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengadaan barang/jasa.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Tidak ada kendala berarti merealisasikan kegiatan ini, hanya perlu ditingkatkan koordinasi antara tim pengadaan, pejabat pembuat komitmen, kuasa pengguna anggaran, biro umum selaku unit kerja pengadaan barang/jasa, bahkan inspektorat jenderal mengingat

administrasi mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan semakin kompleks, banyak dokumen dan ketentuan yang harus diperhatikan.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Rencana aksi pada periode berikutnya akan ditingkatkan koordinasi antara tim pengadaan, pejabat pembuat komitmen, kuasa pengguna anggaran, biro umum selaku unit kerja pengadaan barang/jasa, bahkan inspektorat jenderal mengingat administrasi mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan semakin kompleks, banyak dokumen dan ketentuan yang harus diperhatikan.

IK-26: Nilai Pengawasan Kearsipan BPAP Ujung Batee

Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

Tabel 51. Nilai pengawasan kearsipan

Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018 (Nilai)	2019 (Nilai)	2020 (Nilai)	2021 (Nilai)	2022 (Nilai)	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	%	Target 2024 (Nilai)	% Capaian 2022 terhadap 2024
-	-	-	-	-	75,00	68,75	91,67	Indikator belum diakomodir Renstra 2020-2024	-

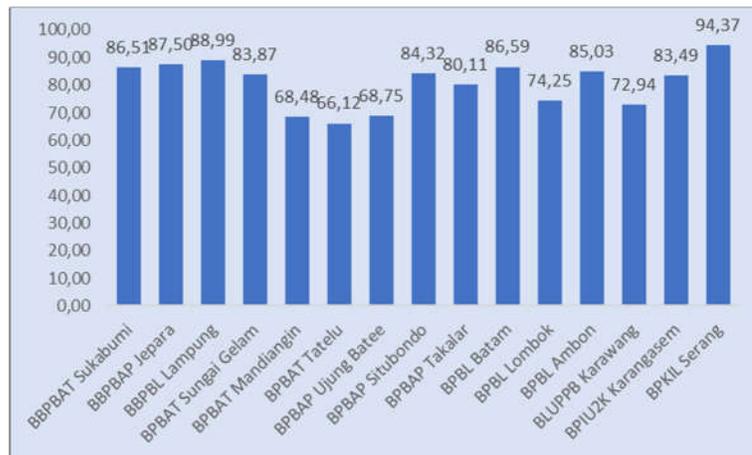
* Tahun 2018-2022 indikator belum diakomodir.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Nilai pengawasan kearsipan tahun 2023 sebesar 68,75 atau tercapai 91,67 % dari target sebesar 75. Indikator kinerja ini mulai diakomodir pada tahun 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, begitupun pada Rencana Strategis BPAP Ujung Batee Tahun 2020-2024 indikator kinerja ini belum diakomodir sehingga belum dapat dibandingkan.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Pada rencana kerja anggaran tahun 2023 tidak ada secara khusus alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja nilai pengawasan kearsipan. Pengawasan kearsipan dinilai beberapa aspek tidak hanya pengelolaan kearsipan tetapi sampai kepada SDM dan infrastruktur kearsipan, sehingga nilai pengawasan kearsipan secara tidak langsung didukung anggaran perangkat pengolah data dan komunikasi, layanan perkantoran, layanan manajemen SDM, layanan umum.



Gambar 22. Pengawasan kearsipan pada UPT

Berdasarkan surat Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya Nomor B.113/DJPB.1/TU.140/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 perihal Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023, seperti gambar di atas. Pengawasan kearsipan pada UPT berkisar antara 66,12-94,37. Pengawasan kearsipan terendah sebesar 66,12 (predikat B kategori Baik) pada BPBAT Tatelu dan tertinggi sebesar 94,37 (predikat AA kategori Sangat Memuaskan) pada BPKIL Serang, sedangkan BPBAP Ujung Batee dengan nilai 68,75 (predikat B kategori Baik) berada pada peringkat ke-13 dari 15 unit pelaksana teknis. Dengan demikian seluruh unit pelaksana teknis telah melaksanakan kearsipan dengan baik tidak ada yang cukup maupun kurang.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Sudah dilakukan pengidentifikasian yang mungkin menjadi penghambat pencapaian tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa, selain itu juga dilakukan peningkatan ketelitian dan kecermatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengadaan barang/jasa.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Kendala yang dialami pada periode ini adalah minimnya personil kerja yang mengerti akan tata kearsipan dan sarana prasarana arsip yang terbatas menjadikan kegiatan pengarsipan mengalami kesulitan dalam proses perealisasiannya, serta belum adanya pejabat arsiparis dan belum adanya pegawai yang mengikuti pelatihan teknis kearsipan menyebabkan personil kerja yang ditugaskan belum memahami aspek-aspek kearsipan yang dinilai.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Rencana aksi berikutnya akan dilakukan penunjukan personil kerja tambahan untuk membantu menangani kearsipan. Selain itu pengusulan keikutsertaan pegawai dalam diklat kearsipan.

IK-27: Persentase layanan perkantoran BPBAP Ujung Batee

Layanan perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan jamuan rapat, layanan daya dan jasa, perawatan kendaraan dan layanan-layanan lainnya. Selain pelayanan internal dalam kegiatan Layanan Perkantoran tersebut juga menyangkut layanan eksternal seperti jamuan bagi tamu, pemberian layanan bagi mitra kerja

Tabel 52. Persentase layanan perkantoran

Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	Target (%)	Realisasi (%)	%	Target 2024 (%)	% Capaian 2022 terhadap 2024
-	-	-	-	-	75,00	100,00	133,33	Indikator belum diakomodir Renstra 2020-2024	-

* Tahun 2018-2022 indikator belum diakomodir.

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian

Layanan perkantoran tahun 2023 sebesar 100 atau tercapai 133,33 % dari target sebesar 75. Indikator kinerja ini mulai diakomodir pada tahun 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, begitupun pada Rencana Strategis BPBAP Ujung Batee Tahun 2020-2024 indikator kinerja ini belum diakomodir sehingga belum dapat dibandingkan.

Anggaran dan Realisasi Pendukung

Pada rencana kerja anggaran tahun 2023 layanan perkantoran didukung anggaran sebesar Rp 10.115.751.000 dengan realisasi Rp 10.109.684.115 atau 99,94 %. Anggaran mencakup belanja gaji dan tunjangan pegawai, belanja listrik, telepon, pemeliharaan asset. Layanan perkantoran dalam hal ini tidak hanya bersifat internal tetapi juga eksternal, dengan demikian indikator ini juga didukung anggaran perangkat pengolah data dan komunikasi sebesar Rp 100.000.000, layanan hubungan masyarakat sebesar Rp 150.750.000, layanan umum sebesar Rp 180.000.000, layanan manajemen SDM sebesar Rp 155.250.000, layanan perencanaan dan penganggaran sebesar Rp 222.750.000, layanan pemantauan dan evaluasi sebesar Rp 216.844.000, dan layanan manajemen keuangan sebesar Rp 102.937.000.

Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Sudah dilakukan pengidentifikasian yang mungkin menjadi penghambat pencapaian target pelayanan perkantoran.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator

Keterbatasan sumber daya yang tersedia dalam mendukung pemberian layanan perkantoran, seperti sumber daya manusia, instrumen, dan sarana prasarana.

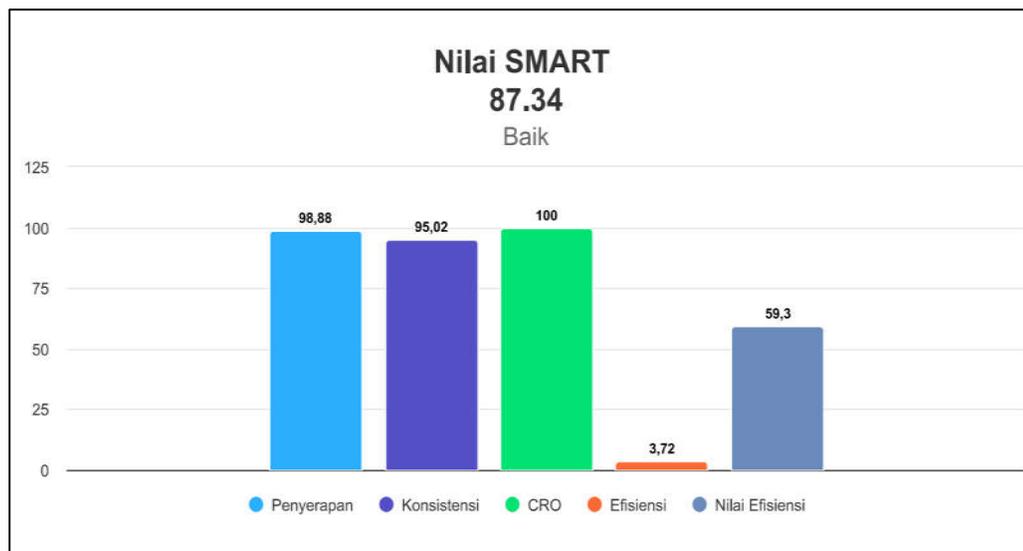
Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya

Rencana aksi berikutnya akan dilakukan adalah mengoptimalkan sumber daya manusia, sarana prasana yang ada dan menyempurnakan instrumen yang ada sehingga harapannya tidak mengganggu layanan yang diberikan.

3.3. Efisiensi

Penghitungan efisiensi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Peraturan tersebut berlaku sampai dengan akhir tahun 2023, dan akan digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran BPBAP Ujung Batee dilakukan penghitungan oleh aplikasi SMART Kementerian Keuangan.



Gambar 23. Tangkapan layar aplikasi SMART tahun 2023

Efisiensi tahun 2023 sebesar 3,72, terlihat sangat rendah dibandingkan angka-angka disebelahnya. Berdasarkan PMK 22/PMK.02/2021 bahwa nilai tertinggi efisiensi 20% dan nilai terendah -20% (minus dua puluh persen). Sehingga capaian efisiensi dikonversikasi menjadi Nilai Efisiensi sebesar 59,3.

3.4. Kinerja Anggaran

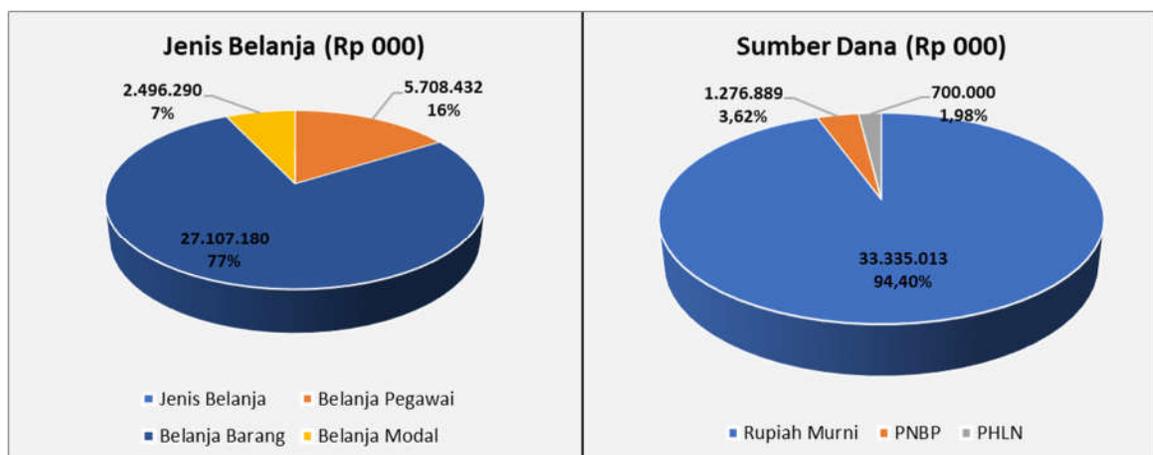
Terlihat pada gambar di atas bahwa nilai SMART sebesar 87,34 yang berarti nilai kinerja anggaran BPAP Ujung Batee berada pada kategori "Baik". Kategori Baik dibentuk dari beberapa nilai indikator yaitu Penyerapan anggaran sebesar 98,88, Konsistensi sebesar 95,02, Capaian Rincian Output (CRO) sebesar 100, dan Nilai Efisiensi sebesar 59,3. Nilai penyerapan sebesar 98,88 menggambarkan pagu anggaran yang terealisasi sebesar 98,88 % dari total pagu anggaran Rp 35.311.902.00. Konsistensi sebesar 95,02 menunjukkan bahwa konsistensi (keselarasan) penyerapan anggaran terhadap rencana penarikan dana setiap bulan hanya 95,02 %. CRO sebesar 100 menandakan semua rincian output sudah tercapai.

Alokasi anggaran tahun 2023 pada BPAP Ujung Batee awalnya sebesar Rp 41.019.562.000. Setelah berjalannya waktu pagu anggaran tahun 2023 mengalami pengurangan akibat *Automatic Adjustment* yang berakhir direalokasi ke BUN. Sehingga pagu akhir sampai 31 Desember 2023 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 53. Pagu dan realisasi anggaran tahun 2023

Kode Nama Kegiatan	Total			
	Pagu	Realisasi	%	Sisa
2344 Pengelolaan Perbenihan Ikan	4.506.581.000	4.314.995.986	95,75	191.585.014
2345 Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	11.472.463.000	11.377.994.603	99,18	94.468.397
2346 Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	7.429.000.000	7.352.283.743	98,97	76.716.257
2348 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	11.244.282.000	11.214.060.306	99,73	30.221.694
5747 Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	659.576.000	658.038.000	99,77	1.538.000
Jumlah Pagu	35.311.902.000	34.917.372.638	98,88	394.529.362

Kegiatan Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan (2345) menjadi yang tertinggi mendapat alokasi anggaran yaitu mencapai sekitar 11 milyar rupiah. Sedangkan kegiatan Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan (5747) sebagai terendah mendapatkan alokasi anggaran hanya sebesar sekitar 6 ratus juta rupiah.



Gambar 24. Alokasi jenis belanja dan sumber dana belanja Tahun 2023

Belanja barang mendapatkan alokasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan belanja pegawai dan belanja modal, yaitu 77 % dari total anggaran. Selain itu sumber dana belanja terdiri dari Rupiah Murni sebesar 94,40 %, PNPB sebesar 3,62 %, dan ada sumber dana baru yaitu Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) mencapai 1,98 %.



Gambar 25. Pagu anggaran tahun 2014-2023

Data *time series* 2014-2023 menunjukkan pagu anggaran setiap tahunnya mengalami naik turun. Peningkatan terbesar terjadi tahun 2015 sebesar 113,4 % dan penurunan terdalam pada tahun 2022 mencapai sebesar 42,15 %. Realisasi anggaran terendah terjadi pada tahun 2018 hanya terserap 91,25 %, sementara realisasi tertinggi tahun 2021 menjadi tahun yang lumayan baik karena mampu sebagai serapan tertinggi mencapai 99,35 %.

BAB 4. PENUTUP

Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee merupakan salah satu unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, serta bimbingan teknis perikanan budi daya air payau.

Laporan Kinerja (LKj) BPBAP Ujung Batee Tahun 2023 menyajikan capaian indikator kinerja selama Januari s.d Desember 2023. Terhadap capaian tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian indikator kinerja tahun sebelumnya pada Triwulan III sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan.

Berdasarkan target triwulanan pada rencana aksi BPBAP Ujung Batee Tahun 2023, dari total 27 indikator kinerja pendukung sasaran strategis, sebanyak 24 indikator kinerja telah memenuhi dan melampaui target yang telah ditetapkan, hanya sebanyak 3 indikator kinerja yang tidak mencapai/memenuhi target.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja BPBAP Ujung Batee Tahun 2023 ini antara lain adanya pelaksanaan pengadaan barang/jasa belum semuanya terlaksana masih ada beberapa paket dalam masa pelaksanaan kontrak.

Dalam rangka peningkatan kinerja BPBAP Ujung Batee, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di periode berikutnya. Untuk itu, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain adalah:

1. Memperkuat koordinasi dengan instansi pusat maupun instansi lain, khususnya pada pelaksanaan kegiatan yang akan berpengaruh pada capaian indikator kinerja;
2. Monitoring dan evaluasi pada setiap minggu pertama bulan berjalan (Januari – Desember 2024; Setiap Triwulan Tahun 2024; Setiap Semester Tahun 2024);
3. Rapat Pengendalian rutin.

LAMPIRAN 1

Matriks Keselarasan Indikator Kinerja pada Rencana Strategis 2020-2024

No Urut SS	Sasaran Strategis (SS)	No. Urut IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	No Urut SS	Sasaran Strategis (SS)	No. IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2023	Keterangan		
1	Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat lingkup BPBAP Ujung Batee	1	Nilai PNBP dari perikanan budidaya (Rp 000)	1.034.278	1.167.145	1.251.476	1.376.624	1.514.286	1	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat di BPBAP Ujung Batee	1	Nilai PNBP yang Diperoleh (Rupiah 000)	1.632.830	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB		
2	Pengelolaan kawasan perikanan budidaya yang berkelanjutan	2	Percontohan pengelolaan kluster kawasan perikanan budidaya berkelanjutan (kawasan)	1	2	1	1	1	3	Meningkatnya Kawasan Perikanan Budidaya yang Direvitalisasi	3	Kluster Tambak Udang dan Bandeng yang Siap Operasional (Kluster)	2	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB		
									4	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	9	Persentase Bantuan Sarana Kawasan Budidaya yang Disalurkan (Persen)	100	Terobosan kebijakan di DJPB		
3	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana UPT	3	UPT perikanan budidaya yang ditingkatkan fasilitasnya (unit)		1	1	1	1						Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB		
4	Pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan	4	Sarana produksi usaha perikanan budidaya yang didistribusikan ke masyarakat (kelompok)	7	17	15	15	15	4	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	8	Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang Disalurkan (Persen)	100	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB		
									4	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	7	Sarana Produksi Dan Usaha Komoditas Ikan Lokal yang Disalurkan (Paket)	1	Adanya terobosan kebijakan di DJPB		
		5	Prasarana produksi dan usaha yang dikembangkan (unit)		1	1	1	1						Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB		
		6	Benih yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	7.110.000	7.683.315	8.000.000	9.000.000	10.000.000	4	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	6	Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan (Persen)	75	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB		
		7	Calon induk unggul yang disalurkan ke masyarakat (ekor)		14.820	15.000	15.000	15.000	4	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	5	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan (Persen)	75	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB		
		8	Calon induk unggul yang diproduksi (ekor)	49.400	64.100	65.000	67.000	70.000	4	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	4	Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi (Persen)	100	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB		
		9	Pakan ikan yang disalurkan ke masyarakat (kg)	100.000	70.000	72.000	75.000	77.000	2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pakan Ikan Untuk Pembudidayaan Ikan	2	Persentase Pakan Mandiri yang Diproduksi (Persen)	80	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB		
		10	Pakan ikan yang diproduksi untuk operasional UPT (kg)		37.000	37.000	37.000	37.000							Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
		11	Rehabilitasi sarana dan prasarana UPR/HSRT (unit)		3	3	3	3							Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
		12	Sarana teknologi yg diproduksi oleh UPT (paket)	1	4	4	4	4							Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB	
		13	Layanan Diseminasi Teknologi PB (layanan)		5	5	5	5	4	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	10	Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan (Persen)	100	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB		
		4	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan budidaya yang partisipatif	14	Jumlah layanan sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang sesuai standar (sampel)	3.350	3.350	3.450	3.550	3.650	5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya	11	Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji (Persen)	100	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
													12	Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR) (Persen)	100	Terobosan kebijakan di DJPB
6	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pakan dan Obat Ikan										13	Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan (Persen)	100	Terobosan kebijakan di DJPB		

No Urut SS	Sasaran Strategis (SS)	No. Urut IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	No Urut SS	Sasaran Strategis (SS)	No. IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2023	Keterangan
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPBAP Ujung Batee	15	Indeks profesionalisme ASN lingkup BPBAP Ujung Batee (%)	72	73	74	75	76	7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di BPBAP Ujung Batee	16	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBAP Ujung Batee (Indeks)	81	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		16	Penyelesaian LHP BPK atas BPBAP Ujung Batee (%)	100	100	100	100	100			20	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBAP Ujung Batee (Persen)	100	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		17	Nilai rekon pengelolaan kinerja BPBAP Ujung Batee (%)	85	90	92	94	96			14	Nilai PM SAKIP BPBAP Ujung Batee (Nilai)	75	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		18	Rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPBAP Ujung Batee yang dokumen tindak lanjutnya telah tuntas (%)	60	65	70	75	85			21	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja BPBAP Ujung Batee (Persen)	75	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		19	Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	85	87	90						Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		20	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPBAP Ujung Batee (%)	88	89	90	91	92			22	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBAP Ujung Batee (Nilai)	93,75	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		21	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPBAP Ujung Batee (%)	85	86	87	88	89			24	Nilai Kinerja Anggaran BPBAP Ujung Batee (Nilai)	82	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		22	Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa (%)		72,5	75	75	75			25	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)	77,5	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
		23	Tingkat pengelolaan barang milik negara (%)		72,5	75	75	75			23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBAP Ujung Batee (Persen)	77,5	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
											15	Persentase Pelaku Usaha Budidaya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	80	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB
									17	Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	3	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB		
									18	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB		
									19	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif Terhadap Total Pemberitaan Tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee (Persen)	86	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB		
									26	Nilai Pengawasan Kearsipan BPBAP Ujung Batee (Nilai)	75	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB		
									26	Persentase Layanan Perkantoran BPBAP Ujung Batee (Persen)	75	Tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB		

LAMPIRAN 2

Matriks Perubahan Indikator Kinerja 2023

PERJANJIAN KINERJA AWAL				PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN I				PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN II						
NO SS	SASARAN KEGIATAN (SS)	NO IK	INDIKATOR KINERJA (IK)	TARGET	NO SS	SASARAN KEGIATAN (SS)	NO IK	INDIKATOR KINERJA (IK)	TARGET	NO SS	SASARAN KEGIATAN (SS)	NO IK	INDIKATOR KINERJA (IK)	TARGET
1	Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat di BPBAP Ujung Batee	1	Nilai PNBP satker BPBAP Ujung Batee (Ribuan Rupiah)	1.632.830	1	Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat di BPBAP Ujung Batee	1	Nilai PNBP yang diperoleh (Ribuan Rupiah)	1.632.830	1	Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat di BPBAP Ujung Batee	1	Nilai PNBP yang diperoleh (Ribuan Rupiah)	1.632.830
3	Meningkatnya sarana dan prasarana pakan ikan untuk pembudidayaan ikan	9	Persentase produksi pakan mandiri dibandingkan dengan bahan baku yang tersedia lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)	80	2	Meningkatnya sarana dan prasarana pakan ikan untuk pembudidayaan ikan	2	Persentase pakan mandiri yang diproduksi (Persen)	80	2	Meningkatnya sarana dan prasarana pakan ikan untuk pembudidayaan ikan	2	Persentase pakan mandiri yang diproduksi (Persen)	80
5	Meningkatnya kawasan perikanan budidaya yang direvitalisasi	11	Kluster tambak Udang dan Bandeng yang siap operasional di lingkup BPBAP Ujung Batee (Kluster)	2	3	Meningkatnya kawasan perikanan budidaya yang direvitalisasi	3	Kluster tambak Udang dan Bandeng yang siap operasional (Kluster)	2	3	Meningkatnya kawasan perikanan budidaya yang direvitalisasi	3	Kluster tambak Udang dan Bandeng yang siap operasional (Kluster)	2
2	Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	4	Produksi calon induk di lingkup BPBAP Ujung Batee (Ekor)	52.600	4	Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	4	Persentase calon induk unggul yang diproduksi (Persen)	100	4	Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	4	Persentase calon induk unggul yang diproduksi (Persen)	100
		3	Persentase bantuan calon induk yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)	75			5	Persentase bantuan calon induk yang disalurkan (Persen)	75			5	Persentase bantuan calon induk yang disalurkan (Persen)	75
		2	Persentase bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)	75			6	Persentase bantuan benih yang disalurkan (Persen)	75			6	Persentase bantuan benih yang disalurkan (Persen)	75
		6	Tersalurkannya sarana produksi dan usaha komoditas ikan lokal ke masyarakat (Paket)	1			7	Sarana produksi dan usaha komoditas ikan lokal yang disalurkan (Paket)	1			7	Sarana produksi dan usaha komoditas ikan lokal yang disalurkan (Paket)	1
		5	Tersalurkannya sarana dan prasarana Bioflok ke masyarakat lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)	100			8	Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan (Persen)	100			8	Persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan (Persen)	100
		8	Persentase bantuan sarana kawasan budidaya yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat (Persen)	100			9	Persentase bantuan sarana kawasan budidaya yang disalurkan (Persen)	100			9	Persentase bantuan sarana kawasan budidaya yang disalurkan (Persen)	100
		7	Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat (Persen)	100			10	Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan (Persen)	100			10	Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan (Persen)	100
		6	Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang kawasan dan kesehatan ikan	12			Persentase sampel layanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang diuji lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)	100	5			Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya	11	Persentase kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji (Persen)
13	Persentase pengujian sampel antimikrobal resistan (AMR) lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)			100	12	Persentase pengujian antimikrobal resistan (AMR) (Persen)	100	12		Persentase pengujian antimikrobal resistan (AMR) (Persen)	100			
4	Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang pakan dan obat ikan	10	Persentase jumlah sampel pakan ikan yang diuji nutrisi pakan oleh BPBAP Ujung Batee (Persen)	100	6	Meningkatnya kualitas pengendalian pakan dan obat ikan	13	Persentase pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan (Persen)	100	6	Meningkatnya kualitas pengendalian pakan dan obat ikan	13	Persentase pakan dan obat ikan yang diuji nutrisi dan mutu pakan (Persen)	100

NO SS	SASARAN KEGIATAN (SS)	NO IK	INDIKATOR KINERJA (IK)	TARGET	NO SS	SASARAN KEGIATAN (SS)	NO IK	INDIKATOR KINERJA (IK)	TARGET	NO SS	SASARAN KEGIATAN (SS)	NO IK	INDIKATOR KINERJA (IK)	TARGET
7	Tata kelola pemerintahan yang baik di BPBAP Ujung Batee	16	Nilai rekonsiliasi SAKIP lingkup BPBAP Ujung Batee (Nilai)	93	7	Tata kelola pemerintahan yang baik di BPBAP Ujung Batee	14	Nilai rekonsiliasi kinerja BPBAP Ujung Batee (Nilai)	93	7	Tata kelola pemerintahan yang baik di BPBAP Ujung Batee	14	Nilai PM SAKIP BPBAP Ujung Batee (Nilai)	75
		23	Persentase jumlah pelaku usaha KP yang terintegrasi KUSUKA lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)	80			15	Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)	80			15	Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)	80
		14	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPBAP Ujung Batee (Indeks)	81			16	Indeks Profesionalitas ASN unit kerja lingkup BPBAP Ujung Batee (Indeks)	81			16	Indeks Profesionalitas ASN unit kerja lingkup BPBAP Ujung Batee (Indeks)	81
		24	Indeks pengelolaan kepegawaian lingkup BPBAP Ujung Batee (Indeks)	3			17	Indeks pengelolaan kepegawaian (Indeks)	3			17	Indeks pengelolaan kepegawaian (Indeks)	3
		18	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)	92										
		27	Hasil penilaian konsensus Zona Integritas lingkup BPBAP Ujung Batee (Nilai)	76			18	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76			18	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76
		28	Persentase jumlah pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya wilker BPBAP Ujung Batee (Persen)	86			19	Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee (Persen)	86			19	Persentase pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee (Persen)	86
		15	Persentase Penyelesaian LHP BPK atas Satker BPBAP Ujung Batee (Persen)	100			20	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBAP Ujung Batee (Persen)	100			20	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBAP Ujung Batee (Persen)	100
		17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)	75			21	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPBAP Ujung Batee (Persen)	75			21	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPBAP Ujung Batee (Persen)	75
		19	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	89			22	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBAP Ujung Batee (Nilai)	89			22	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBAP Ujung Batee (Nilai)	93,75
		22	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	77,5			23	Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBAP Ujung Batee (Nilai)	77,5			23	Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBAP Ujung Batee (Nilai)	77,5
		20	Nilai Kinerja Anggaran satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	82			24	Nilai kinerja anggaran BPBAP Ujung Batee (Nilai)	82			24	Nilai kinerja anggaran BPBAP Ujung Batee (Nilai)	82
		21	Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	77,5			25	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPBAP Ujung Batee (Nilai)	77,5			25	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPBAP Ujung Batee (Nilai)	77,5
		26	Nilai pengawasan kearsipan lingkup BPBAP Ujung Batee (Nilai)	75			26	Nilai Pengawasan Kearsipan BPBAP Ujung Batee (Nilai)	75			26	Nilai Pengawasan Kearsipan BPBAP Ujung Batee (Nilai)	75
25	Persentase layanan perkantoran lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)	75	27	Persentase Layanan Perkantoran BPBAP Ujung Batee (Persen)	75	27	Persentase Layanan Perkantoran BPBAP Ujung Batee (Persen)	75						

LAMPIRAN 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Awal)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Manijo**
Jabatan : Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee

Manijo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat di BPBAP Ujung Batee	1	Nilai PNBP salker BPBAP Ujung Batee (Rp)	1 632 030 000
2	Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	2	Persentase bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup BPBAP Ujung Batee (%)	75
		3	Persentase bantuan calon induk yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup BPBAP Ujung Batee (%)	75
		4	Produksi calon induk di lingkup BPBAP Ujung Batee (Ekor)	52 600
		5	Tersalurkannya sarana dan prasarana Bio-flek ke masyarakat lingkup BPBAP Ujung Batee (%)	100
		6	Tersalurkannya sarana produksi dan usaha komoditas ikan lokal ke masyarakat (Paket)	1
		7	Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat (%)	100
		8	Persentase bantuan sarana kawasan budidaya yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat (%)	100
		3	Meningkatnya sarana dan prasarana pakan ikan untuk pembudidayaan ikan	9
4	Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang pakan dan obat ikan	10	Persentase jumlah sampel pakan ikan yang diuji nutrisi pakan oleh BPBAP Ujung Batee (%)	100
5	Meningkatnya kawasan perikanan budidaya yang direvitalisasi	11	Kluster tambak Udang dan Bandeng yang siap operasional di lingkup BPBAP Ujung Batee (Kluster)	2
6	Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang kawasan dan kesehatan ikan	12	Persentase sampel layanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang diuji lingkup BPBAP Ujung Batee (%)	100
		13	Persentase pengujian sampel antimikrobal resistan (AMR) lingkup BPBAP Ujung Batee (%)	100
7	Tata kelola pemerintahan yang baik di BPBAP Ujung Batee	14	Indeks profesionalitas ASN lingkup BPBAP Ujung Batee (indeks)	81

	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		15 Persentase Penyelesaian LHP BPK alas Salker BPBAP Ujung Balee (%)	100
		16 Nilai rekonsiliasi SAKIP lingkup BPBAP Ujung Balee (Nilai)	93
		17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPBAP Ujung Balee (%)	75
		18 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengelahaan yang terstandar lingkup BPBAP Ujung Balee (%)	92
		19 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran salker BPBAP Ujung Balee (Nilai)	89
		20 Nilai Kinerja Anggaran salker BPBAP Ujung Balee (Nilai)	82
		21 Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa salker BPBAP Ujung Balee (Nilai)	77,5
		22 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN salker BPBAP Ujung Balee (Nilai)	77,5
		23 Persentase jumlah pelaku usaha KP yang terintegrasi KUSUKA lingkup BPBAP Ujung Balee (%)	80
		24 Indeks pengelolaan kepegawaian lingkup BPBAP Ujung Balee (Indeks)	3
		25 Persentase layanan perkantoran lingkup BPBAP Ujung Balee (%)	75
		26 Nilai pengawasan kearsipan lingkup BPBAP Ujung Balee (Nilai)	75
		27 Hasil penilaian konsensus Zona Integrasi lingkup BPBAP Ujung Balee (Nilai)	76
		28 Persentase jumlah pembentaaan netral dan positif terhadap total pembentaaan lentang Sub Sektor Perikanan Budidaya wilker BPBAP Ujung Balee (%)	86

Data Anggaran

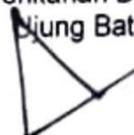
NO	KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
I	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	29.592.598.000
1	Pengelolaan Perbenihan Ikan	5.272.398.000
2	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	19.048.230.000
3	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	4.447.500.000
4	Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	824.470.000
II	Program Dukungan Manajemen	11.426.964.000
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	11.426.964.000
Total Anggaran BPBAP Ujung Batee Tahun 2022		41.019.562.000

Jakarta, 30 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya


Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau
Ujung Batee


Manijo

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Perubahan II/Akhir)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Manijo**
Jabatan : Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budidaya Air
Payau Ujung Batee

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkatkan di BPBAP Ujung Batee	1.	Nilai PNBP yang Diperoleh (Rupiah)	1.632.830.000
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pakan Ikan Untuk Pembudidayaan Ikan	2.	Persentase Pakan Mandiri yang Diproduksi (Persen)	80
3.	Meningkatnya Kawasan Perikanan Budidaya yang Direvitalisasi	3.	Kluster Tambak Udang dan Bandeng yang Siap Operasional (Kluster)	2
4.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	4.	Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi (Persen)	100
		5.	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan (Persen)	75
		6.	Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan (Persen)	75
		7.	Sarana Produksi Dan Usaha Komoditas Ikan Lokal yang Disalurkan (Paket)	1
		8.	Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang Disalurkan (Persen)	100
		9.	Persentase Bantuan Sarana Kawasan Budidaya yang Disalurkan (Persen)	100
		10.	Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan (Persen)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
5.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya	11.	Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji (Persen)	100
		12.	Persentase Pengujian Antimikrobia Resistance (AMR) (Persen)	100
6.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pakan dan Obat Ikan	13.	Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan (Persen)	100
7.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di BPBAP Ujung Batee	14.	Nilai PM SAKIP BPBAP Ujung Batee (Nilai)	75
		15.	Persentase Pelaku Usaha Budidaya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	80
		16.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBAP Ujung Batee (Indeks)	81
		17.	Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	3
		18.	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76
		19.	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif Terhadap Total Pemberitaan Tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Wilayah Kerja BPBAP Ujung Batee (Persen)	86
		20.	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBAP Ujung Batee (Persen)	100
		21.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang	75

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja BPBAP Ujung Batee (Persen)	
		22. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBAP Ujung Batee (Nilai)	93,75
		23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBAP Ujung Batee (Persen)	77,5
		24. Nilai Kinerja Anggaran BPBAP Ujung Batee (Nilai)	82
		25. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)	77,5
		26. Nilai Pengawasan Kearsipan BPBAP Ujung Batee (Nilai)	75
		27. Persentase Layanan Perkantoran BPBAP Ujung Batee (Persen)	75

Jakarta, 06 November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air
Payau Ujung Batee

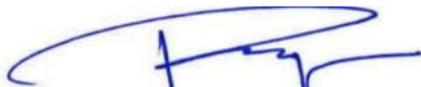
Manijo

Data Anggaran :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Perbenihan Ikan	4.506.581.000
2.	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	11.472.463.000
3.	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	7.429.000.000
4.	Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	659.576.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	11.244.282.000
Total Anggaran Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee Tahun 2023		35.311.902.000

Jakarta, 06 November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya


Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee


Manijo

LAMPIRAN 4 : Realisasi Anggaran

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput;

Periode Desember 2023

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Unit Organisasi : 04 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
 Satuan Kerja : 567385 BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

Hal 1 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	35,311,902,000	0	21,174,773,185	13,742,599,453	34,917,372,638	98.88 %	394,529,362
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	24,067,620,000	0	11,723,918,505	11,979,393,827	23,703,312,332	98.49 %	364,307,668
HB.2344 Pengelolaan Perbenihan Ikan	4,506,581,000	0	3,431,913,344	883,082,642	4,314,995,986	95.75 %	191,585,014
QEL Bantuan Hewan	1,918,967,000	0	1,505,527,566	234,489,084	1,740,016,650	90.67 %	178,950,350
QEL.U01 Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	17,742,000	0	16,760,000	977,500	17,737,500	99.97 %	4,500
QEL.U02 Calon Induk Unggul Udang yang disalurkan ke masyarakat	53,952,000	0	39,297,000	13,233,000	52,530,000	97.36 %	1,422,000
QEL.U03 Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	5,000,000	0	3,103,000	1,590,000	4,693,000	93.86 %	307,000
QEL.U06 Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	180,880,000	0	179,921,553	510,000	180,431,553	99.75 %	448,447
QEL.U07 Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat	340,989,000	0	304,678,606	30,832,101	335,510,707	98.39 %	5,478,293
QEL.U08 Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	122,120,000	0	118,100,372	3,924,400	122,024,772	99.92 %	95,228
QEL.U10 Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	1,198,284,000	0	843,667,035	183,422,083	1,027,089,118	85.71 %	171,194,882
RAL Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	2,587,614,000	0	1,926,385,778	648,593,558	2,574,979,336	99.51 %	12,634,664
RAL.001 Calon Induk Unggul yang diproduksi	2,587,614,000	0	1,926,385,778	648,593,558	2,574,979,336	99.51 %	12,634,664
HB.2345 Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	11,472,463,000	0	6,328,099,638	5,049,894,965	11,377,994,603	99.18 %	94,468,397
BJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit	503,070,000	0	454,358,178	47,595,532	501,953,710	99.78 %	1,116,290
BJC.U02 Sampel Kualitas Air Layanan UPT	243,674,000	0	222,983,028	20,297,500	243,280,528	99.84 %	393,472
BJC.U04 Sampel Mikrobiologi Layanan UPT	107,128,000	0	94,607,280	11,821,592	106,428,872	99.35 %	699,128
BJC.U05 Sampel Biologi Molekuler Layanan UPT	152,268,000	0	136,767,870	15,476,440	152,244,310	99.98 %	23,690
QEG Bantuan Peralatan / Sarana	1,800,000,000	0	185,110,159	1,614,835,907	1,799,946,066	100.00	53,934
QEG.001 Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang disalurkan ke masyarakat	1,800,000,000	0	185,110,159	1,614,835,907	1,799,946,066	100.00	53,934
QJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit	44,393,000	0	42,397,774	1,296,000	43,693,774	98.42 %	699,226
QJC.U03 Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMR) / Surveilans Antimicrobial Use (AMU) yang diuji	44,393,000	0	42,397,774	1,296,000	43,693,774	98.42 %	699,226
RAL Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	75,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	33.33 %	50,000,000
RAL.001 Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan	75,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	33.33 %	50,000,000
RBQ Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	9,050,000,000	0	5,621,233,527	3,386,167,526	9,007,401,053	99.53 %	42,598,947

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput;

Periode Desember 2023

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
Satuan Kerja : 567385 BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

Hal 2 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
RBQ.003 Infrastruktur budidaya udang berkelanjutan yang ditingkatkan	700,000,000	0	158,799,359	541,018,756	699,818,115	99.97 %	181,885
RBQ.004 Prasarana produksi perikanan budidaya di UPT	2,100,000,000	0	1,005,222,600	1,092,055,800	2,097,278,400	99.87 %	2,721,600
RBQ.007 Kluster Kawasan Tambak Udang dan Bandeng di Lokasi Prioritas Lainnya	6,250,000,000	0	4,157,211,568	1,753,092,970	6,210,304,538	99.36 %	39,695,462
HB.2346 Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	7,429,000,000	0	1,615,217,523	5,737,066,220	7,352,283,743	98.97 %	76,716,257
CAL Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	300,000,000	0	299,904,620	0	299,904,620	99.97 %	95,380
CAL.001 Sarana teknologi bidang produksi dan usaha pembesaran ikan yg diproduksi oleh UPT	300,000,000	0	299,904,620	0	299,904,620	99.97 %	95,380
QEG Bantuan Peralatan / Sarana	7,129,000,000	0	1,315,312,903	5,737,066,220	7,052,379,123	98.93 %	76,620,877
QEG.001 Sarana produksi usaha yang disalurkan ke masyarakat	7,129,000,000	0	1,315,312,903	5,737,066,220	7,052,379,123	98.93 %	76,620,877
HB.5747 Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	659,576,000	0	348,688,000	309,350,000	658,038,000	99.77 %	1,538,000
BJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit	20,600,000	0	14,319,000	5,820,000	20,139,000	97.76 %	461,000
BJC.U01 Sampel Nutrisi Pakan	20,600,000	0	14,319,000	5,820,000	20,139,000	97.76 %	461,000
RAL Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	638,976,000	0	334,369,000	303,530,000	637,899,000	99.83 %	1,077,000
RAL.001 Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	638,976,000	0	334,369,000	303,530,000	637,899,000	99.83 %	1,077,000
WA Program Dukungan Manajemen	11,244,282,000	0	9,450,854,680	1,763,205,626	11,214,060,306	99.73 %	30,221,694
WA.2348 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	11,244,282,000	0	9,450,854,680	1,763,205,626	11,214,060,306	99.73 %	30,221,694
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	100,000,000	0	99,996,500	0	99,996,500	100.00	3,500
CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	100,000,000	0	99,996,500	0	99,996,500	100.00	3,500
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	10,446,501,000	0	8,762,779,037	1,656,637,428	10,419,416,465	99.74 %	27,084,535
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	150,750,000	0	132,930,550	5,706,500	138,637,050	91.96 %	12,112,950
EBA.962 Layanan Umum	180,000,000	0	116,826,919	54,268,381	171,095,300	95.05 %	8,904,700
EBA.994 Layanan Perkantoran	10,115,751,000	0	8,513,021,568	1,596,662,547	10,109,684,115	99.94 %	6,066,885
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	155,250,000	0	124,992,400	28,163,730	153,156,130	98.65 %	2,093,870
EBC.001 Layanan Manajemen SDM	155,250,000	0	124,992,400	28,163,730	153,156,130	98.65 %	2,093,870
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	542,531,000	0	463,086,743	78,404,468	541,491,211	99.81 %	1,039,789
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	222,750,000	0	181,099,628	41,450,691	222,550,319	99.91 %	199,681

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput;

Periode Desember 2023

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA
Satuan Kerja : 567385 BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

Hal 3 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	216,844,000	0	180,844,242	35,693,777	216,538,019	99.86 %	305,981
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	102,937,000	0	101,142,873	1,260,000	102,402,873	99.48 %	534,127

Aquaculture is future



BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

Jalan Laksamana Malahayati Km. 16 Ujung Batee, Masjid Raya, Kab Aceh Besar, Prov Aceh

Telepon : 08116811448 | email : tu.bbapub@gmail.com

<https://kkp.go.id/djpb/bpbapujungbatee>